

SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI SULAWESI UTARA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA 1984

SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI SULAWESI UTARA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984/1985**

Milik Departemen DIKBUD
Tidak diperdagangkan

Tim Penulis :

Drs. J.P. Tooy

Let. Kol. Inf. Drs. Soetardono

Drs. P.A.W. Parongharan

Drs. P. Rempas

Disunting kembali

Oleh :

1. Drs. S. Sumardi
2. Drs. M. Sunjata Kartadarmadja

Gambar kulit Oleh :

M.S. KARTA

COPYRIGHT PADA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

Cetakan I tahun 1981

Cetakan II tahun 1984

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

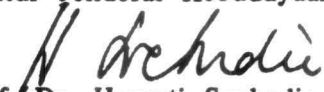
Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1981

Direktur Jenderal Kebudayaan


Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi berbagai perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1981

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

KATA PENGANTAR

CETAKAN KEDUA

Mengingat besarnya perhatian serta banyaknya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (ISDN), maka pada tahun anggaran 1984/1985 proyek melaksanakan penerbitan/pencetakan ulang terhadap beberapa buku yang sudah tidak ada persediaan.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Jakarta, Mei 1984

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Bab I.	Perlawanan di Sangir Talaud	3
A.	Latar Belakang Perlawanan	3
B.	Ujud Perlawanan	12
C.	Jalan Perlawanan	15
1.	Perlawanan Rakyat Siau	16
2.	Perlawanan Rakyat Manganitu	22
3.	Perlawanan Rakyat Arangkaa	26
4.	Perlawanan Rakyat Makalehi	33
D.	Akibat Perlawanan	38
Bab II.	Perlawanan di Gorontalo	42
A.	Latar Belakang Perlawanan	42
B.	Ujud Perlawanan	55
C.	Jalan Perlawanan	59
1.	Perang Panipi	59
2.	Perlawanan di Samalata	62
3.	Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo ..	63
4.	Peristiwa Jepang di Limboto	66
D.	Akibat Perlawanan	67
Bab III.	Perlawanan di Minahasa	70
A.	Latar Belakang Perlawanan	70
B.	Ujud Perlawanan	74
C.	Jalan Perlawanan	77
1.	Perlawanan Rakyat Minahasa Terhadap Sepanyol 1644	78

2. Perang Tondano 1807 – 1809	81
3. Perebutan Kekuasaan Nica di Sulawesi Utara	91
D. Akibat Perlawanan	103
Bab IV. Perlawanan di Bolaang Mongondow	106
A. Latar Belakang Perlawanan	106
1. Letak dan Batas Wilayah	106
2. Perkembangan Penduduk	106
3. Wilayah Hukum Pemerintahan	107
B. Ujud Perlawanan	113
C. Jalan Perlawanan	114
1. Perlawanan Rakyat Sebelum Abad ke-20 .	114
2. Perlawanan Rakyat Pontodon Tahun 1901	115
3. Perlawanan Rakyat Molibagu 1946 – 1950	116
4. Perlawanan Pasukan Banteng Maesa (1945 – 1947)	117
5. Perlawanan Pasukan Pemuda Indonesia Las- kar Banteng	120
D. Akibat Perlawanan	125
CATATAN	128
DAFTAR BACAAN	134
DAFTAR INFORMAN	137

PENDAHULUAN

Adapun wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang menjadi obyek/lokasi penulisan Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di daerah ini, meliputi enam Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya) dan satu Kota Administratif yaitu:

1. Kabupaten Sangir-Talaud
2. Kabupaten Minahasa
3. Kotamadya Manado
4. Kabupaten Bolaang-Mongondow
5. Kabupaten Gorontalo
6. Kotamadya Gorontalo
7. Kota Administratif Bitung, yang terdiri dari 83 kecamatan dengan luas wilayahnya ± 25.786 km². Kabupaten paling utara yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina yaitu Sangir Talaud yang terdiri dari kurang lebih 77 buah pulau. Daerah kebudayaannya ada empat yaitu kebudayaan Minahasa, kebudayaan Sangir Talaud, kebudayaan Bolaang-Mongondow dan kebudayaan Gorontalo. Jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa.

BAB 1. PERLAWANAN DI SANGIR TALAUD

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

Sangir Talaud sekarang ini secara administratif adalah sebagai suatu kabupaten Daerah Tingkat II, dan merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Lokasinya merupakan wilayah paling utara dari Republik Indonesia, berbatasan dengan Republik Filipina. Letaknya antara $2^{\circ}4' - 5^{\circ}35'$ Lintang Utara dan antara $125^{\circ}30' - 127^{\circ}30'$ Bujur Timur.¹⁾ Dengan demikian daerah ini merupakan wilayah paling utara dari propinsi tersebut di atas.

S. Colsma menamakan daerah ini *Noorder Eilanden* atau pulau-pulau paling utara, sedang J.M. Brown menamakannya *Archipelago of Tears*, kepulauan air mata. Secara geografis, kepulauan Sangir Talaud terdiri atas empat gugus kepulauan yakni:

1. Pulau Tagulandang dan pulau-pulau sekitarnya;
2. Pulau Siau dan pulau-pulau sekitarnya;
3. Pulau Sangir besar dan pulau-pulau sekitarnya; dan
4. Gugus Kepulauan Talaud.²⁾

Tapi secara administratif pemerintahan, kepulauan ini dibagi atas tiga wilayah yakni:

1. Wilayah Kepulauan Talaud;
2. Wilayah Kepulauan Sangir Besar;
3. Wilayah Kepulauan Siau-Tagulandang.

Masing-masing wilayah dikepalai oleh seorang penghubung-bupati, dan selanjutnya ketiga penghubung-bupati dikepalai oleh Bupati/Kepala Daerah.

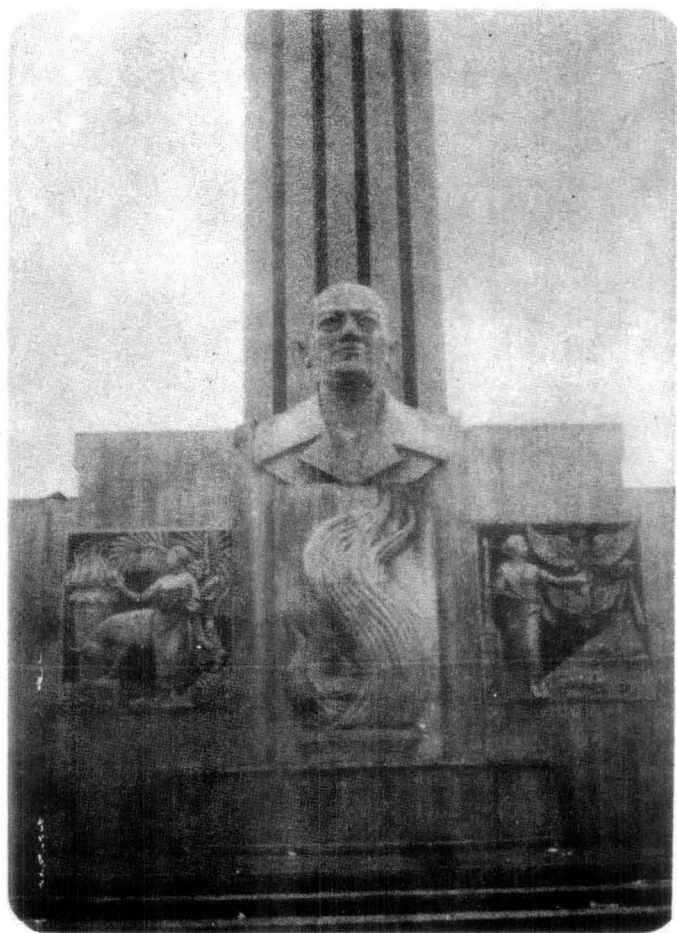
Daerah ini termasuk dalam jalur lingkaran gunung berapi *Circum Pacific* sehingga merupakan daerah gunung berapi yang sampai sekarang masih tetap aktif. Gunung api Awu di pulau Sangir Besar sepanjang diketahui telah enam kali meletus, yakni pada tahun 1641, 1711, 1812, 1856, 1892 dan 1966. Gunung api Karangetang di pulau Siau juga telah beberapa kali meletus.

Selain itu ada juga gunung api di pulau Ruang, dekat pulau Tagulandang. Gunung Api Awu dalam letusan tahun 1711, menyebabkan musnahnya kerajaan Maselihe di pantai barat bagian utara pulau Sangir Besar.³⁾

Secara etnografis, penduduk asli daerah ini termasuk dalam rumpun bangsa Melayu Polinesia (Austronesia). Bahasa daerahnya terdiri atas dua kelompok yakni kelompok bahasa Talaud dan kelompok bahasa Sangir (dengan tiga dialek yakni dialek Sangir Besar, dialek Siau dan dialek Tagulandang). Antara kedua kelompok bahasa itu tidak dapat saling dimengerti karena perbedaan kosakata/leksikonnya. Yang unik di daerah ini ialah adanya semacam bahasa rahasia yang hanya berlaku di laut yakni disebut bahasa *Sasahara*. Bahasa ini umumnya dipergunakan oleh para nelayan tradisional.

Dalam bidang pemerintahan, sebelum masuknya pengaruh bangsa Barat, diketahui bahwa pemerintahan dipegang oleh golongan pendeta dan pemimpin tentara (*kulano*) yang dipimpin oleh *Ampuang*. Tugas utama Ampuang ialah memimpin upacara keagamaan dan memelihara/menjaga adat istiadat setempat. Masing-masing daerah yang kemudian berstatus kerajaan, memiliki golongan-golongan tersebut di atas. Agama dan adat istiadat menjadi tugas para pemimpin upacara animisme/dinamisme (katakan saja golongan pendeta). Sedang urusan pemerintahan dan keagamaan ditangani oleh para *kulano* (katakan saja golongan birokratis).

Karena sering terjadinya peperangan antara suku maupun melawan kekuatan dari luar terutama dari pihak bajak laut, maka terjadi pergeseran kekuasaan dari Ampuang ke tangan para *kulano*. Hal ini logis mengingat dalam situasi adanya ancaman maka



Relief DR. JJS Ratulangi

golongan birokratis militer paling menonjol. Kulano kemudian menamakan dirinya *datu* (= datuk, *dato*) yang berfungsi selaku pelindung masyarakat terhadap ancaman dari luar sekaligus sebagai pengayom rakyat dan adat istiadat setempat. Kemudian dato ini bertindak selaku raja (penguasa) terutama pada saat-saat menjelang masuknya pengaruh bangsa Barat.⁴⁾

Ketika masuknya bangsa Barat di daerah ini terdapat beberapa kerajaan besar kecil antaranya :

1. Di kepulauan Sangir Besar; kerajaan Kolongan, Tahuna, Mangnitu, Tabukan, Kendahe (Kendhar) dan lain-lain.
2. Di kepulauan Talaud : kerajaan Lirung, Arangkaa, Beo, Esang, Moronge dan lain-lain.
3. Di Tagulandang dan sekitarnya : kerajaan Tagulandang.
4. Di Siau dan sekitarnya : kerajaan Siau.⁵⁾

Bangsa Barat pertama yang dikenal di daerah ini adalah bangsa Portugis (abad ke-16) yang masuk melalui Kesultanan Ternate (Maluku). Kemudian bangsa Spanyol (abad ke-16) yang masuk melalui Filipina. Selanjutnya bangsa Belanda (abad ke-17) yang seperti Portugis, juga masuk melalui Ternate. Di kemudian hari masuk pula pengaruh Inggris (awal abad ke-19) dan Jepang (abad ke-20). Kedatangan bangsa Barat itu pada umumnya dengan motif ekonomi serta agama, yang kemudian dikembangkan dengan motif politik (penguasaan wilayah). Jepang yang masuk dalam rangka Perang Dunia II (1942 – 1945) ke daerah ini dengan motif untuk memenangkan perangnya melawan sekutu.

Cara yang mereka laksanakan untuk mewujudkan apa yang dikejar oleh motif-motif di atas adalah bermacam-macam. Justru untuk menghadapi maksud-maksud kedatangan bangsa-bangsa asing itulah maka di daerah ini telah berkobar sejumlah perlawanan. Perlawanan-perlawanan itu juga dapat dikatakan punya latar belakang sendiri-sendiri namun sasaran/tujuannya adalah untuk mengusir penjajah asing yang dianggap merupakan bahaya bagi kelangsungan hidup pemerintah dan masyarakat pribumi setempat.

Sama yang terjadi di daerah-daerah lain di Nusantara, kedatangan bangsa Portugis disambut dengan tangan terbuka. Mereka dianggap sebagai sekutu dagang yang statusnya sama

dengan kaum pedagang penduduk aseli lainnya. Bahkan sejak zaman Majapahit, para pedagang Jawa seringkali datang dan membeli hasil-hasil daerah itu terutama minyak kelapa untuk dibawa ke Cina. Petunjuk mengenai hal ini menurut keterangan ialah diperkenalkannya cara duduk bersila oleh para pedagang Majapahit itu bilamana datang menghadap raja. Cara duduk bersila itu dalam bahasa Sangir disebut *Sarajiawa* yang dahulunya berarti "cara duduk Jawa".⁶⁾ Jelaslah bahwa hubungan dagang adalah hal yang senantiasa berlangsung berabad-abad sebelum datangnya bangsa Portugis. Karena mereka juga datang untuk berdagang maka tidaklah mengherankan apabila mereka diperlakukan sama seperti status kaum pedagang Nusantara lainnya.

Kehadiran bangsa Portugis di Indonesia bagian Timur dimulai atas perintah Laksamana d' Albuquerque yang pada tahun 1511, setelah berhasil merebut kota dagang Malaka, memerintahkan Fransisco Serrao supaya berlayar ke Maluku. Serrao tiba dan menjalin persahabatan dengan Hitu. Tahun 1512 datang di Ternate dan berhasil pula menjalin persahabatan di sana. Tahun 1563, ketika itu diketahui bahwa Sultan Hairun dari Ternate hendak mengirimkan pasukan untuk menaklukkan/mengislamkan wilayah Sulawesi utara. Pasukan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Henrique de Sa disertai juga oleh Paderi Diogo de Magelhaes untuk mempengaruhi para penguasa pribumi dan rakyat Sulawesi Utara agar memeluk agama Katolik. Misi Portugis itu berhasil dengan dibaptiskannya raja Babontehu (Manado) dan raja Siau.⁷⁾

Setelah usahanya dalam perdagangan dan penyebaran agama Katolik berhasil, maka Portugis melangkah ke program berikutnya yakni berusaha mengadakan penguasaan wilayah seperti halnya di Semenanjung Malaya. Langkah ke arah lain lebih dipercepat lagi oleh munculnya Spanyol di Maluku. Spanyol tiba pada bulan Nopember 1521 dan berhasil menjalin hubungan dengan sultan Tidore. Kedatangan Spanyol ini menurut Portugis adalah suatu pelanggaran terhadap Piagam Tordesillas 7 Juni 1494, yang membagi dunia ini menjadi dua wilayah pengaruh kedua bangsa Barat itu. Menurut isi perjanjian tersebut, Portugis diberi hak untuk berdagang dan menyebarkan agama mulai Afrika sampai Maluku sedang Spanyol mulai Amerika sampai

Filipina.

Kehadiran Spanyol ini dianggap merupakan saingan sehingga Portugis harus meningkatkan pengaruh atas penguasa-penguasa pribumi sekaligus harus memperkuat kemampuan militernya. Akhirnya setelah peperangan antara kedua bangsa itu berakhir di Eropa pada tahun 1580, maka mereka bersama-sama melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya di Nusantara ini dalam bidang perdagangan, penyebaran agama dan penguasaan wilayah sampai munculnya bangsa Belanda pada tahun 1596. Sejak itu kekuatan asing di Nusantara berpolarisasi atas dua pihak yakni Portugis-Spanyol di satu pihak dan Belanda di lain pihak. Tapi akhirnya Belanda keluar sebagai pemenang, baik terhadap kedua bangsa Barat terdahulu maupun terhadap kedaulatan kekuasaan-kekuasaan pribumi di Nusantara.

Namun keberhasilan mereka selama berada di Nusantara tidaklah berlangsung tanpa hambatan. Kerajaan demi kerajaan, suku demi suku, daerah-demi daerah, mengobarkan perlawanan besar kecil untuk mengusir mereka. Di daerah Sangir Talaud pun timbul banyak perlawanan serupa untuk menengahkan bangsa-bangsa Barat dari sana. Yang sempat dikumpulkan adalah perlawanan rakyat Arangkaa (Talaud), di Manganitu (Sangir Besar) di Siau, dan di Makalehi.

Latar belakang berkobarnya perlawanan memang berbeda-beda. Rakyat Manganitu mengobarkan perlawanan karena hendak mempertahankan diri terhadap eksploitasi Belanda atas wilayah kerajaan mereka. Rakyat Siau mengobarkan perlawanan terhadap Spanyol untuk menegakkan kewibawaan kerajaan. Sedangkan terhadap Belanda karena hendak mempertahankan diri dari tekanan-tekanannya. Rakyat Arangkaa melawan karena hak kedaulatan dan kehormatan kerajaan mereka diperlakukan dengan semena-mena oleh Belanda. Sedangkan perlawanan rakyat Makalehi terhadap Jepang adalah karena rasa tidak puas terhadap politik Jepang yang menindas hasrat perjuangan kemerdekaan.

Di kerajaan Siau, selama beberapa generasi, pemerintahan dan masyarakat di sana berjalan langsung sampai masuknya pengaruh Portugis. Sebagaimana diketahui, untuk mencegah penaklukan dan pengislaman seluruh Sulawesi Utara yang hendak

dijalankan oleh Kesultanan Ternate, maka Portugis mengirimkan armada angkatan laut dipimpin oleh Laksamana Hendrique de Sa. Pasukan ini membawa seorang paderi Katolik bernama Diogo de Magelhaes. Tahun 1563, misi ini berhasil membaptiskan raja Babonteku (Manado) yang pusat kerajaannya sekarang terletak di pulau Manado Tua. Karena kebetulan Raja Posumah dari kerajaan Siau bertamu di sana dan tertarik, maka ia pun minta dibaptiskan.⁸⁾ Ketika Raja Posumah kembali ke Siau, disertai Paderi Magelhaes timbul kegoncangan di kalangan masyarakat yang belum mau menerima kenyataan bahwa raja mereka telah memeluk agama Katolik yang dibawa oleh Portugis. Terjadilah perang saudara namun akhirnya raja berhasil menguasai keadaan. Diundanglah Paderi Mascarenhas ke Siau yang berhasil menarik rakyat Siau masuk Katolik. Agama ini kemudian menjadi agama kerajaan, meskipun kepercayaan lama yang bersifat animisme dan dinamisme secara terpisah tidak ditinggalkannya.

Hubungan perdagangan antara Portugis dengan kerajaan Siau menjadi berlangsung. Tetapi Portugis gagal membina hubungan serupa dengan kerajaan Kolongan di Pulau Sangir Besar yang dipimpin oleh Raja Tatehewoba. Bahkan sebuah kapal Portugis yang berlabuh di pelabuhan Kolongan, ditenggelamkan atas perintah raja ini. Dan untuk mencegah tindak balas Portugis, raja memindahkan kekuasaannya dari Kolongan ke Tahuna. Di sana mulai 1600, ia mendirikan kerajaan Tahuna menggantikan kerajaan Kolongan.⁹⁾

Kehadiran Belanda di Sulawesi Utara dimulai dengan adanya perjanjian antara Belanda (VOC) dengan Kesultanan Ternate. Perjanjian itu ditandatangani 26 Mei 1607. Isinya tentang penyerahan daerah Sangir Talaud (kecuali Siau) dari Ternate kepada VOC yang diwakili oleh Laksamana Matelief de Jonge. Siau tidak dimasukkan ke dalam isi perjanjian sebab kerajaan ini adalah sahabat Spanyol dan bukan berada di bawah pengaruh Ternate.¹⁰⁾

Jika dilihat peta bumi politik pada masa itu maka jelas terlihat bahwa daerah Sulawesi Utara merupakan daerah penyanggah (buffer zone) terhadap dua kekuatan kolonialis/imperialis Barat yang diwakili oleh Portugis-Spanyol dan Belanda. Portugis-Spanyol menguasai Philipina di utara, sedang

Belanda berada di Ternate (Maluku). Portugis-Spanyol bersahabat erat dengan Kerajaan Siau, bahkan memiliki dua buah benteng di sana. Wilayah lainnya termasuk di bawah pengaruh atau perlindungan Ternate. Antara kedua pihak Barat itu, terjadi saling berebutan pengaruh atas daerah Sulawesi Utara. Ternyata Belanda keluar sebagai pemenang dengan diadakannya perjanjian dengan Ternate itu. Perjanjian itu menjadi landasan pengesahan tindakan-tindakan Belanda di wilayah Sulawesi Utara.

Belanda tentu saja tidak senang bahwa ada satu kerajaan yang tidak turut dimasukkan dalam isi perjanjian di atas. Hal ini terjadi karena Siau terus membina hubungan baik dengan Portugis-Spanyol, bahkan menjadikan kedua bangsa di atas sebagai pelindungnya terhadap tekanan-tekanan pihak Ternate dan kemudian Belanda. Atas alasan ini maka tidaklah mengherankan kalau Belanda terdorong untuk menguasai Siau.

Tindakan Belanda ini rupanya didasarkan pada perhitungan politis yaitu dengan ditaklukkannya Siau maka sempurnalah wilayah Sulawesi Utara dimasukkan dalam wilayah pengaruh Belanda. Juga sekaligus menjadi pemenang dalam persaingan mereka dengan Portugis-Spanyol yang berpusat di Manila (Filipina). Secara ekonomis diketahui bahwa Siau banyak menghasilkan rempah-rempah berupa pala dan cengkih yang cukup potensial bagi pasaran di Eropa. Apalagi tanpa Siau maka monopoli perdagangan yang selalu diperjuangkan Belanda belumlah lengkap terjamin kelangsungannya. Hal ini karena Siau hanya mau menjual hasil-hasilnya keluar melalui Filipina dan mengabaikan sama sekali monopoli Belanda tersebut.

Tambahan pula, Belanda memperluas wilayah operasional dari *hongi-tochten* yang bukan hanya di Maluku saja tetapi di daerah Sangir Talaud juga. Hal ini terbukti kemudian dengan adanya sebuah fasal dalam setiap perjanjian yang mula-mula dilakukan antara Belanda dan kerajaan-kerajaan di daerah ini. Pasal mana pada dasarnya memerintahkan agar semua pohon cengkih dan pohon rempah-rempah harus ditebang serta dilarang menanamnya lagi.

Mengenai hal ini dapat lebih jelas apabila kita mengikuti latar belakang perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Manganitu.

Raja pertama kerajaan ini ialah Raja Tolosang (Tolo) yang memerintah pada tahun 1600 – 1645. Ia kemudian diganti oleh Raja Tompoliu (Tompo) antara tahun 1645-1670. Pada masa pemerintahan mereka, kerajaan ini senantiasa membina hubungan dagang ini maka agama Katolik diterima dengan baik oleh rakyat di sana, bahkan sampai ke kalangan istana kerajaan. Atas dasar hubungan dagang dan keagamaan itulah maka mereka menolak untuk berhubungan dengan Belanda, yang diketahui hendak memaksakan monopoli dagang dan yang dianggap berbeda agamanya.

Dalam masa pemerintahan Raja Rompoliu ini, kapal-kapal VOC datang dan minta izin berlabuh di pelabuhan Manganitu. Tapi karena Raja telah lebih dahulu bersikap antipati terhadap Belanda, maka kedatangan mereka ditolak. Sikap raja ini juga dianut oleh anaknya yang menggantikan dia sebagai raja. Ia bernama Bataha yang dibaptiskan dalam agama Katolik dengan nama Santiago. Raja Bataha Santiago ini memerintah pada tahun 1670-1675. Selama masa pemerintahannya, ia tetap melanjutkan politik ayahnya dalam menghadapi masuknya pengaruh Belanda di Manganitu (Sangir Besar).

Di kepulauan Talaud terdapat pula beberapa kerajaan, antaranya kerajaan Lirung, Esang, Moronge, Arangkaa dan lain-lainnya. Namun jauh sebelum datangnya bangsa Barat, semua kerajaan di Talaud ini berada di bawah kekuasaan dari beberapa kerajaan di kepulauan Sangir. Dengan semakin mantapnya kedudukan Belanda di kepulauan Sangir, maka mereka hendak meninjau kembali kedudukan (status) kerajaan-kerajaan yang ada di kepulauan Talaud.

Atas dasar bahwa sejak dahulu kerajaan-kerajaan di kepulauan Talaud merupakan vasal dari beberapa kerajaan di kepulauan Sangir, maka Belanda mencoba mengadakan perubahan terhadap status kerajaan-kerajaan di sana. Langkah perubahan ini berupa penghapusan kerajaan-kerajaan yang ada sehingga wilayah setiap kerajaan kemudian berstatus sebagai distrik saja. Penguasa kerajaan menjadi sebagai kepala distrik dan jabatannya bukan lagi raja melainkan *Jogugu*. Di antara para *Jogugu* (kepala distrik itu) dipilih dua orang yang wilayah dan pengaruhnya terbesar menjadi Presiden *Jogugu*.

Di bawah tekanan pemerintah kolonial Belanda, semua kerajaan di kepulauan Talaud menerima saja berlakunya perubahan itu. Hanya ada satu kerajaan yang sama sekali menentangnya yakni kerajaan Arangkaa di pulau Karakelang bagian utara. Penguasa di kerajaan itu bernama Raja Manee yang kemudian diganti oleh Raja Larenggam (1889-1893).

Perlawanan yang terakhir yang diketahui oleh rakyat Sangir Talaud adalah perlawanan rakyat pulau Makalehi melawan pemerintah pendudukan Jepang tahun 1945. Pulau Makalehi terletak di sebelah barat pulau Siau, tepat di hadapan kota Ondong (ibu negeri Kecamatan Siau Barat sekarang). Pada masa itu pulau ini banyak menghasilkan ketela pohon, pisang dan ikan laut yang kebanyakan dipasarkan di Ondong. Di tengah pulau terdapat sebuah danau yang dahulunya mungkin terbentuk dari kaldera gunung berapi di pulau itu.

Sejak terbentuknya PNI tahun 1927, di pulau Siau dan sekitarnya telah dibentuk pula cabang PNI, dipelopori oleh G.E. Dauhan (alias Geda). Ketika PNI dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia, maka banyak di antara pemimpinnya ditangkap, termasuk pula mereka yang di pulau Siau. Sejak itu para anggota PNI di sana melakukan gerakan di bawah tanah antaranya dengan membentuk organisasi yang dinamakan "Leter P". Hal ini berlangsung terus sampai saatnya pendudukan Jepang.

Menjelang kekalahan Belanda, para aktivis PNI bangkit kembali dan membentuk organisasi KNS (Komite Nasional Siau). KNS ini dalam programnya hendak menegakkan kemerdekaan di pulau Siau khususnya dan di daerah Sangir Talaud pada umumnya. Mereka mengibarkan bendera Merah Putih di pulau tersebut. KNS menangkap semua pejabat maupun orang yang diketahui memihak Belanda. Raja P.F. Parengkuan yang memerintah kerajaan Siau waktu itu, memilih memihak KNS. Para tangkapan itu diserahkan KNS kepada pemerintah pendudukan Jepang di Manado.

Namun akhirnya, Jepang tidak mau mengakui perjuangan KNS untuk menegakkan kemerdekaan di Siau. Bendera Merah Putih dilarang berkibar dan lagu Indonesia Raya dilarang di

kumandangan. Terpendamlah kini cita-cita kemerdekaan waktu itu di sana. Jogugu (Kepala Distrik) Ondong bernama E. Mathing ditangkap Jepang atas tuduhan sebagai mata-mata Sekutu, lalu dibawa ke Tahuna. Rakyat Makalehi yang sangat bersimpati terhadap Jogugu itu menjadi marah. Mereka berperahu ke Ondong untuk menanyakan apa sebab-sebab Jogugu E. Marthing ditangkap dan di mana ia berada. Karena ternyata Jogugu sudah dibawa ke Tahuna maka mereka melampiaskan kemarahannya dengan menangkap orang-orang yang dianggap jadi kaki tangan Jepang, antaranya Pendeta G. Wlias lalu dibawa ke Makalehi. Kebetulan ada sebuah pesawat terbang Sekutu jenis Catalina yang terpaksa mendarat di perairan Makalehi. Semangat perjuangan PNI dahulu kini semakin membara oleh adanya janji Sekutu memberikan senjata untuk melawan Jepang. Dimulailah perlawanan rakyat Makalehi pada tahun 1945 itu untuk melawan Jepang.

B. UJUD PERLAWANAN

Perlawanan yang terjadi di daerah kepulauan Sangir Talaud pada umumnya dipelopori oleh golongan birokrasi, dalam hal ini raja dan aparaturnya. Perlawanan itu disokong sepenuhnya oleh rakyat setempat, yang merupakan mayoritas pengikut perlawanan. Namun yang jelas bahwa yang menjadi inti perlawanan adalah golongan birokrasi dan golongan bangsawan.

Tapi hal di atas tidak berlaku untuk perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat Makalehi di masa pendudukan Jepang. Yang tampil memimpin adalah mereka-mereka yang jiwanya sudah diresapi oleh semangat nasionalisme. Mereka itu tidaklah berasal dari golongan birokrasi atau golongan bangsawan. Tidak pula dari golongan agama walaupun terlihat adanya tendens hidupnya kembali kepercayaan lama yang bersifat animisme dan dinamisme. Mereka tampil dari kalangan rakyat yang membutuhkan adanya pimpinan perlawanan, yang mampu memberi isi dan memberi arah kepada perlawanan itu.

Kalau pada perlawanan-perlawanan sebelumnya, langkah-langkah yang ditempuh oleh para pemimpin perlawanan dari

golongan birokrasi bangsawan kemudian disokong / didukung oleh rakyat biasa, maka di Makalehi berlaku yang sebaliknya. Golongan rakyat tampil ke depan yang memperoleh simpati golongan birokrasi dalam ujud pribadi Jogugu Ondong. Hal ini sudah pula berlaku sebelumnya, yakni ketika KNS yang dipimpin oleh golongan rakyat, menangkapi semua pejabat dan orang-orang yang bersimpati pada Belanda untuk diserahkan kepada Jepang. Raja Siau menunjukkan rasa simpati bahkan kemudian bergabung dengan KNS untuk menyongsong kedatangan tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Merekalah golongan nasionalis yang meneruskan perjuangan menegakkan kemerdekaan terhadap Belanda kemudian terhadap Jepang.

Perlu diketengahkan bahwa dalam perlawanan-perlawanan yang dilancarkan terhadap kaum kolonialis/imperialis Barat, tidak dapat disangkal lagi bahwa hal itu dilakukan oleh seluruh rakyat dari kerajaan setempat di daerah tersebut. Hal ini tentu saja didasarkan pada loyalitas rakyat terhadap raja /penguasa termasuk perlawanan dari rakyat Makalehi. Memang semua rakyat di pulau tersebut telah bangkit melawan Jepang, tapi tidak diikuti oleh rakyat di pulau Siau di mana pusat pemerintahannya berkedudukan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa loyalitas pengikut perlawanan didasarkan pada ikatan-ikatan kesetiaan terhadap raja, sedangkan di pulau Makalehi didasarkan pada ikatan-ikatan politis, dalam hal ini perjuangan kemerdekaan Indonesia. Khusus untuk perlawanan dari rakyat Manganitu dapat dikemukakan akan adanya unsur ikatan keagamaan dalam hal ini agama Katolik. Sebabnya ialah penentangan raja Batahu Santiago terhadap salah satu pasal kontrak politik yang mengharuskan agama Kristen-Protestan sebagai agama kerajaan.

Mengenai semboyan perjuangan, dalam beberapa perjuangan kurang nampak dengan jelas. Bagi rakyat Siau yang melawan Belanda, semboyan perlawanan berciri penentangan dominasi Belanda. Sedang ketika perlawanan terhadap Spanyol, berkisar pada perang melawan teror terhadap rakyat. Hal ini disebabkan oleh para prajurit Spanyol yang berada di kedua benteng yang ada di sana, seringkali mengganggu ketentraman rakyat dengan

mengadakan penggarongan dan pemerksaan harta benda dan hak rakyat Siau.

Bagi rakyat Manganitu di pulau Sangir Besar lain pula halnya. Belanda hendak memaksakan tiga perkara yang sama sekali tidak dapat diterima rakyat yaitu penumpasan tanaman cengkih, wajib diterimanya agama Kristen (Protestan) dan diberantasnya semua alat kebudayaan setempat. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa semboyan perjuangan di sana adalah penolakan masuknya kekuasaan Belanda yang hendak menghancurkan ekonomi, kehidupan kebudayaan dan keagamaan yang menjadi identitas kerajaan ini jauh sebelum masuknya pengaruh Belanda.

Berbeda dengan hal-hal di atas maka perlawanan di Arangkaa (Talaud) berkobar karena politik pemerintahan kolonial yang hendak menghapuskan status kerajaan di sana. Olehnya maka semboyan perlawanan di sana adalah perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan pemerintah pribumi dari campur tangan politik kolonial Belanda. Terkenallah semboyan perlawanan dari Raja Larenggam "*leta'a masenna, langi' marandumma*" artinya: "langit gelap, tanah terang." Maksudnya berjuang pantang mundur walaupun langit runtuh dan tanah terbelah, biar mati **berkalang tanah** tapi pantang menyerah. Raja itu kemudian tewas oleh peluru musuh. 11)

Tentang perlawanan rakyat Makalehi, diketahui bahwa perjuangan mereka bertendens politik. Dengan sendirinya semboyan perjuangan mereka juga bercirikan politik, dalam hal ini untuk menghapuskan pemerintahan pendudukan Jepang di sana. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka mereka menempatkan uluran tangan Sekutu yang menjanjikan bantuan persenjataan militer kepada mereka. Tapi pada kenyataannya, bantuan itu tidak pernah dapat diberikan sehingga rakyat Makalehi melawan dengan mempergunakan kemampuan seadanya yang berhasil ditindas oleh Jepang.

Dari perlawanan-perlawanan yang dibahas dalam uraian ini maka dapat dikatakan bahwa motif diadakannya adalah bermacam-macam. Perlawanan rakyat Siau melawan Belanda

bermotif politik dan ekonomi. Terhadap Spanyol bermotif politik yakni hendak menegakkan kewibawaan kerajaan dalam membela rakyat yang mengalami teror oleh prajurit-prajurit Spanyol.

Perlawanan di Manganitu (Sangir Besar) bermotifkan politik, ekonomi, agama dan juga kultural. Motif politik ternyata pada penolakan terhadap kontrak politik yang hendak dipaksakan Belanda. Motif ekonomi karena hendak menentang sistem monopoli rempah-rempah. Motif agama berkisar pada usaha mempertahankan kebebasan beragama dan justru di situlah Belanda memaksakan agama Kristen (Protestan) sebagai satu-satunya agama di kerajaan itu. Motif kultural sebab Belanda menghendaki dimusnahkannya benda-benda dan upacara-upacara sakral dan kerakyatan di sana. Sedangkan perlawanan rakyat Makalehi bermotifkan politis yakni untuk mewujudkan kemerdekaan terhadap tentara pendudukan Jepang.

Berhubung yang menjadi inti perlawanan adalah golongan birokrasi dan bangsawan, maka pencetus ide, semboyan dan pemberi motivasi perlawanan di Siau, Manganitu dan Arangkaa adalah dari golongan tersebut. Di Siau adalah raja Batahi dan Laksamana Hengkenguaung. Di Manganitu adalah Raja Bataha Santiago dan Panglima Diamanti. Di Arangkaa adalah Raja Larenggam sendiri. Tapi di Makalehi yang mencetuskan ide, semboyan dan pemberi motivasi adalah para pemimpin rakyat yang bukan bagian resmi dari struktur pemerintahan setempat. Mereka di bawah pimpinan Salmon Labaeng, Willem Kakauhe dan seorang yang dinamakan Opo Mbengi.

Setelah meninjau sejarah mengenai latar belakang dan bentuk/ujud perlawanan maka berikut ini adalah tentang jalannya perlawanan-perlawanan yang telah disebutkan di atas.

C. JALAN PERLAWANAN

Perlawanan di daerah Sangir Talaud yang dikemukakan dalam bagian ini adalah yang berkobar di Siau, Manganitu, Arangkaa dan di Makalehi. Siau mengadakan perlawanan terhadap Spanyol dan kemudian Belanda, Manganitu dan Arangkaa terhadap Belanda sedangkan Makalehi terhadap

Jepang. Mengenai jalannya perlawanan itu dapat diikuti uraian di bawah ini.

1. Perlawanan Rakyat Siau

Kerajaan Siau ini berdiri mulai tahun 1510 dengan raja pertamanya ialah Raja Lokongbanua (1510-1549). Ketika ia mangkat, maka timbul perselisihan antara kedua puteranya yakni Angkumang (sulung) dan Posumah (bungsu), tapi akhirnya setelah melalui pertempuran yang menentukan, Posumah keluar sebagai pemenang dan memerintah dari tahun 1549-1587. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate mengirimkan anaknya Baabullah membawa armada angkatan laut untuk memaksa penduduk Sulawesi Utara masuk Islam pada tahun 1563.

Portugis yang melihat bahwa tindakan sultan itu akan amat merugikan operasi dagangnya, mengirimkan pula armada yang dipimpin oleh Laksamana Henrique de Sa dengan membawa Paderi Diogo de Magelhaes untuk menyebarkan agama Katolik di Sulawesi Utara sampai ke Tolitoli (Sulawesi Tengah). Misi itu berhasil ketika Raja Babontehu yang berpusat di pulau Manado Tua dibaptiskan bersama 1500 rakyatnya. Kebetulan Raja Posumah dari Kerajaan Siau sedang menjadi tamu di kerajaan Babontehu itu. Ia pun bersimpati lalu minta dibaptiskan masuk agama Katolik.

Sepulangnya di Siau, tindakannya itu ditentang oleh rakyat yang seluruhnya masih kuat menganut kepercayaan lama yang bersifat animisme dan dinamisme. Terjadilah pertumpahan darah berupa perang saudara yang saat ini bukan lagi bersifat perebutan tahta melainkan semacam protes terhadap masuknya Raja Posumah ke agama Katolik. Nyala kebencian kepada Portugis yang dianggap telah mempengaruhi raja mulai terlihat. Tapi akhirnya perang saudara ini dapat dipadamkan oleh raja. Kontak pertama dengan bangsa Barat menimbulkan bekas yang sukar dilupakan rakyat Siau.

Ancaman dari Kesultanan Ternate dianggap merupakan bahaya yang selalu mengintai kedaulatan kerajaan Siau. Atas

alasan itu maka Raja Don Jeronimo Winsulangi pergi ke Manila (Filipina) pada tahun 1593 untuk menjalin persahabatan dengan Spanyol di Manila. Pada tanggal 16 Agustus 1593 ditandatangani perjanjian antara kerajaan Siau dan Spanyol yang diwakili oleh Gubernur Goetz Perez Dazmarinas (1590 – 1593). Isi perjanjian itu antara lain ialah Siau mengakui Sepanyol sebagai yang dipertuan. Hal ini dapat dianggap sebagai taktik agar Spanyol melindungi Siau terhadap tekanan Ternate. Berdasarkan perjanjian itu maka Spanyol diizinkan menempatkan pasukan dan mendirikan dua buah benteng Gurita di Ondong dan benteng Sanctarosa di Lolento. 12)

Dalam perkembangan berikutnya, kapal-kapal Belanda di pimpin oleh nahkoda Joris van Spillbergen, muncul di perairan Sangir Talaud pada tahun 1601. Persaingan pengaruh antara Belanda dan Spanyol dimulai di daerah ini. Tujuh tahun kemudian (1608), Spanyol terlibat dalam pertempuran menghadapi angkatan laut Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Paulus van Garden. Pertempuran itu dimenangkan Belanda yang menyebabkan kedudukan Sepanyol di Siau terancam. Mulai saat itu Belanda mengerahkan perhatiannya ke Siau tempat terdapatnya dua pangkalan Sepanyol dalam dua buah benteng di sana.

Dengan alasan yang dicari-cari, pada tahun 1614 berkobarlah pertempuran antara Belanda dengan kerajaan Siau di bawah Raja Don Harcuis Fransiscus Batahi dengan Perdana Menteri D'Arras. Angkatan laut Siau berada di bawah Laksamana Hengkengunaung. Armada Belanda dipimpin/dibantu oleh Tenate. Ini merupakan pertempuran pertama antara kerajaan tradisional dan daerah ini melawan suatu kekuatan asing yang memiliki kemampuan militer modern dibandingkan dengan kerajaan Siau. Siau sendiri dibantu oleh prajurit-prajurit Spanyol di kedua benteng yang dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kapten.

Pertempuran berlangsung pada tanggal 20 Juni 1614. Belanda sebelumnya telah mengadakan blokade laut terhadap dua kota pelabuhan Siau, yakni Ondong dan Ulu tempat kedua benteng Sepanyol itu berlokasi. Belanda berhasil mendaratkan pasukannya dengan mengadakan pendudukan di kedua kota tersebut. Kapal-kapal perang Belanda memuntahkan peluru-peluru

meriam dan di bawah perlindungan tembakan dari kapal di tengah laut, maka mendaratlah pasukan-pasukan Belanda dan Ternate.

Angkatan laut Siau di bawah Laksamana Hengkengunaung tidak sempat beraksi oleh taktik pendadakan pihak musuh. Pertempuran kemudian berlangsung di darat sehari penuh. Raja Batahi akhirnya setelah melihat bahwa pasukan-pasukannya terdesak hebat, sedangkan kedua benteng Spanyol juga sudah lumpuh, segera memerintahkan pasukannya untuk meletakkan senjata. Siau terpaksa takluk kepada Belanda, namun senantiasa berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bangkit kembali. 14)

Hanya dua tahun Belanda berhasil menguasai Siau. Pada tahun 1616 Laksamana L. Reael hendak memindahkan sejumlah rakyat Siau ke pulau Ai di gugusan kepulauan Banda (Maluku Tengah), untuk mengganti penduduk Ai yang dibinasakan Belanda dalam rangka *hong-tochten*. Raja Batahi dan Laksamana Hengkengunaung yang telah berhasil menghimpun kekuatan militer secara diam-diam, menganggap hal ini sebagai suatu kesempatan yang baik untuk mengangkat senjata lagi. Apalagi rakyat yang hendak dipindahkan itu menolak sama sekali.

Dengan tidak terduga sebelumnya, Siau berhasil membalas serangan pendadakan yang pernah dilancarkan oleh Belanda dan Ternate dua tahun sebelumnya. Angkatan Laut Siau yang sudah disiagakan sepenuhnya, berhasil memimpin pertempuran laut melawan armada gabungan dari Belanda dan Ternate. Di daratan Siau, kedudukan Belanda mendapat tekanan hebat sehingga Belanda terpaksa dengan susah payah menyingkir ke kapal-kapal mereka. Dengan taktik pendadakan di darat dan di laut maka Siau berhasil keluar sebagai pemenang dalam pertempuran tahun 1616.¹⁵⁾

Untuk menebus kekalahannya itu maka Belanda menyusun kekuatan dan rencananya di Ternate. Kemudian pada tahun 1625, armada Belanda dibantu Ternate datang lagi menyerang Siau. Tetapi Belanda salah perhitungan sebab mulai saat itu, Siau telah menyusun kekuatan dengan mantap dan siap siaga menghadapi serangan serupa itu. Tambahan lagi kekuatan Spanyol di kedua

benteng telah lebih diperkuat. Armada gabungan Belanda Ternate gagal mendekati pantai-pantai Siau berkat perlawanan bermeriam kedua benteng Spanyol di atas.

Hal ini memberikan peluang yang baik sekali kepada angkatan laut Siau di bawah pimpinan Laksamana Hengkengnung. Perahu-perahu perang *dininta* yang menjadi inti angkatan laut kerajaan Siau maju menyongsong musuh. Mereka berhasil mengikat armada gabungan Belanda-Ternate yang dipaksa harus mengakui kelincahan perahu-perahu perang Siau yang jauh lebih kecil. Kapal perang Belanda dan kora-kora Ternate tidak mampu menandingi kegesitan bininta-bininta Siau di laut sehingga formasi mereka jadi kocar-kacir. Banyak di antaranya mencoba melarikan diri, menjauhi perairan Siau. Antaranya kapal perang *De Trouw* milik Belanda lari tapi dikejar terus dan berhasil ditenggelamkan di depan Kolongan di perairan timur dari pulau Sangir Besar. Dalam perang tahun 1625 ini, Siau berhasil memusnahkan hampir semua kora-kora Ternate dan sebuah kapal perang Belanda tersebut di atas 16). Sesudah pertempuran ini maka amanlah Siau selama lebih setengah abad dari ancaman militer Belanda.

Diakui bahwa para perajurit Spanyol turut berjasa pula di pihak Siau. Hal ini diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, untuk melunakkan Siau yang di bawah perlindungan Spanyol, maka Belanda mengalihkan perhatiannya dengan menghancurkan kapal-kapal Spanyol di perairan Sangir Talaud. Karena Belanda berhasil membina kemampuan angkatan lautnya maka Spanyol tidak mampu berkutik. Hubungan keluar dan hubungan logistik kedua benteng mereka di Siau tidak mampu dipertahankan oleh Spanyol. Karenanya maka para perajurit di benteng itu kekurangan perbekalan makanan sehingga mereka mulai merampas makanan rakyat Siau.

Tindakan para perajurit Spanyol di kedua benteng yang mulai merugikan kepentingan rakyat, perlahan-lahan memperlemah ketahanan Siau sendiri dalam menghadapi Belanda. Menghadapi hal ini maka Raja Batahi mengadakan sidang kerajaan di mana diputuskan untuk merebut kedua benteng itu dari tangan Spanyol. Menurut pendapat mereka, kehadiran

Spanyol di Siau idak lagi sebagai pelindung melainkan telah berubah menjadi perampok makanan dan mengganggu ketertiban masyarakat Siau waktu itu.

Orang-orang Spanyol waktu itu telah diminta agar menghentikan kegiatan perampokan dan pemerkosaan terhadap rakyat, tapi mereka tidak menghiraukan. Untuk menghukum mereka maka tidak ada jalan lain selain dengan kekerasan militer. Laksamana Hengkengunaung ditunjuk untuk memimpin operasi perebutan kedua benteng Spanyol tersebut.

Pasukan Siau dibagi dua dan membentuk formasi pengepungan atas benteng Guritadi Ondong (Siau Barat) dan benteng Sanctarosa di Lolento (Siau Timur). Pertempuran berjalan seru, antara kekuatan militer tradisional (Siau) menghadapi kekuatan militer modern pada waktu itu (Spanyol). Hal ini karena persenjataan Siau hanyalah pedang dan tombak sedang Spanyol bertahan dengan meriam dan senapan.

Pertempuran itu dimulai pagi hari. Pasukan-pasukan Siau unggul dalam jumlah anggota sedang pasukan Spanyol unggul dalam persenjataan. Namun akhirnya pasukan-pasukan Siau semakin mempererat pengepungan atas kedua benteng tersebut. Pertempuran sosoh terjadi dan di situlah peluru meriam dan senapan tidak berfungsi lagi. Menjelang tengah hari, Sepanyol menaikkan bendera putih tanda menyerah.

Komandan bersama pasukan Spanyol kini menjadi tawanan Laksamana Hengkengunaung. Mereka dikumpulkan, dilucuti dan diperintahkan segera meninggalkan Siau. Tapi mereka tidak sanggup melakukannya sebab tidak tersedia kapal untuk menempuh pelayaran laut ke Manila. Karena itu mereka diperkenankan menetap untuk sementara dengan syarat tidak boleh lagi bertindak semena-mena terhadap rakyat Siau, dan harus pulang apabila ada kemungkinan untuk itu. Mulai waktu itu keamanan dan ketenteraman masyarakat Siau berhasil dipulihkan.

Raja Batahi memerintah kerajaan Siau dari tahun 1639-1678. Ia didampingi oleh Perdana Menteri A. D'Arras serta Laksamana Hengkengunaung. Sejak direbutnya kedua benteng Spanyol itu, selama 11 tahun kerajaan ini bebas dari pengaruh kekuasaan asing. Dalam pada itu mereka terus menyusun kemampuan militer

sebagai usaha menghadapi Belanda dan Ternate yang dianggap merupakan ancaman laten bagi Siau.

Dalam usahanya itu, sudah dua kali Belanda menyerang Siau sebagaimana sudah diketengahkan di atas. Dan usaha ketiga dilaksanakannya dalam tahun 1677, di bawah pimpinan Gubernur Robertus Padtbrugge yang berkedudukan di Ternate. Awal Nopember 1677, ia berhasil memaksa Raja F. Makkampo (Tabukan), Raja Don Montin Tatandan (Tahuna), Raja Datu Buysang (Kendahe) dan Raja Tagulandang. Tanpa bermaksud mengesampingkan daerah Talaud, maka di daerah Sangir, hanya kerajaan Siau yang belum menandatangani kontrak politik 3 Nopember 1677 dengan Belanda.

Melihat bahwa Siau tidak mau takluk hanya dengan bujukan dan ancaman maka Belanda menyusun rencana penyerangan atas kerajaan Siau. Padtbrugge minta bantuan kesultanan Ternate, Badan dan kerajaan-kerajaan di Gorontalo untuk menghimpun kekuatan militer melawan Siau. Pasukan-pasukan bantuan itu berkonsolidasi di pelabuhan Manado yang terdiri dari kapal-kapal perang Belanda, kora-kora dan perah-perahu besar lainnya. Jumlah pasukan yang dikerahkan ada sekitar 1180 anggota, termasuk kira-kira 150 tentara Belanda. Pasukan-pasukan itu semuanya dilengkapi senjata api oleh Belanda, termasuk kira-kira 12 orang Siau yang dipimpin putera Jogugu A'Arras.¹⁷⁾

Ibukota kerajaan Siau berkedudukan di Ondong (Siau Barat). Serangan diadakan di Ulu (ibukota lama) di Siau Timur. Dengan didahului oleh orang-orang Siau sebagai penunjuk jalan maka mendaratlah pasukan gabungan itu di Ulu. Kapal-kapal perang dan tentara Belanda belum melibatkan diri dalam pertempuran waktu itu (9 November 1667). Pasukan gabungan berhasil mendarat di bawah perlawanan yang sengit dari pasukan-pasukan Siau. Tetapi akhirnya pasukan gabungan itu berhasil didesak kembali dan dengan menderita korban besar, terpaksa naik kora-kora dan perahu mereka yang menunggu di tengah laut. Raja Batehi turun tangan sendiri memimpin pertempuran itu di samping Laksamana Hengkengunaung.

Melihat situasi pertempuran yang tidak menguntungkan pihaknya maka Padtbrugge menentukan siasat baru. Dimintanya

Raja Tagulandang yang juga adik ipar Raja Batahi untuk membujuknya agar mau duduk berunding dengan Belanda. Raja Tagulandang ini mendarat di Ondang lalu pergi menemui Raja Batahi di medan pertempuran di Ulu. Melihat adik iparnya datang, Raja Raja Batahi tanpa curiga mau menerima kedatangannya. Lalu Raja Tagulandang menyampaikan tawaran berunding dari pihak penyerang. Raja Batahi berpesan bahwa ia mau berunding tetapi tidak mau mengakui penguasa yang berkulit sama (maksudnya Ternate) sebagai Tuannya.

Gencatan senjata yang tidak diumumkan sehari semalam itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Padtbrugge sambil menantikan hasil misi Raja Tagulandang. Padtbrugge diam-diam menurunkan pasukan dari kapal-kapal Belanda lengkap dengan meriam-meriam dan amunisi ke darat. Ketika Raja Tagulandang berpisah dengan Raja Batahi, maka secara tidak diduga, Belanda dibantu pasukan-pasukan lainnya mengadakan serangan pendadakan terhadap pasukan Siau. Pertempuran berkobar lagi dengan sengitnya. Tetapi akhirnya Siau harus mengakui keunggulan taktik dan kekuatan musuh yang ditunjang dengan perlengkapan militer yang lebih baik.

Akibat kekalahannya itu terpaksa Raja Batahi duduk di meja perundingan dengan Belanda dan pada tanggal 9 November 1677 menandatangani Kontrak Politik 16 pasal dengan Padtbrugge. Raja-raja di pulau Sangir Besar sebelumnya (3 November 1677) di bawah tekanan juga telah menandatangani Kontrak Politik 13 pasal dengan Padtbrugge. Kontrak-kontrak politik tersebut merupakan awal penjajahan Belanda di daerah Sangir Talaud.

2. Perlawanan Rakyat Manganitu

Kerajaan Manganitu terletak di pantai barat pulau Sangir Besar. Sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Tahuna dan sebelah selatan dengan Tamako. Sebelah timur berbatasan dengan kerajaan Tabukan dan sebelah barat dengan Laut Sulawesi. Selain sebagian daratan pulau Sangir Besar, kerajaan ini berdaulat atas beberapa buah pulau di dekatnya, yakni pulau Mahumu, Batunderang serta beberapa pulau kecil lainnya.

Kerajaan Manganitu didirikan oleh Tolosang sebagai raja pertama (1600 – 1645). Ia adalah putera Kalano Gugu Naleng dan isterinya Lekungpatola. Raja ini terbunuh akibat persengketaannya dengan Raja Buntuang dari kerajaan Kolongan. Spanyol yang melewati daerah Sangir Talaud dan tiba di Kesultanan Tidore pada tahun 1521, berhasil membangun persahabatan dengan Raja Tompoliu (1645-1670) yang menggantikan Tolosang. Agama Katolik berhasil masuk ke istana di mana putra tertua bernama Bataha dibaptiskan dalam agama ini. Nama tambahan diberikan oleh seorang paderi Katolik sebagai penghormatan terhadap ayahnya yang mengizinkan mereka mendirikan sebuah gereja Katolik-Roma di dekat Kauhise. Dengan demikian maka nama lengkapnya menjadi Bataha Santiago. Ia menduduki takhta pada tahun 1670 – 1675.

Dalam masa pemerintahan Gubernur Padtbrugge (Belanda), setelah beberapa kali gagal merangkul Kerajaan Siau, sekarang mulai mendekati raja-raja di Sangir Besar, Belanda berhasil masuk ke Sangir Besar karena memanfaatkan pengaruh Kesultanan Ternate atas kerajaan-kerajaan di sana. Mulanya Belanda dianggap sebagai sahabat sama seperti raja-raja ini ketika berhubungan dengan Portugis dan Spanyol yang datang berdagang di pelabuhan-pelabuhan mereka. Berhubung permusuhanannya dengan Manganitu, maka Tahuna mengizinkan Belanda berpangkalan di sana.

Karena hanya Manganitu yang membina persahabatan erat dengan Spanyol, maka Belanda mendesak agar Manganitu menandatangani kontrak politik dengan mereka. Dalam periode yang sama, Belanda juga memaksa Raya Mataputung dari kerajaan Tabukan tetapi tidak berhasil di mana raja ini lari ke hutan lebat lalu membunuh diri. Raja Bataha Santiago tidak mau tunduk begitu saja di bawah tekanan Belanda. Apalagi setelah diketahuinya tiga hal yang menjadi pokok isi kontrak dimaksud. Ketiga hal yang tidak mau diterima olehnya yakni :

- a. Semua tanaman cengkih harus ditebangi;
- b. Tidak boleh ada agama lain selain aliran Gereformeerd (Kristen-Protestan), dan
- c. Semua alat kebudayaan kerajaan harus dibakar. 19).

Tuntutan pertama rupanya dimaksudkan untuk mempertahankan monopoli perdagangan Belanda di Maluku (di tempat ini Belanda menganggap daerah Sangir Talaud di bawah pengaruh Ternate di Maluku). Tuntutan kedua adalah untuk menghambat pengaruh Sepanyol yang membawa masuk agama Katolik di sana. Sedangkan tuntutan ketiga kemungkinan besar dimaksudkan agar Belanda dengan mudah memasukkan kebudayaan Barat ke seluruh daerah Sangir Talaud dengan Manganitu sebagai *pilot proyek*.

Untuk menyukseskan maksudnya itu, Belanda mempergunakan pengaruh raja-raja di Sangir Besar agar mereka membujuk Raja Bataha Santiago agar bersedia menerima Belanda. Tetapi usaha ini gagal sehingga Belanda hendak memaksanya dengan kekuatan militer. Padtbrugge memobilisasi pasukan bantuan dari Tahuna, Kundahe, Ternate dan lain-lain, untuk membantu pasukan Belanda yang menjadi inti pasukan mereka. Serangan terhadap Manganitu itu dilakukan tiga kali dalam tahun 1675.

Raja Bataha Santiago setelah mengetahui maksud Padtbrugge untuk menyerang kerajaan, tidaklah tinggal diam. Rakyat yang sangat mencintainya menghimpun kekuatan dengan bersenjata tradisional seperti tombak dan pedang lengkap dengan perisainya. Yang bersedia berperang bukan saja lelaki tetapi juga ada pasukan-pasukan wanita. Untuk memimpin semua pasukan itu, adik raja bernama Diamanti bertindak sebagai panglima. Ia dibantu oleh adik lelakinya bernama Gaghinggilhec serta dua orang adik perempuan bernama Apueng dan Sapela. Keempat pemimpin perang ini masing-masing dinamakan *Babaning* yang artinya Panglima. Pasukan wanita dipimpin oleh kedua bahaning wanita di atas.²⁰⁾

Tentang ikut sertanya wanita, adalah hal yang biasa terjadi dalam sejarah Sangir Talaud. Khusus untuk suku Sangir ada pepatah yang menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat wanita turut serta dalam peperangan. Pepatah yang sering dijadikan semboyan itu bunyinya "*Bawine Makabeling seke*", artinya "wanita membalikkan peperangan". Maksudnya ialah walaupun wanita itu kelihatannya lemah, tetapi memiliki kemam-

puan khusus melebihi lelaki yang mampu mengubah jalannya pertempuran.²¹⁾

Pasukan Bataha Santiago pimpinan Panglima Diamanti membangun markasnya di Paghulu (sekarang desa Karatung Kacamatan Manganitu). Kubu pertahanan dibangun di Batu Bahara, kira-kira 2 km arah ke pedalaman dari Tanjung Nento. Kubu Batu Bahara memiliki arti strategis sebab dari ketinggian ini ke arah utara jelas terlihat Tanjung Bunakeng, arah datangnya kapal-kapal Belanda dan kora-kora pasukan bantuan yang bermarkas di Teluk Tahuna. Juga terlihat Tanjung Tahuna dan Tanjung Totone. Ke arah selatan terlihat Tanjung Totorakele dan Tanjung Liang. Posisi kubu Batu Bahara ini letaknya sedemikian rupa sehingga musuh tidak mungkin mengadakan pendekatan ke pantai Teluk Manganitu tanpa diketahui lebih dahulu. Apabila pengintai telah melihat kedatangan kapal/perahu musuh maka ia segera melakukan *memanrage* yaitu pekikan yang senantiasa terdengar bila terjadi pertempuran masa itu di daerah Sangir.²²⁾

Serangan pertama dan kedua dengan mudah dapat dipatahkan oleh Manganitu. Belanda segera mengatur serangan ketiga dengan kekuatan yang lebih besar dan persenjataan yang lebih banyak. Dalam serangan ketiga ini, pasukan Manganitu berusaha mempertahankan Panghulu. Karena tekanan dan taktik pengepungan semakin ketat dijalankan Belanda, maka Panghulu dilepaskan. Lalu Manganitu memusatkan perlawanan terakhir di Batu Bahara, kubu pertahanan mereka. Namun karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang ditambah perlengkapan senjata tidak sebanding maka kubu Batu Bahara jatuh ke tangan musuh.

Setelah kubu pertahanan Batu Bahara jatuh, maka Belanda mengubah taktiknya. Mereka menawarkan perundingan kepada Raja Bataha Santiago. Mungkin karena melihat bahwa perlawanan tidak menguntungkan pihaknya bila hendak terus dilanjutkan, maka Raja Bataha Santiago menerima tawaran berunding dengan Padtbrugge di Manganitu. Namun perundingan hanyalah siasat bagi Padtbrugge untuk dapat dengan mudah tanpa pengorbanan menangkap raja itu hidup-hidup. Setelah Raja Bataha Santiago ditangkap, ia segera dibawa ke Tahuna.

Mulanya ia diperlakukan dengan sopan agar tidak mengurangi kewibawannya sebagai raja sehingga dapat dibujuk menandatangani kontrak politik yang disodorkan oleh Padtbrugge. Raja Bataha Santiago ini, walaupun menyadari posisinya yang lemah sebagai tawanan, tetapi ia tetap memegang teguh pendiriannya. Bujukan dan ancaman dilancarkan berganti-ganti oleh Padtbrugge. Juga beberapa raja bawahan diperalatnya agar Raja Bataha Santiago ini mengubah pendiriannya dan mau menjadi bawahan Belanda melalui kontrak politik, tetapi semua usaha itu sia-sia saja. Raja Bataha Santiago berkata kepada Gubernur Padtbrugge, "Saya lebih baik rela mati untuk suatu keyakinan. Karena keyakinan saya ialah lebih baik mati menentang penjajah, atau hidup merdeka sebagai manusia yang berhak untuk melanjutkan keyakinannya."²³⁾

Karena Padtbrugge merasa gagal mencapai maksudnya maka ia menjatuhkan hukuman mati dalam tiang gantungan bagi Raja Bataha Santiago. Pelaksanaan hukuman mati itu terjadi malam hari di atas bukit di Tonggeng (tanjung) Tahuna. Mengetahui bahwa rajanya telah dihukum mati maka tanpa mempedulikan keselamatan mereka, Diamanti dan Gaghinggihe pergi mencari mayat kakaknya itu dan secara diam-diam dibawa pulang ke Manganitu. Mayat raja ini dimakamkan di Tanjung Nento, sebelah barat daya desa Panghulu (Karatung sekarang). Tahun 1976 (301 tahun kemudian) makam ini dipugar oleh pemerintah daerah setempat.²⁴⁾ Adiknya yaitu Don Charles Diamanti menggantikannya sebagai raja (1675 – 1694).

3. Perlawanan Rakyat Arangkaa

Talaud merupakan suatu gugusan kepulauan yang terletak paling utara, berbatasan dengan Filipina. Pulau-pulau di sana terdiri dari gugusan pulau-pulau Nanusa, Karakelang, Salibabu dan Kabaruan. Talaud disebut juga *Porodisa* yang berasal dari kata *pro* atau *porosa* (pancung) dan *diassa*, yang melukiskan jiwa orang Talaud yang kuat dan bertekad untuk berjuang. Talaud berasal dari kata *tau* (orang) dan *lauda* (laut), artinya orang laut atau orang yang hidup di tepi laut. Pendapat lain mengatakan Talaud bernama *Porodesa*.²⁵⁾

Orang Talaud memakai bahasa Talaud yang terdiri atas enam dialek lokal. Menurut J.P. Talens dan N. Andriani, enam dialek itu ialah dialek Salibabu, Kabaruan, Esang, Nanusa dan Miangas. Yang lain menyebutkan enam dialek pula, yakni dialek Nanusa, Miangas, Beo, Esang, Niampak, Moronge-Lirung dan Kabaruan. 26)

Sebelum datangnya bangsa Barat, kepulauan Talaud secara politis berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan di kepulauan Sangir. Namun di sana terdapat pula beberapa kerajaan antaranya kerajaaan Lirung, Beo, Arangkaa, Moronge, Esang dan lain-lain. Walaupun pemerintahan kolonial Belanda dapat dikatakan sudah mantap, namun belumlah dapat menjamah wilayah kepulauan Talaud sampai menjelang akhir abad ke-19. Barulah pada sekitar tahun 1889, Residen Manado bernama Stakman, mengangkat J.E. Leidemeijer dalam jabatan *Posthouder* pemerintahan kolonial untuk kepulauan itu. 27)

Pada tanggal 15 September 1889, Residen Manado berkunjung ke Lirung (kepulauan Salibabu) dengan maksud hendak didasarkan pada pertimbangan bahwa pada kenyataannya, kerajaan-kerajaan di Talaud takluk di bawah kerajaan-kerajaan di kepulauan Sangir, sehingga tidak layak mereka memakai gelar raja, melainkan gelar Jogugu (setingkat kepala distrik). Apabila perubahan ini lancar, maka akan hanya terdapat kira-kira 17 kejuguguan (wilayah di bawah seorang Jogugu = kepala distrik) di antaranya ialah Kejuguguan Beo, Lirung dan Beo dan kesemuanya diperintah oleh Presiden Jogugu. Presiden Jogugu Lirung ialah S.P. Tucunan dan Presiden Jogugu Beo ialah A. Tumbal. Presiden Jogugu Beo membawahi para jogugu di kepulauan Nanusa dan pulau Karakelang sedang Presiden Jogugu Lirung membawahi para jogugu di pulau Salibabu, Kabaruan dan pulau sekitarnya.

Kerajaan Arangkaa terletak di timur laut pulau Karakelang yang wilayahnya meliputi Arangkaa, Taruan, Gemeh dan Taturan. Kerajaan ini di bawah Raja manee ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan perubahan tersebut di atas. Ketika mengetahui adanya perubahan pada tempat ia diturunkan menjadi Jogugu saja, marahlah Raja Manee ini. Ia menuntut agar

dirinya tetap diakui sebagai raja dan jabatan jogugu itu lebih tepat untuk puteranya yang sulung bernama Andrias Binilang alias Rumenta. Tuntutan ini tidak dapat dikabulkan oleh *Posthouder* J.E. Leidemeijer yang berkedudukan di Melangnane, bahkan tetap menyapa Raja Manee dengan gelar Jogugu.

Penurunan jabatan dan sikap Leidemeijer di atas sangat tidak disenangi Raja Manee. Ia segera menghimpun pasukan dan pergi menyerang Melongnane, tempat Leidemeijer berkedudukan. Peperangan tersebut langsung dipimpin oleh Raja Manee. Melihat bahwa ia tidak mampu menangkis serangan tersebut maka Leidemeijer bersama keluarganya naik perahu hendak mengungsi ke Tahuna dan melaporkan hal tersebut kepada *Controleur* Hoeke yang berkedudukan disana dan untuk selanjutnya akan ke Manado. Tetapi maksud Leidemeijer itu dicegah oleh Presiden Jogugu Lirung S.P. Tucunan. Kepada Leidemeijer ia berkata bahwa ia mengaku dan berjanji akan sekuat tenaga menjamin keselamatan diri dan keluarganya pejabat Belanda itu di mana katanya, musuh Belanda adalah musuhnya juga.

Dengan tidak mengenal takut, Raja Manee terus mengejar Leidemeijer ke Lirung. Arangkaa dan Melongnane di pulau Karakelang sedang Lirung di pulau Salibabu. Dengan berperahu, tibalah Raja Manee dan pasukannya di Lurung. Presiden Jogugu S.P. Tucunan menyambut kedatangan Raja Manee itu dengan ramah, padahal raja ini dalam keadaan siaga berperang. Karena sinar persahabatan terpancar dari wajah dan perlakuan Tucunan, maka Manee sudi diundang sebagai tamu di rumahnya. Dengan keahlian Tucunan berdiplomasi maka padamlah nafsu berperang dari Raja Manee ini, malahan permusuhan lama antara kedua pemimpin ini berhasil didamaikan secara adat di sana.

Tapi rupanya suasana perdamaian tidaklah dapat bertahan lama disebabkan wafatnya Raja Manee pada tahun 1891. Ia diganti oleh saudaranya bernama Larenggam sebagai Raja Arangkaa (1891-1893), yang menghidupkan kembali permusuhan lama dengan Lirung dan menolak sama sekali penghapusan status kerajaan bagi Arangkaa. Bahkan menurut rencana Belanda, setelah hapusnya status kerajaan bagi Arangkaa maka daerah itu

tidak boleh berdiri di bawah seorang Jogugu A. Tumbal. Jogugu A. Tumbal ini tidak mau menyokong status kejoguguan sendiri bagi Arangkaa setelah dilepaskan dari status kerajaan sebab ia berharap agar wilayah kejoguguannya akan jauh lebih besar dengan dimasukkannya Arangkaa di bawah pemerintahnya. 28).

Mengenai permusuhan Arangkaa dan Lirung, hal itu dimulai ketika dua pemimpin Arangkaa pada abad ke-18 bernama Aluseda dan Bawangkil serta 28 pejabat mereka, dibunuh di Tule oleh orang-orang Lirung. Pembalasan karena Arangkaa membunuh pemimpin Tule (Lirung) bernama Asiadi. Walaupun antara kedua kerajaan itu telah diadakan perdamaian namun Arangkaa belum juga merasa puas. Hal ini dimanfaatkan oleh Raja Larenggam yang juga menganggap bahwa Lirung melindungi Leidemeijer sebagai musuh besar Arangkaa.

Raja Larenggam menghimpun kekuatan pasukan segera setelah menduduki takhta kerajaan Arangkaa. Setelah persiapan mantap, dimulailah penyerangan terhadap Lirung di mana pejabat kolonial Belanda itu berlindung. Pasukan-pasukannya sering kali siang atau malam hari dikirim untuk mengintai dan menyerang Lirung, baik melalui darat maupun melalui laut. Selama dua tahun, perairan Lirung amatlah tidak aman bagi musuh-musuh Arangkaa terutama Belanda. Presiden Jogugu S.P. Tucunan dan *Posthouder* J.E. Leidemeijer tidak sanggup menahan serangan-serangan pendudukan pihak Arangkaa. Karena itu mereka mengirim kabar ke Tahuna dan Manado untuk meminta bantuan militer.

Residen Manado E.J. Jellesma bersama *Controleur* Hoeke dengan kapal perang "*Zeeduif*" tiba di Lirung pada tanggal 20 Juli 1893. Tanggal 22 Juli semua Presiden Jogugu dan Jogugu serta pasukan masing-masing tiba dan berkumpul di rumah *Posthouder* Leidemeijer di Lirung. diadakanlah pertemuan antara para pejabat kolonial itu dengan para pemimpin pribumi yang setia kepada mereka. Pertemuan itu menghasilkan strategi yakni yang pertama hendaklah diusahakan penyelesaian secara damai dan kedua, apabila usaha pertama gagal, maka barulah ditempuh penyelesaian secara militer. Untuk maksud ini maka setiap *Kapten Laut* (Kepala Desa) mengerahkan satu pasukan

lengkap dengan anak buahnya. Hanya dua jogugu yakni Jogugu Apande (dari Amat) dan Jogugu Porodesa (dari Belanda) yang tidak diwajibkan menyerahkan anak buah. Hal ini karena keduanya masih terikat keluarga dengan Raja Larenggam (dari Arangkaa) Alasan ini diterima oleh Jellesma tapi kedua jogugu itu harus bersamanya di atas kapal perang. 29).

Arangkaa terletak di timur lautnya. (pulau Karangkelang dan berada di utara pulau Salibabu di mana Lirung berlokasi. Untuk mencapai Arangkaa harus menyusuri pantai timur pulau Karangkelang sebab jaraknya lebih dekat. Semua perahu perang dan kapal perang termasuk kapal bendera "*Zeedhuif*" melalui jalur itu. Hanya perahu-perahu perang dari Beo dan Esang pimpinan Presiden Jogugu S.S. Tamawwy dan Jogugu A. Tumbala diperkenankan lewat pantai barat sebab kedua negeri itu jaraknya memang lebih dekat apabila melalui barat menuju Arangkaa.

Armada perahu dan kapal perang melalui timur masuk dan mendekati pantai Arangkaa dari arah tenggara dan armada Beo serta Esang dari arah barat laut. Semuanya tiba bersamaan yakni hari Minggu jam 06.00 pagi tanggal 23 Juli 1893. Dari arah laut tidak terlihat benteng pertahanan yang dibangun Raja Larenggam di daratan. Hanya jelas terlihat ribuan pasukan lengkap dengan senjatanya, siap menanti pendaratan musuh mereka. Masih di Lirung, Leidemeijer telah membagi-bagikan senjata api dan amunisi kepada pasukan penduduk asli jumlahnya 125 pucuk serta lima peluru setiap pucuk senjata api. Persenjataan ini tidak termasuk yang di tangan tentara kolonial di atas kapal dan meriam-meriam kapal perang itu.

Residen Jellesma memerintahkan S.P. Tucunan agar menghubungi Raja Larenggam di darat supaya ia mau berdamai saja. Tacunan lalu memerintahkan kedua kepala kampung (kapten laut) yang masih terikat hubungan dengan Raja Larenggam. Kedua mereka adalah Kapten laut Bulude bernama Rensa dan Kapten laut Lobbo bernama Pusunge. Kedua utusan itu gagal membujuk Raja Larenggam agar mau menghadap Jellesma di atas kapal perang.

Setelah yakin jalan damai tidak mungkin, maka Jellesma mengumpulkan semua pimpinan penduduk asli itu lalu menunjuk Presiden Jogugu S.P. Tucunan selaku panglima dalam pertempuran melawan kerajaan Arangkaa saat itu. Para jogugu diangkat sebagai komandan pasukan asal daerahnya masing-masing, di bawah perintah Panglima Tucunan.

Perintah terakhir dari Jellesma ialah agar seluruh rakyat Arangkaa dibunuh dan semua kebun/tanaman dirusakkan/dikarsari, dan berusaha agar jangan sampai jatuh korban di pihak penyerang. Karena tidak memakai pakaian seragam maka sebagai tanda pengenal, semuanya harus memakai ikat kepala daun kelapa. Serangan dimulai setelah terdengar seruling kapal perang. Mendahului sekalian hal di atas, kapal perang "*Zeeduif*" akan menembakkan meriamnya ke darat untuk menakut-nakuti musuh.

Tucunan dengan kuasa dari Jellesma, memerintahkan agar ratusan perahu itu dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok Utara terdiri atas perahu-perahu perang dari Beo, Lobbo, Esang, Nanusa dan lain-lain, untuk menangkis bala bantuan dari Gemah. Kelompok Selatan terdiri atas perahu-perahu perang dari Moronge, Salibabu dan Kabaruan untuk menangkis bala bantuan dari Taruna. Kelompok Tengah khusus untuk perahu-perahu perang dari Lirung. Tucunan berkedudukan di kelompok Tengah yang ditugaskan untuk mendarat. Kedua kelompok lain tidak usah turut berperang di darat, tetapi siap siaga di laut.

Kapal perang *Zeeduif* kemudian memuntahkan peluru-peluru meriamnya ke darat, mengenai tanjung dan bukit Alanghitu. Perahu-perahu Raja Larenggam tidak gentar sedikit pun juga melihat hancurnya pepohonan di tanjung dan bukit terkena peluru-peluru meriam. Lalu Jellesma memerintahkan membunyikan seruling kapal tanda serangan pasukan dimulai. Pasukan Arangkaa yang belum pernah mendengar seruling kapal, mengira bahwa langit mau runtuh, sehingga ribuan pasukan itu lari dan mengundurkan diri ke hutan-hutan di sekitarnya.

Melihat pasukan Arangkaa sudah mengundurkan diri, maka Tucunan memerintahkan kelompok tengah maju dan bersiap untuk mendarat. Melihat musuh sudah di tepi pantai, majulah

dua pahlawan Arangkaa, masing-masing dengan pedang dan tameng. Pasukan Lirung yang langsung dipimpin Tucunan melepaskan tembakan tapi tidak tepat di sasaran sehingga dua pahlawan Arangkaa itu makin mengancam garis depan pasukan musuh. Lalu S.P. Tucunan memerintahkan Kapten Laut Ali dari Moronge bersama P. Sumendap alias Mangambe serta Alexander Tucunan untuk menembak kedua pahlawan Arangkaa itu. Kedua pahlawan tersebut terluka pada betisnya lalu rebah ke tanah. Seorang pahlawan Arangkaa lainnya maju untuk menyelamatkan kedua rekannya itu tapi terhalau oleh derasnya tembakan pihak musuh. Lalu majulah Panglima Arangkaa yaitu Raja Larenggam sendiri yang terpaksa harus mengundurkan diri sebab musuh ternyata jauh lebih modern persenjataannya.

Pasukan pimpinan Jogugu Wuso diperintahkan Tucunan untuk menyerbu ke kedudukan musuh di pedalaman. Pasukannya ialah tidak seimbang dalam jumlah pasukan dan persenjataan yang lebih modern di pihak musuh. Pasukan musuh terus mengejar pasukan Arangkaa di kebun-kebun dan di bukit-bukit di belakang negeri Arangkaa. Sebagai pasukan yang langsung dipimpin Tucunan pergi menyerbu istana Raja Larenggam. Istana itu hanya dipertahankan oleh Raja bersama seorang pahlawannya bernama Ramedan. Tucunan memperingatkan Raja Larenggam bahwa lebih baik menyerah dan ikut ke atas kapal perang menghadap Residen Jellesma.

Istana itu terbuat dari kayu hitam dan berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiangnya yang tinggi. Raja Larenggam bertahan di atas sedang Tucunan dan pasukannya berada di bawah di kolong istana. Raja Larenggam berseru bahwa ia lebih baik menjadi abu sekalipun dari pada menyerah begitu saja kepada musuh. Lalu raja mengumandangkan semboyan pengicangan, katanya: "*Leta'a masena, langi' marandumma*," artinya "Tanah terang, langit gelap," maksudnya ia pantang menyerah walaupun mati berkalang tanah.³⁰⁾

Tucunan lalu mencari posisi yang baik dan menembak Raja Larenggam sehingga tewas. Pasukan Lirung merampas semua harta benda dan ternak, membinasakan semua tanaman, menjarah istana dan rumah-rumah rakyat. Kemudian istana dan

rumah-rumah seluruhnya dibakar oleh musuh. Saudara perempuan Raja Larenggam dibiarkan mengambil mayat raja lalu menguburkan badannya, tapi kepalanya tetap di atas tanah (tidak terkubur). Cara penguburan ini dalam bahasa Talaud disebut **birua** yaitu cara menguburkan orang yang tewas di medan perang sebagai tanda kelanjutan permusuhan yang kematiannya harus dibalas 31).

Pasukan musuh meninggalkan ratusan korban di pihak Arangkaa. Mereka sendiri hanya menderita seorang tewas yaitu anggota pasukan dari Moronge bernama Pu'untada'a. Pasukan musuh membawa banyak tawanan ke Lirung. Semua tawanan dihukum 5 tahun dalam pembuangan. Jellesma memberikan santunan f100,— untuk keluarga korban yang tewas dalam peperangan. Tanggal 26 Juli 1893, kembalilah Residen Jellesma ke Manado 32).

4. Perlawanan Rakyat Makalehi

Makalehi adalah salah sebuah pulau di gugusan Siau dan sekitarnya. Letaknya di sebelah barat pulau Siau, tepat di depan pantai Ondong. Pulau Makalehi merupakan sebuah dataran berpantai terjal yang dikelilingi oleh bukit-bukit rendah. Jalan masuk satu-satunya melalui pantai barat di mana perkampungan terletak. Di tengah pulau kecil ini ada sebuah danau air tawar.

Benih-benih nasionalisme di pulau Siau dan sekitarnya mulai disemaikan oleh PNI yang mendirikan cabang ke-6 pada tahun 1928 di sana, dipelopori oleh G.E. Dauhan alias Tona alias Takasengehang. Cabang ke-6 dari PNI ini berpusat di Ulu di pantai timur. Dauhan memberikan mandat pembentukan ranting-ranting PNI di Ondong (partai barat) kepada seorang guru bernama A.N. Bawengan. Dengan terbentuknya PNI di Siau maka partai ini mulai membangkitkan semangat nasionalisme melalui rapat-rapat partai. Para pembicara antaranya G.E. Dauhan sendiri, A.N. Bawengan, J.B. Dauhan (adik G.E. Dauhan) dan para pemimpin lainnya. Pertemuan-pertemuan seperti itu diadakan dari desa ke desa di seluruh pulau Siau yang dihadiri oleh rakyat di mana-mana. Perkumpulan-perkumpulan oleh raga dan koperasi berdiri yang merupakan bagian dari

aktivitas PNI di Siau. Ketika PNI dilarang di seluruh Indonesia, Belanda menangkapi kedua pemimpinnya di Siau yakni G.E. Dauhan dan A.N. Bawengan.

Walaupun resminya PNI membubarkan diri namun semangatnya dilanjutkan oleh mereka yang telah terbangun jiwa nasionalismenya. Sebagai usaha melanjutkan cita-cita PNI itu berdirilah sejumlah organisasi yang dipimpin oleh bekas pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota PNI. A.T. Gandaria mendirikan PERKASAT (Persatuan Rakyat Sangir Talaud) tahun 1931. J.B. Dauhan mensponsori berdirinya KGI (Komite Gerakan Indonesia) Maret 1933. Masih ada beberapa organisasi lain yang semuanya didirikan dengan maksud untuk tetap membina semangat nasionalisme waktu itu 33).

Sejak masih berkuasanya Belanda, Jogugu Ondong bernama Efraim Marthing adalah simpatisan PNI. Bahkan ia pernah mendirikan pertemuan-pertemuan PNI kemudian PERKASAT dimana J.B. Dauhan mengundang Jogugu ini untuk turut hadir. Semangat nasionalisme ini tetap bersemi hingga masa pendudukan Jepang. E. Marthing yang melihat penderitaan rakyat di bawah telapak kaki Jepang, tetap berusaha membina semangat nasionalisme ini di kalangan rakyat. Usahanya ini mendapat simpati rakyat di Makalehi. Olehnya sejak akhir 1944, rakyat di Makalehi telah berani mengibarkan bendera Merah Putih. Hal ini dimungkinkan karena persatuan teguh di kalangan rakyat sehingga kegiatan mereka tidak segera tercium oleh Kempeitai Jepang 34).

Awal 1945, ada sebuah kapal Sekutu yang berpatroli di perairan Sulawesi. Secara tidak diduga, kapal ini singgah di Makalehi dan beberapa awaknya turun ke darat. Ternyata ada awak asal Sangir di kapal itu. Mereka merupakan bagian dari "Pasukan gerilya Morotai" yang hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang asal Sangir yang lari memihak Sekutu dalam masa pendudukan Jepang di Sangir Talaud. Mereka menjanjikan senjata kalau rakyat Makalehi mau memberontak terhadap Jepang.

Semangat nasionalisme dan janji akan memperoleh senjata dari Sekutu, membuat rakyat Makalehi semakin berani lagi melangkah kakinya. Mereka mengadakan rapat pada ublan

Maret 1945 yang memutuskan tidak mau lagi mengakui pemerintahan pendudukan Jepang di sana. Kegiatan mereka dan kedatangan kapal Sekutu ini sama sekali tidak diketahui sebab Jepang tidak menempatkan polisi atau tentara di pulau kecil dan terpencil ini. Jepang hanya mengandalkan informasi dari mata-mata yang banyak di Siau. Karena rakyat sudah mengenal siapa-siapa yang jadi kaki tangan Jepang, maka sifat rahasia dan kegiatan mereka dapat terjalin. Setiap perkembangan ini dilaporkan kepada E. Marthing yang mengajukan dibentuknya pasukan-pasukan yang nantinya siap menerima dan mempergunakan senjata-senjata Sekutu bila telah diberikan.

Tapi akhirnya di bulan Mei 1945, Jepang dapat mengetahui kegiatan Jogugu Ondong Efraim Marthing ini. E. Marthing ditangkap malam hari tanggal 26 Mei 1945 dan dibawa ke Tahuna lalu menjalani hukuman mati di sana. Besoknya berita penangkapan ini telah diketahui oleh rakyat di Makalehi. Selama dua hari mereka membicarakan hal ini akhirnya diputuskan menyerbu ke Ondong untuk membebaskan E. Marthing dari tangan Jepang. Mereka belum mengetahui bahwa Marthing telah dibawa ke Tahuna. Dini hari tanggal 29 Mei 1945, enam buah perahu besar (*pamo*) penuh dengan pemuda-pemuda bersenjata berangkat ke Ondong. Masih pagi-pagi benar mereka sudah tiba dan mulai menggegarkan kota itu. Dengan sorak sorai tanda siap bertempur mereka mencari di mana E. Marthing berada. Ketika yakin ia sudah tidak berada di Ondong maka kemarahan mereka dilampiaskan kepada orang-orang yang dianggapnya sebagai mata-mata dan biang keladi yang membocorkan rahasia itu kepada Jepang. Tidak jelas berapa orang yang mereka tangkap, tapi di antaranya adalah pendeta G. Elias yang mereka bawa pulang ke Makalehi 35).

Sejak perginya kapal Sekutu tersebut, seringkali pulau kecil ini dilewati oleh pesawat-pesawat Sekutu yang rupanya bermaksud melindungi rakyat di situ dari kemungkinan tekanan pihak Jepang. Bertepatan dengan penyerbuan Makalehi ke Ondong pada 29 Mei 1945, ada sebuah pesawat terbang Sekutu yang terbang di atas Makalehi dan Ondong. Entah hal ini hanya

kebetulan atau memang ada hubungannya dengan penyerbuan itu tetapi kehadiran pesawat itu telah mencegah pertumpahan darah di Ondong. Hal ini karena kepala Dinas Kepolisian Jepang bernama Jan Alo telah mengerahkan rakyat dari pantai timur, menggabung dengan rakyat sekitar Ondong untuk menahan serbuan Makalehi itu. Pasukan itu dibagi atas tiga kelompok besar. Jan Alo mau bertindak meleraikan pertempuran itu tapi ia sendiri terluka wajahnya oleh pedang dari anggota pasukan Makalehi. Anggota pasukan Makalehi itu ditembaknya dengan pistol sehingga rebah ke tanah. Sebenarnya segera akan terjadi pertempuran tapi pesawat Sekutu itu menyambar-nyambar menimbulkan kepanikan di kalangan pasukan Siau. Pasukan Makalehi segera juga menarik diri dan berperahu pulang ke Makalehi 36).

Sesudah peristiwa itu ada sebuah pesawat Sekutu tipe Catalina yang karena kerusakan mesin mendarat di laut dekat Makalehi. Awak-awak pesawat Sekutu itu disambut oleh rakyat Makalehi dan ternyata ada seorang yang dahulunya lari dari Sangir Talaud yang berada di pesawat itu. Orang tersebut bernama Alex Pontoh yang ketika Jepang menyerah diangkat sebagai komandan tentara NICA berpangkat letnan dan ditugaskan di Sangir Talaud.³⁷⁾

Sebuah kapal perang Sekutu datang menjemput para awak pesawat Catalina di atas beberapa hari kemudian. Para awak kapal tersebut meninggalkan dua pucuk pistol pemberi isyarat di Makalehi dan kira-kira empat pasang pakaian mereka berwarna oranye di sana. Kapal perang Sekutu itu pergi dengan membawa pendeta G. Elias yang tertawan oleh pasukan Makalehi di Ondong. Kemudian kapal itu merapat di kota Ulu di Siau Timur dan menurunkan sebuah sekoci. Dua awak antaranya Alex Pontoh turun ke pelabuhan Ulu. Pelabuhan itu sudah ditinggalkan oleh Kempeitai yang hanya tiga orang saja di seluruh Siau. Dengan leluasa kedua awak tersebut berpatroli di Ulu dan kemudian ke kapal perang. Ketika mau menaiki sekoci, maka ditembaki dengan senapan ringan, sehingga kapal perang Sekutu itu kemudian menghajar kota Ulu dengan tembakan-tembakan meriam, dan sesudah itu menghilang 38).

Rentetan kejadian di atas semakin memperbesar semangat perlawanan rakyat Makalehi terhadap Jepang. Mereka membentuk sebuah pasukan sebab yakin bahwa Jepang pasti akan datang menyerang. Selain itu pasukan tersebut akan di persenjatai sesuai janji para awak pesawat Sekutu sebelum meninggalkan Makalehi. Sebagai komandan di sana diangkatlah seorang bernama Salmon Rabaeng. Untuk lebih memperteguh keyakinan mereka maka besarlah peranan dari seorang tua yang paham ilmu mistik yang diberi gelar Opo Mbengi. Menurut keterangan, pemuda-pemuda Makalehi yang siap berperang itu dibekalinya dengan ilmu yang menyebabkan badan mereka kebal terhadap peluru atau benda tajam lainnya. Semangat nasionalisme dipadukan dengan kepercayaan mistik menyebabkan pasukan Makalehi semakin yakin akan perjuangannya itu 39).

Sambil menantikan datangnya bantuan senjata yang dijanjikan tentara Sekutu, mereka membangun pertahanan di pintu masuk sebelah barat pulau itu. Pertahanan tersebut berupa susunan batang kelapa dan di atasnya disiapkan batu-batu besar yang dapat digulingkan ke bawah untuk menewaskan musuh. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan datangnya serbuan tentara Jepang. Di bukit terjal sebelah timur, ditempatkan sebuah pos pengintai yang tugasnya untuk melaporkan kegiatan yang terlihat di kota/pelabuhan Ondong. Mereka mengibarkan bendera Belanda di sebelah barat di pintu masuk yang hanya sebagai taktik untuk menjemput datangnya Sekutu. Tapi di pedalaman di tepi danau, mereka mengibarkan bendera merah putih. Anehnya apabila mereka mengadakan upacara bendera, maka upacara itu diadakan terpisah di bawah naungan kedua bendera tersebut di atas. ⁴⁰⁾

Pada tanggal 12 Juni 1945, sepasukan tentara Jepang ditarik dari Tahuna ke Manado. Kebetulan pasukan ini singgah di Ulu dan Kempeitai segera meminta mereka untuk menindas perlawanan rakyat di pulau Makalehi. Pasukan Jepang tersebut jumlahnya sekitar 40 anggota. ⁴¹⁾ Tetapi ada yang mengatakan jauh kurang dari itu. ⁴²⁾ Mereka diangkat dengan enam perahu besar dari Ulu dan tiba dinihari tanggal 15 Juni di Makalehi.

Pasukan Makalehi disiagakan dengan bunyi genderang dan tembakan pistol isyarat ke udara. Saat penyerbuan Jepang yang mereka nantikan telah tiba. Pasukan Makalehi pimpinan Salmon Labaeng bersorak sorai sambil meneriakkan "Merdeka Siau". Perahu Jepang itu membuka serangan di pintu masuk sebelah barat. Tetapi mereka tertahan oleh benteng pertahanan dari batang kelapa dan tak bisa mendekat oleh derasnya batu-batu besar yang diluncurkan dari atas. Sebagian pasukan musuh terpaksa harus memanjat tebing terjal dari sebelah timur sehingga Salmon Labaeng dan Pasukannya terpaksa melepaskan benteng pertahanan mereka di barat.

Dengan taktik itu maka pertahanan pasukan Makalehi bobol. Dua jam lamanya pertempuran itu berlangsung, diakhiri dengan tewasnya komandan Salmon Labaeng oleh pasukan Jepang. Setelah pemimpinnya tewas maka pasukan yang kalah itu dikumpulkan di dalam gedung gereja Makalehi. Di situ mereka dibujuk agar tidak lagi bangkit melawan Jepang. Kepada yang mau menjadi tentara, mereka akan dilatih oleh pasukan yang telah datang untuk menyerbu Makalehi. Dengan taktik bujukan ini maka terpilihah puluhan pemuda Makalehi yang sebelumnya merupakan pemimpin-pemimpin pasukan perlawanan. Pada keesokan harinya, 16 Juni 1945, 32 pemuda Makalehi dipenggal kepalanya oleh Jepang di luar Ondong 43).

D. AKIBAT PERLAWANAN

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, di daerah Sangir Taläud muncul begitu banyak perlawanan, empat di antaranya diinventarisasi dalam tulisan ini. Bila ditinjau lebih jauh, keempat perlawanan itu dapat digolongkan pada dua bagian besar yakni:

1. Perlawanan yang dilakukan untuk mencegah masuknya penjajah, yaitu perlawanan rakyat Siau dan Manganitu, serta
2. Perlawanan terhadap pemerintahan kolonialis dan imperialis yang sudah bercokol yakni perlawanan rakyat Arangkaa dan Makalehi.

Walaupun dijalankan dengan motif yang berlain-lain, tetapi satu hal menunjukkan kepada kita bahwa perlawanan yang disebut pertama gagal diakibatkan oleh sifat lokalnya. Dalam hal

ini perlawanan belumlah dilakukan oleh seluruh rakyat Sangir Talaud, apalagi rakyat Sulawesi Utara. **Kenyataan sejarah membuktikan bahwa hanyalah dengan memadukan seluruh potensi perlawanan nasional, barulah kaum kolonialis dan imperialis dapat dihancurkan dan diusir dari bumi Nusantara.** Juga perlawanan perlu dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika kaum kolonialis dan imperialis sedang lengah atau sedang lemah. Hal ini dibuktikan ketika negara kita memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang merupakan saat yang paling tepat ketika Jepang sudah menyerah, sedangkan Belanda belum memunculkan diri.

Dengan dikalahkannya rakyat Siau dan Manganitu dalam usaha mereka menentang masuknya Belanda maka kedua kerajaan itu diikat oleh Belanda dengan kontrak politik yang merugikan kemerdekaan dan kedaulatan kedua kerajaan tersebut. Raja Batahi yang menderita kekalahan tetap diakui duduk di atas takhta kerajaan, tidak diganti dengan raja yang baru yang lebih disenangi oleh Belanda. Raja Bataha Santiago gugur di dalam tiang gantungan di tanjung Tahuna akibat tidak mau menandatangani kontrak politik. Sebagai gantinya Belanda terpaksa mengakui Raja Don Charles Diamanti menduduki takhta Manganitu, walaupun ia dalam setiap kesempatan memperlihatkan ketidak-senangannya kepada Belanda yang dianggapnya telah merampas kemerdekaan dan kedaulatan Manganitu.

Dengan ditindasnya perlawanan Siau dan Manganitu maka Belanda dapat dengan leluasa melaksanakan politik dagang monopoli rempah-rempah di Sangir Talaud. Tanaman cengkih yang ada di sana diperintahkannya untuk ditebang agar tidak terjadi perdagangan gelap dengan Portugis dan Sepanyol yang masih merupakan ancaman bagi sistem monopolinya di Nusantara. Juga sekaligus hal ini untuk mengendalikan persediaan rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa waktu itu.

Agama Katolik yang sebelumnya telah dianut oleh rakyat Sangir Talaud, dengan masuknya Belanda maka kegiatan agama ini dilarang. Sebagai gantinya Belanda menyebarkan agama Kristen (Protestan) sebagai salah satu misi kehadirannya di

Indonesia. Agama Kristen kemudian berkembang pesat dan dianut dengan penuh keyakinan oleh para penguasa penduduk aseli dan seluruh rakyat Sangir Talaud. Sampai sekarang agama Kristen merupakan mayoritas di sana. Sejalan dengan masuknya para pendeta Kristen, maka mulai didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal berupa sekolah-sekolah yang diasuh oleh Zending (Kristen). Sampai sekarang peranan sekolah-sekolah ini amat besar dalam mendidik masyarakat Sangir Talaud.

Mengenai dua perlawanan lainnya yang dibentangkan di sini, walaupun digolongkan sebagai perlawanan terhadap kekuatan asing yang telah bercokol, namun jenis kebangsaannya berbeda. Dalam hal ini perlawanan rakyat Arangkaa terhadap Belanda dan perlawanan rakyat Makalehi terhadap Jepang. Akibat yang timbul atau yang dialami oleh rakyat pun berbeda pula. Hal ini ditimbulkan oleh perbedaan politik yang dijalankan oleh kedua bangsa itu, disejajarkan dengan situasi politik waktu itu.

Perlawanan rakyat Arangkaa timbul karena politik kolonial yang hendak menghapuskan status kerajaan di Talaud. Hal ini terjadi karena menurut anggapan kolonial Belanda, daerah Talaud sepanjang sejarahnya hanyalah menjadi tanah jajahan daerah-daerah sekelilingnya sehingga kerajaan yang ada tidaklah memiliki kedaulatan yang pantas mereka hormati. Rakyat Arangkaa bukan saja menganggap hal ini suatu campur tangan namun lebih menyangkut rasa harga diri. Karena itu perlawanan harus diadakan dan bukan hanya sekedar protes saja.

Namun dengan taktik adu domba, Belanda mengatur siasat yang akhirnya berhasil menghancurkan perlawanan rakyat di sana. Politik kolonial diteruskan sehingga Arangkaa dipaksa melepaskan status kerajaan. Tapi perlawanan itu tidaklah dilakukan dengan sia-sia. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial membentuk kerajaan Kepulauan Talaud, yang mempersatukan seluruh daerah bekas kerajaan di kepulauan itu, termasuk yang dahulunya menjadi wilayah kerajaan Arangkaa.

Perlawanan yang dilakukan rakyat Makalehi terhadap Jepang terjadi pada tahun 1945. Dengan motif perjuangan politik yang diwariskan oleh PNI sejak 1928, maka rakyat mengadakan

perlawanan. Namun dengan mudah perlawanan itu ditindas dengan kejamnya oleh Jepang. Mereka yang dianggap bersalah segera dijatuhi hukuman mati. Tetapi walaupun mengalami penindasan kejam namun semangat nasionalisme yang telah mengalami perlawanan itu, tidak turut punah.

BAB 2. PERLAWANAN DI GORONTALO

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

Ditinjau secara geografis, Gorontalo merupakan wilayah paling selatan dari Sulawesi Utara. Secara historis-kultural adalah satu, tetapi secara administratif terdiri atas Kotamadya Dati II Gorontalo dan Kabupaten Dati II Gorontalo yang berada di bawah Propinsi Dati I Sulawesi Utara. Daerah Gorontalo dalam tulisan ini adalah mencakup kotamadya maupun kabupaten-nya. Daerah ini terletak antara $0^{\circ}28'30''$ Lintang Utara dan $123^{\circ}12'30''$ Bujur Timur.

Nama asli Gorontalo adalah *Hulontalo* yang berasal dari kata *Hulontalangi* artinya "*pengembara yang turun dari langit*". Pengembara ini bermukim di kaki gunung Tilongkabila, salah satu deretan pegunungan yang terletak di antara Bolaang Mongondow dengan pegunungan yang terletak di antara Bolaang Mongondow dengan Gorontalo. Suku bangsa Gorontalo termasuk rumpun bangsa Melayu-Polinesia, sama seperti suku-duku da-dai Bolaang Mongondow, Minahasa sampai Sangir Talaud. Suku bangsa ini adalah hasil pembauran dengan penduduk asli dengan suku pendatang antara lain dari Ternate, Tidore, Bugis, Makasar dan lain-lain.¹⁾

Sepanjang diketahui di daerah ini terdapat enam kerajaan yakni kerajaan Gorontalo (Hulontalo), Limboto (Linutu), Suwawa (Suwawa-Bone), Tapa (Bolango), Atinggola (Andagile) dan Boalemo. Selain kerajaan Boalemo maka kelima kerajaan yang disebut terdahulu mengadakan perserikatan yang sering dipererat lagi dengan tali perkawinan. Perserikatan itu dalam bahasa Gorontalo disebut *Limo lo Pohala'a* artinya lima kerajaan yang berserikat, ke dalam maupun ke luar. Akibat masuknya pengaruh Belanda maka kerajaan Tapa (Bolango) mengundurkan diri dari perserikatan lalu diganti oleh kerajaan Boalemo, demi mempertahankan keagungan dan keluhuran warisan sejarah daerah ini, yakni adanya Limo Lo Pohala'a di atas.

Pemerintahan kerajaan dipegang oleh raja yang disebut *Olongiya* dibantu oleh semacam dewan yang disebut *Bobato lo lipu* terdiri atas para pejabat kerajaan. Seluruh pejabat dari tingkat istana sampai ke tingkat terendah disebut *Wali-wali*, sedang mereka yang dahulunya pernah memegang suatu jabatan kerajaan disebut *Wali-wali mowali*. Baik *Wali-wali* maupun *Wali-wali mowali* bertugas sebagai pengawas tingkah-laku raja sehari-hari. Bilamana pada suatu ketika raja membuat suatu perbuatan yang melanggar adat istiadat yang berlaku, maka diadakan sidang yang dihadiri oleh *Wali-wali* dan *Wali-wali mowali* disertai *Bobato lo lipu*. Turut juga hadir para pemangku adat yang disebut *Bate* atau *Bate-bate*. Para hadirin bersidang untuk memeriksa apakah memang raja sudah melanggar adat istiadat. Terkenallah semboyan "Adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah," maksudnya adat istiadat haruslah disesuaikan dengan ajaran agama, dan ajaran agama haruslah berdasarkan Al-Quran.. Semboyan ini terutama berlaku sejak Gorontalo memeluk agama Islam. Perlu ditambahkan bahwa agama Islam dijadikan agama kerajaan mulai sekitar tahun 1566 2).

Mengenai masuknya agama Islam ke Gorontalo memang terdapat beberapa versi. Pengetahuan mengenai masuknya agama di daerah ini memang perlu karena kelak menjadi latar belakang timbulnya perlawanan-perlawanan. Salah satu versi mengatakan bahwa seorang raja Limboto bernama Hunggiludaa I, pergi ke Ternate, masuk Islam lalu membawa agama itu kembali ke Gorontalo. Ditetapkannya agama Islam menjadi agama kerajaan terjadi semasa pemerintahan raja Matolodula pada tahun 1566. Menurut catatan, masuknya Islam di sana bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Hairun dari Ternate yang memerintah pada tahun 1538 – 1570 yang diteruskan oleh anaknya Sultan Baabullah 1570 – 1583.³⁾ Pada masa-masa ini dan mungkin pula sebelum itu, Portugis mengadakan hubungan dengan para penguasa anak negeri setempat serta rakyatnya.

Setelah ibukota Romawi Timur yaitu Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 sekaligus membawa perubahan besar di daratan Eropa khususnya dalam bidang sosial,

politik ekonomi, yaitu perdagangan dan agama. Sebab itu dengan putusnya hubungan dagang antara Eropa dan Asia maka bangsa Barat mencari jalan baru ke Asia. Adapun tujuan mereka yaitu ingin menguasai perdagangan Asia Eropa dan ingin untuk selekas mungkin mendapat kekayaan serta keuntungan melalui dunia perdagangan.

Dengan datangnya bangsa Barat yang dipelopori oleh Portugis ke Asia pada akhir abad ke-15, sejarah bangsa-bangsa Asia, langsung berhubungan erat dengan bangsa-bangsa Barat secara intensif. Tetapi sebagian besar orang-orang Asia tetap mempertahankan hak kemerdekaannya dan kedaulatan dalam politik, ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan hak dan kedaulatannya dari imperialisme Barat yang berkisar dari abad 16 s/d 19 adalah merupakan perjuangan fisik di bidang bersenjata. Apalagi dengan adanya perkembangan kerajaan-kerajaan dan pertahanan di Indonesia terhadap imperialis sudah dimulai sejak abad ke-16. Memang perlawanan pada waktu itu tidak dijalankan secara serentak melainkan secara sendiri-sendiri sehingga dengan mudah saja bangsa imperialis menghancurkannya. Tambahan pula kerajaan yang satu bersengketa dengan kerajaan yang lain, memberi kesempatan kepada bangsa imperialis untuk menggunakan kesempatan ini dalam membantu kerajaan yang lemah melalui politik *divide et impera*.

Inilah kegagalan-kegagalan banyak sudah terjadi dalam pertahanan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia khususnya di Gorontalo antara lain pertentangan antara kerajaan Gorontalo dan Limboto yang memakan kurang lebih 100 tahun lamanya.

Kehadiran Portugis di Asia Tenggara dan kemudian merebut Malaka pada tahun 1511 maka secara sistematis Portugis berhasil meluaskan perdagangan ke Asia dan akhirnya masuk ke Maluku hingga menetap di Ternate dan Tidore yang merupakan gudang rempah-rempah di Indonesia. Selanjutnya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sudah tentu merupakan ancaman secara langsung terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia khususnya Demak sebab berkuasanya Portugis di Malaka menjadi

perintang besar bagi Demak karena :

1. Menghalangi perkembangan perdagangan Islam di Indonesia;
2. Jalan dagang Selat Malaka tertutup bagi pedagang-pedagang Islam, dan
3. Ancaman bagi Agama Islam sebab Portugis tetap mengembangkan agama Katolik di tempat yang didudukinya.

Akibat peristiwa itu Demak berusaha untuk menghancurkan Portugis di Malaka tetapi akhirnya patah di tengah jalan sehingga ekspedisi ini dilanjutkan dan dipimpin oleh Fatahillah untuk memindahkan jaringan perdagangan di Selat Sunda dan mengamankan Jawa Barat dari pengaruh Portugis. Dengan demikian Banten dan Aceh menjadi bandar yang ramai menggantikan Malaka serta Portugis memindahkan jalan dagang antara Malaka dan melalui Kalimantan Utara akibat warga Nusantara mulai mengangkat senjata untuk melawan Portugis.

Setelah Maluku diduduki Portugis satu per satu rempah-rempahnya sebagai sumber penggerak roda niaga internasional antara lain pala dan cengkih mulai dikuasai. Oleh karenanya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menguasai dan monopoli perdagangan di Maluku. Monopoli tersebut ditentang oleh Sultan Hairun dari Ternate tapi akhirnya setelah Portugis merasa tidak kuat mengingat bantuan Goa dan Maluku sehingga mereka menjalankan taktik perdamaian pada tanggal 27 Pebruari 1579. Tetapi perjanjian ini dikhianati oleh Portugis sehingga Sultan Ternate mati terbunuh pada waktu memasuki benteng Portugis di Santo Paolo esok harinya dalam rangka menghadiri pesta perayaan tercapainya perdamaian. Rakyat Maluku dalam hal ini bangkit menentang Portugis di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Perjuangan tersebut berhasil memaksakan kapitulasi terhadap benteng Portugis di Ternate pada tahun 1575.

Dengan dasar itu semua, di Sulawesi Utara khususnya Gorontalo tidak luput pula dengan kedatangan bangsa Barat seperti bangsa Portugis dalam perjalanannya dari Ternate. Maksud kedatangan mereka pada mulanya bertujuan membuat kerja sama dalam persahabatan tetapi setelah armada dan benteng mereka dihancurkan oleh Sultan Baabullah di sekitar tahun 1570

dan mengingat serangan bangsa Mindanao maka Portugis mulai menyusun kekuatan mereka dengan membuat benteng pertahanan di Gorontalo antara lain yang terdapat di bukit desa Dembe I Kecamatan Batudaa. Benteng Portugis ini terdiri dari tiga bagian yaitu Otanoha, Otahia dan Ulu Pahu (*Ota* = benteng, *noha* = ayah, *hia* = istri, *ulupahu* = anak dari *noha* dan *hia*).

Persoalan mereka datang di Gorontalo selain membuat kontrak perniagaan mereka juga menandingi kedudukan Sultan Ternate yang berkuasa atas pulau-pulau kecil sekitar Sulawesi Utara. Sebab pada waktu itu Portugis berada di Ternate mereka menyampingkan kedudukan sultan-sultan Tidore, Bacan dan Jailolo. Sementara itu pada tahun 1537 Maha Putra Suwawa dari Kerajaan Suwawa yang bernama Samido memberontak kepada Portugis yang didalangi oleh Sultan Biya untuk mengkeristenkan rakyat Gorontalo. Berhubung hal ini ditolak oleh rakyat maka akhirnya mereka meninggalkan Gorontalo menuju Madagaskar.

Akibat pelanggaran-pelanggaran Portugis terhadap kedudukan serta adat istiadat Gorontalo maka pada tahun 1564 raja Huneggilu Doa di Limboto tidak segan-segan membantu raja Ternate untuk mengusir penjajah di Ternate. Kerjasama antara kedua kerajaan ini ditingkatkan terutama dalam mengusir penjajahan Portugis dengan semboyan di mana orang Portugis ada, mereka akan serang dan bunuh.

Dengan diduduki Lisboa oleh Spanyol dalam rangka perangnya dengan Belanda, berarti melumpuhkan penghidupan Belanda di Eropa hingga terpaksa berusaha mencari jalan sendiri ke Indonesia. Munculnya Belanda di Banten pada tahun 1596 mempercepat kehancuran Portugis di Asia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia berbeda dengan persoalan yang dijalankan oleh Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian tidak berarti Belanda dengan mudah mendapat kebebasan bergerak di Indonesia. Di mana-mana Belanda mendapat perlawanan raja-raja Indonesia yang berkuasa di beberapa daerah. Apalagi dengan sistem monopolinya melalui VOC bahwa penjualan hasil buminya tidak boleh melalui pihak lain kecuali kepada Belanda. Hal tersebut mendapat tantangan dari rakyat karena sikap serakah

orang-orang Belanda nampak jelas dari rencana Jan Pieterszoon Coen yang berusaha untuk mengadakan kolonisasi di daerah Maluku.

Melebarnya politik dagang Belanda melalui VOC dan perkembangan kerajaan Makasar yang meliputi sebagian Indonesia Timur termasuk Gorontalo, memaksa Belanda berhadapan dengan pelbagai tantangan kelompok manusia yang tidak menginginkan campur tangan asing dalam masyarakat hukumnya sehingga kebanyakan lari dan meninggalkan desa masuk ke dalam hutan. Di Gorontalo ada sebagian masyarakat, yang pada jaman kompeni meninggalkan desa menuju hutan dan masyarakat yang dinamakan *Polahi* yang artinya pelarian, (*lahi* = lari, *po* = pe).⁵⁾

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 21 September 1677 Gubernur Padtbrugge dari Ternate datang ke Gorontalo dengan maksud akan membuat kerjasama agar kelima kerajaan di Gorontalo dimasukkan ke dalam lingkungan kekuasaan Kompeni. Alasan mereka bahwa berdasarkan Kontrak Bongaya antara Sultan Hasanuddin yang ditandatangani pada 18 November 1667 maka kerajaan Gorontalo dianggap wilayah dari kesultanan Ternate, sehingga atas dasar itu Kompeni memberi hak untuk membuat benteng di Makasar, dan di daerah pengaruhnya termasuk Gorontalo.

Padahal sebenarnya dari Ternate Padtbrugge telah menyiapkan naskah serah-terima untuk kelima kerajaan di Gorontalo tetapi setelah diadakan perundingan pada tanggal 27 September 1677 kerajaan yang diwakili oleh pembesar-pembesarnya (raja-raja tidak bersedia hadir) menolak menandatangani kontrak yang terdiri dari 8 pasal. Padtbrugge sudah berusaha keras tetapi misinya gagal dan dengan demikian ia segera kembali ke Ternate dengan hati kesal, sebab jauh sebelumnya yaitu pada tahun 1686 Raja Eyato dari kerajaan Gorontalo dengan spontan menolak kerjasama dengan Belanda sehingga beliau dibuang ke Sailan. Menurut mereka apabila kita bekerjasama dengan Belanda pasti kita akan kehilangan tanah-tanah yang ditanaminya.

Pada tahun 1679 sebagai hasil *divide et impera* dari Kompeni terjadi peperangan saudara antara kerajaan Gorontalo dengan

kerajaan Bolango. Kerajaan Limboto terlihat pula dalam peperangan sebagai kawan kerajaan Gorontalo. Akhirnya karena keinsyafan sendiri serta usaha yang tidak kenal lelah dari kerajaan Suwawa perdamaian tercipta lagi.

Kompeni menukar siasat dengan kewajiban meliver emas yang dimulai sekitar tahun 1828. Tentang kewajiban meliver emas ini Rosenberg menulis demikian: "*Gedurende de gedwongen gould-leverantie (waaroever later) werden van gouvernementswege voorschoten in geld gegeven en was men daarvoor verplicht goud te leveren, berekende tegen F.16, koper de real. En ieder was tot deze levering gedwongen, zoowel adellijke als geringe lieden, zoodat deze lasten ten behoeft van gourvernement ten minste in naam, door ieder gelijkelijk werden gedragen.*" Artinya: "Selama ada paksaan untuk penyerahan emas (tentang hal ini akan dibicarakan kemudian). Pemerintah telah banyak memberikan panjar dan karena itu masyarakat wajib menyerahkan emasnya, diperhitungkan dengan harga f 16 (tembaga) tiap realnya. Tiap orang wajib menyerahkan emasnya, baik para bangsawan maupun rakyat, sehingga kewajiban/beban ini bagi pemerintah setidak-tidaknya dapat dikatakan, dipikul bersama".

Di kerajaan Gorontalo tidak terdapat sumber emas. Di Marisa yang termasuk wilayah kerajaan Gorontalo, 130 km dari kota Gorontalo terdapat sedikit emas. Untuk memenuhi kewajiban inilah rakyat berbondong-bondong diangkut ke Marisa, melalui laut maupun daratan. Di kerajaan Limboto terdapat emas sekitarkampung Boyoga, 10 km dari kota, tetapi penggaliannya sangat berbahaya karena lereng-lereng yang dikuliti maupun dilubangi untuk mendapatkan emas itu gampang runtuh, sehingga kini lereng-lereng itu masih disebut *Botu Po Lontango* (batu-batu yang selalu berjatuh).

Di kerajaan Bolango rakyat digiring ke daerah perbatasan dengan kerajaan Atinggola. Perjalanan kaki memakan waktu empat hari, siang dan malam. Bastian menyebutkannya dengan istilah seakan-akan "Resimen wajib militer di Nederland dalam pembangunan negara Belanda", terdapat rombongan-rombongan yang dipaksakan menggali emas itu. Pada tahun 1830 diketemukan emas di Samalata, salah satu daerah kerajaan Limboto.

Jauhnya kurang lebih 120 km dari kota Limboto. Ke sanalah rakyat Limboto, dan sebagian kerajaan Bolange dipaksa mencari emas.

Masyarakat hukum *Cinula* (salah satu *rechtsgemeenschap*), merupakan dasar dari kerajaan-kerajaan di Gorontalo. *Cinula* merupakan salah satu kelompok manusia yang terikat karena kekeluargaan dan bertempat tinggal bersama pada suatu tempat tertentu. Rakyat dari satu *Cinula* dicampur dengan rakyat dari *Cinula* lain, di tempat penggalian emas. Akibatnya hancurlah *Cinula* itu yang merupakan ikatan genealogis dan batu dasar dari kerajaan-kerajaan di Gorontalo. Di tempat-tempat penggalian emas ini diperkenalkan suatu ikatan baru yang disebut *Tuango Lipu* (rakyat negeri). Rakyat Gorontalo dibagi dalam sebelas rombongan. Setiap rombongan disebut *Kaum*. Tetapi seluruh kaum adalah *Tuango Lipu* yang dipimpin oleh para Jogugu, wakil dari raja-raja. Pada Jogugu diberikan segala fasilitas oleh Kompeni sehingga hubungan mereka dengan rakyatnya semakin renggang. Akhirnya raja-raja kehilangan rakyat dan kekuasaan, sedangkan wakilnya (jogugu) makin menonjol kedudukan ekonomi dan kekuasaannya di bawah asuhan Kompeni.

Rakyat yang cacat dan tidak kuat menjadi pekerja-pekerja kebun rakyat yang menggali emas karena pemilik kebun itulah yang melunasi kewajiban menyerahkan emas kepada Belanda. Timbul pula orang-orang, pejabat-pejabat yang punya emas banyak, yang dapat melunasi sekian banyak kewajiban rakyat. Dan rakyat-rakyat ini untuk mengganti penebusan di atas harus bekerja di rumah, di ladang dan sawah pejabat tadi. Dan karena tidak adanya perhitungan maupun pembukuan apalagi pengadilan maka pengabdian itu tidak terbatas waktunya. Sehingga pengabdian karena pelunasan emas itu mengakibatkan munculnya perhambaan atau perbudakan turun temurun. Sebelum adanya kewajiban melever emas, lembaga perbudakan di lima kerajaan Gorontalo dapat dikatakan tidak ada. Yang ada hanyalah pembagian pekerjaan dalam masyarakat *Limula*, yakni pembagian dalam kelompok pimpinan masyarakat yang kuat jadi *Bala* (anggota pertahanan), sedangkan yang lain menjadi petani.

Dr. Haga dalam karangannya "*De Lima Pahalaa*" menyebutkan istilah yang sama untuk orang-orang ini. Keluarga-keluarga yang tidak turut dalam penggalian emas dan tidak pula mau menjadi abdi tuan-tuan/pejabat yang memiliki emas, lari ke dalam hutan. Mereka hidup di dalam hutan dengan keluarganya, tanpa mengganggu rakyat, tidak merampok dan tidak mengganggu keamanan.

Pada tahun 1856 Belanda membentuk 12 distrik yang setiap distrik dikepalai oleh seorang *Marsaoleh* yang didukung oleh Belanda. Kekuasaan mereka nyata-nyata menjadi tandingan terhadap kekuasaan raja-raja dan Dewan Perwakilan Rakyat (*Bantayo Pobbeydo*). Beberapa keluarga besar dari kerajaan-kerajaan ada yang tidak mau menerima tindakan *Polahi*, tetapi dengan segala rupa siasat mereka dapat dibujuk kembali. Sebagian dari mereka mau menurut dan kembali tertinggal di desa-desa di pinggir hutan.

Sebelum Perang Dunia II banyak diceritakan oleh para pencari damar dan rotan di hutan adanya masyarakat Pohahi dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar gunung Tilongkabila dan Buliohute. Mereka hidup dari hasil perburuan, menangkap ikan dan membuat sagu dari pohon enau hutan. Di beberapa tempat ada pasar bisu, menukarkan barang-barang hasil kumpulan mereka (hasil hutan) dengan garam dan lain-lain dari kota.

Perkembangan masyarakat ini selanjutnya dalam alam merdeka pada masa ini belum diketahui dengan pasti, sebab hingga kini belum diadakan penyelidikan khusus.

Akibat politik dari Belanda ini maka pada tahun 1849 Raja Wartabone dari Kerajaan Suwawa menentang maksud Belanda untuk mengadakan penanaman kopi secara paksa (*cultuur stelsel*) dengan alasan agar rakyat jangan diperbudak, karena menurut adat di lima kerajaan Gorontalo, dapat dikatakan perbudakan tidak ada. Atas dasar tersebut maka Raja Wartabone mempertahankan masyarakat hukum di Gorontalo.

Persoalan inilah yang menyebabkan pada tahun 1863 Raja Panipi membunuh Belanda karena iparnya Mahangga ditawan dengan dipasung kakinya di kandang kuda. Dengan demikian timbullah perang Panipi. Begitu juga pada tahun 1875 Raja

Tangahu di Kerajaan Suwawa menentang penjajah Belanda karena persoalan penerimaan gaji, sebab menurut pikirannya apabila kita sudah menerima gaji dari Belanda berarti tenaga kita sudah dibeli dan kita sudah dijajah. Jejak Raja Tangahu ini diikuti oleh Marsaoleh Hubu, Masduto, Usuli Bukengo, kesemuanya dari kerajaan Suwawa, Bone dan Bintauna pada tahun 1881 s/d 1885. 6).

Akibat menolak menerima gaji dari Belanda itu mereka ditawan. Pertentangan-pertentangan secara kelompok terjadi dalam menentang penjajah Belanda. Tetapi pada pertengahan abad ke-18 pertahanan dari kerajaan-kerajaan lama di Indonesia terhadap serbuan imperialisme sudah dapat dipatahkan oleh Belanda melalui siasat adu domba antara kita dengan kita. Jadi sesudah pertengahan abad ke-18 sebagian besar dari potensi pertahanan kita telah lemah. Meskipun demikian tetap melanjutkan perlawanan terhadap kolonialisme yang berlangsung hingga pada zaman pergerakan nasional dan saat pengakuan kedaulatan. Sehingga dengan demikian tahap yang satu dalam perjuangan kita bersambung dengan tahap berikutnya.

Dengan pecahnya Perang Dunia II Nederland sebagai negara induk bagi Hindia Belanda dikuasai Nazi Jerman. Belanda yang bersandar pada kekuatan Sekutu menjadi lumpuh. Kepercayaan kepada Jepang sebagai pengusir kolonialisme Barat besar sekali artinya bagi bangsa Indonesia, sehingga dengan mudah dinas rahasia Jepang menguasai rakyat yang bersedia menghancurkan Belanda apabila balatentaranya sudah mendarat di Indonesia. Semua gerakan Jepang dilakukan secara serentak, dan bagaikan air bah yang turun ke lembah-lembah dalam tempo yang amat singkat Udara Indonesia dapat dikuasainya. Tempat-tempat yang strategis terus direbutnya satu per satu, Jepang mulai pendaratannya di Manado pada tanggal 11 Januari 1942, Kendari tanggal 24 Januari 1942, Ambon 3 Februari 1942, Ujung Pandang 8 Februari 1942. Tentara Jepang mendarat di beberapa tempat di pulau Jawa pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati.

Mulailah jaman baru lagi rakyat Indonesia, yaitu jaman yang ternyata kemudian ditandai dengan penderitaan yang menekan. Pada mulanya Jepang berusaha mengambil simpati rakyat Indonesia, sehingga hampir semua rakyat Indonesia percaya kepada mulut manis pemerintahan Jepang dengan semboyan "untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya". Dalam pada itu jiwa yang selalu mengharapkan kemerdekaan dengan menyerahnya Belanda makin berkobar. Gejala yang selama ini terpendam akhirnya spontan meledak. Di sana sini terlihatlah Sang Saka Merah Putih berkibar dengan megahnya.

Khusus di Gorontalo kurang lebih empat bulan daerah tersebut mengalami hidup di bawah kekuasaan Pemerintah Nasional. Selama itu bendera Sang Saka Merah Putih sudah berkibar di kantor *Staf Kwartier Stadswacht*, di kantor Polisi dan Kantor Pemerintah Daerah sampai ke distrik-distrik dan onder-distrik. Semua bidang pemerintahan berjalan dengan lancar keamanan terjalin baik. Rumah orang-orang Belanda yang penuh dengan segala isinya, terjaga baik oleh pasukan-pasukan pengawal kota/*Stadswacht*. Boleh dikatakan tidak ada sesuatu pun yang hilang. Orang-orang tawanan baik orang-orang pemerintah Belanda maupun tentara-tentara Belanda dijaga dengan ketat, sehingga tak ada yang dianiaya. Kemudian pemerintah nasional mengadakan hubungan dengan pembesar-pembesar balatentara Jepang di Manado, di mana pertama-tama pihak Jepang meminta supaya pemerintah nasional menyerahkan segala orang-orang tawanan. Dengan demikian, maka semua tawanan itu diangkut ke Manado untuk diserahkan kepada balatentara Nippon.

Tidak lama kemudian tentara Jepang dibawa ke Gorontalo bersama pejabat-pejabatnya yang lengkap, cepat mengambil kekuasaan dari tangan pemerintah nasional. Pemerintah nasional dibubarkan, dan berlakulah peraturan-peraturan Jepang sebagaimana di daerah-daerah lain yang mereka telah duduki. Semua rakyat merasa ketakutan karena bendera Merah Putih tidak boleh lagi dikibarkan, yang berkibar hanyalah bendera Jepang.

Beberapa tokoh/ pemimpin rakyat diberi tugas dalam pemerintahan Jepang itu antaranya N. Wartabone, R.M. Kusno, P. Kalangkongan. *Seinedan* dibentuk dan semua pemuda dilatih dalam barisan ini. Rakyat terutama petani-petani diperintahkan untuk menanam kapas. Pabrik kapas didirikan di pelabuhan. Pemuda dan pemuda dididik untuk bekerja dalam pabrik ini.

Pada tahun 1943 beberapa pemimpin dan kepala distrik di Gorontalo ditangkap oleh *Toketai* dan *Kibitai* di antaranya N. Wartabone dan R.M. Kusno dengan tidak diketahui apa sebabnya waktu itu di Gorontalo tidak ada *Kenpeitai*. Ternyata setelah diselidiki oleh *Kempeitai*, maka tuduhan kepada orang-orang yang ditangkap itu tidak benar. Mereka dilepaskan setelah beberapa bulan menderita penganiayaan. Akhirnya ternyata bahwa hal itu adalah akibat tuduhan buatan dari seorang mata-mata Jepang yang sebenarnya mata-mata Belanda-Sekutu yang bernama Kumontoi supaya pemimpin Gorontalo yang pernah ditangkap Belanda tahun 1942 dibunuh oleh Jepang. Kumontoi menulis surat gelap yang menerangkan bahwa para pemimpin di Gorontalo sudah berkomplot untuk melawan Jepang. Bahkan ia sendiri yang mempengaruhi *Toketai* untuk menangkap. Tetapi kesudahannya Kumontoi dipancung oleh Jepang, karena ia adalah mata-mata Sekutu.

Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 sudah diketahui oleh rakyat walaupun Jepang berusaha merahasiakan saja. Tentara Jepang yang beribu-ribu banyaknya di daerah Gorontalo sudah dikumpulkan dan akan diberangkatkan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 keadaan tersebut melalui radio sudah diketahui oleh rakyat. Semangat rakyat yang terpendam karena tekanan Jepang, kini meluap. N. Wartabone sebagai Kepala Pemerintah Daerah segera membentuk Dewan Nasional terdiri dari beberapa tokoh:

1. Ajuba Wartabone, (Jogugu Bualemo), Ketua.
2. A. Uno, Ketua Muda
3. Wardojo (Dokter Hewan), Anggauta
4. Mohamad Aliamtamar (Douane), Anggauta
5. A. Amu (Kepala Polisi), Anggauta
6. Abdulah Tumu, Anggauta
7. Djafar Arabih, Anggauta.

Setelah itu dibentuk pula PKR, dipimpin oleh Abdulah Tumu, A.J. Usman, A. Wakit Thahid (penulis), Rajak dan A. Junus. Di tiap distrik dan onder distrik dibentuk pula PKR ini sedangkan di kampung dibentuk regu PKR. Selain bertugas untuk menjaga keamanan juga diadakan latihan pokok ketentaraan. Kemudian dibentuk pula *Tentara Indonesia Merdeka (TIM)*, terdiri dari para bekas *Heiho* dan para anggota PKR pilihan. Kedua pasukan ini merupakan pasukan rakyat yang langsung di bawah komando N. Wartabone sebagai pemimpin besar/pimpinan umum.

Senjata api yang dibuang oleh Jepang di sungai-sungai, di laut yang tidak dalam, di lobang-lobang dan goa dapat diketahui oleh rakyat. Senjata-senjata itu yang berjumlah ratusan dapat diambil kembali bersama dengan peluru dan bom-bom tangan. Senjata-senjata api inilah yang digunakan oleh dua pasukan rakyat PKR dan TIM selain itu senjata kuno seperti keris, kelewang, tombak, juga digunakan.

Di tempat yang bernama Tabliti bagian Suwawa dijadikan tempat pertahanan. Tanggal 27 November 1945 tibalah di Gorontalo sebuah kapal perang Sekutu *Piet Hein*. Ribuan rakyat dengan senjata yang ada siap menantikan komando. Kapal perang itu dengan tentara Sekutu (Australia) menurunkan juga tentara NICA yang mau menjajah kembali. Rakyat bertekad sekali merdeka tetap merdeka, lebih baik hancur bersama tanah leluhur Indonesia dari pada kembali dijajah. Tetapi pemimpin-pemimpin tetap tenang dengan membuat segala perhitungannya. Kapal Perang *Piet Hein* ini terus ke Poso dan di sana menurunkan tentara NICA itu. Tanggal 1 Desember 1945 kembalilah kapal perang *Piet Hein* itu di Gorontalo lalu menangkap N. Wartabone *cs* dan kemudian dibawa ke Manado terus dibuang ke Cipinang.

Cara penangkapan N. Wartabone itu adalah sebagai berikut: Sekutu dan Nica sudah mengetahui bahwa rakyat telah siap mengadakan perlawanan atas kembalinya kekuasaan kolonial Belanda, di bawah pimpinan N. Wartabone. Mereka juga mengetahui bahwa rakyat Gorontalo amat patuh kepada pemimpinnya itu. Mula-mula N. Wartabone diundang oleh Kapten Wilson untuk mengadakan perundingan di atas kapal.

Wartabone menolak, sedangkan para pemimpin lainnya juga tidak menyetujui N. Wartabone pergi ke kapal untuk mengadakan perundingan, dan hanya cukup mengirimkan wakilnya saja. Tapi pihak Sekutu tidak mau berunding dengan utusan N. Wartabone. Mereka hanya perlu berunding dengan N. Wartabone sendiri. Kemudian datang lagi undangan Kapten Wilson untuk N. Wartabone. Setelah beberapa kali diundang, akhirnya N. Wartabone memenuhi undangan itu, tetapi sesampainya di kapal bukan diajak berunding melainkan terus ditahan dan dibawa ke Manado. Wartabone diperintahkan untuk memberi instruksi kepada rakyat agar jangan berbuat apa-apa. sebenarnya sebelum N. Wartabone ke kapal orang sudah menerka apa yang akan terjadi. Instruksi itu disampaikan oleh istrinya yang ketika itu menghantarkan pakaian suaminya ke kapal. Dan karena taat dan patuh kepada pemimpin besarnya, maka rakyat yang sudah siap itu masing-masing kembali dengan perasaan kecewa. Pemimpin pemimpin PKR dan TIM hari itu juga menyingkirkan diri dari kota, untuk mempersiapkan diri menghadapi tentara Nica.

B. UJUD PERLAWANAN

Ujud atau bentuk perlawanan di daerah, erat hubungannya dengan keadaan sosial-ekonomi, sosial-budaya dan situasi sosial-politik yang terjadi di masa itu. Keadaan-keadaan tersebut ada yang merupakan masalah tingkat lokal, dan ada pula hubungannya dengan situasi nasional bahkan kadangkala dengan keadaan internasional. Apa yang terjadi di Eropa akan punya akibat dan pengaruhnya di Indonesia sampai ke daerah-daerah.

Keadaan yang disebutkan di atas bila dihubungkan dengan kebijaksanaan serta penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa kolonial, akan membuahkan reaksi dari rakyat maupun penguasa pribumi. Apabila penguasa kolonial menjalankan program yang merugikan kepentingan ekonomi, maka akan timbul reaksi dari rakyat yang merasa dirugikan. Demikian pula apabila penguasa kolonial hendak memaksakan masuknya unsur-unsur kebudayaan Barat, pasti akan timbul reaksi, menerima atau menentangnya. Dalam bentuk yang paling ekstrim, reaksi akan pecah menjadi pemberontakan ke alamat penguasa kolonial atau kepada sesama

penduduk asli (raja atau golongan lainnya) yang membantu penguasa kolonial. Apalagi dalam masalah politik bilamana telah timbul pihak memihak misalnya soal perebutan takhta atau batas wilayah.

Namun tidak semua daerah akan sama latar belakang perlawanannya. Bila hendak ditinjau secara umum, perlawanan timbul karena dilatarbelakangi oleh masalah sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-politik. Kalau hal ini hendak diterapkan di Gorontalo maka melihat bahwa dari empat perlawanan yang dikemukakan di sini, dua menyangkut masalah sosial-ekonomi, satu menyangkut masalah sosial-budaya dan satu sosial-politik.

Ujud perlawanan yang dilatar-belakangi sosial-ekonomi di antaranya tersurat dalam peristiwa Perang Panipi. Dalam hal ini Panipi bukanlah suatu nama tempat melainkan nama seseorang yang memegang peranan penting dalam perlawanan yang dimaksud, dimulai dengan usaha Belanda mengintensifkan penagihan pajak. Tugas ini dibebankan kepada para *Marsaoleh*. (setingkat camat). Selain menagih pajak, Marsaoleh juga bertugas dalam hal pengerahan tenaga untuk kerja rodi. Seorang marsaoleh membawahi sejumlah kepala desa yang disebut *Tawuda'a* (sekarang disebut ayahanda).⁷⁾

Pada tahun 1862 Belanda hendak mempersatukan wilayah Limebèdea menjadi satu distrik dengan Batudaa di bawah seorang marsaoleh. Rakyat tidak menyukai penggabungan ini tapi kemarahan rakyat semakin menjadi sebab seorang bernama Malangga Kaluku yang tidak mereka senangi, diangkat menjadi marsaoleh Batudaa. Istri Kaluku ini adalah adik iparnya. Hal ini nyata ketika rakyat Batudaa yang masih keturunan raja, diwajibkan membayar pajak. Kaluku bukannya tidak tahu hal itu tapi melaksanakan penagihan tanpa menghiraukan protes dan keluhan rakyat.

Dalam situasi demikian muncullah seorang pahlawan yang menawarkan diri untuk berjuang di pihak rakyat yang tertindas. Orang itu bernama Palipi yang dikenal sebagai seorang yang berilmu tinggi dan masih keturunan bangsawan. Protesnya terhadap Marsaoleh tidak diperhatikan padahal keresahan mulai membara di kalangan rakyat yang begitu miskin untuk membayar pajak yang sesungguhnya bebas dari kewajiban tersebut.

Selain motif ekonomi, terlihat pula motif agama. Hal ini sebab Belanda hendak memaksa penduduk menjalankan rodi. Setiap hari Jumat, Marsaoleh Kaluku tidak mengirimkan tenaga rodi, sebab rakyatnya menjalankan ibadah Jumat sesuai keyakinan mereka dalam agama Islam. Karena Belanda memaksa kaum kerja pada hari itu maka kemarahan rakyat melewati batasnya.

Panipi mempergunakan kesempatan ini dengan mengajak rakyat berontak mengusir Belanda. Ia sendiri bertindak sebagai pemimpinnya dibantu dua penglima perangnya bernama Bobihu dan Antula. Di sini terlihat bahwa motif ekonomi kelihatannya memang berperan walaupun yang membakar api perlawanan adalah motif agama.

Di samping latar belakang yang pernah dikemukakan di atas maka ujud atau bentuk perlawanan muncul pula karena sebab-sebab lain, yaitu pemberontakan yang timbul di Sumalata sekitar akhir abad ke-19. Waktu itu pemerintah kolonial sedang mengusahakan pertambangan emas di sana. Tambang emas Sumalata dibuka pada tahun 1895 oleh suatu maskapai pertambangan Belanda. Sikap dan tindakan kepala tambang bernama Knappert makin lama makin memuakkan para buruhnya. Caci maki adalah soal biasa yang terdengar sehari-hari yang keluar dari mulutnya. Kedongkolan para buruh tambang yang diperlakukan sebagai budak atau hewan, membangkitkan rasa harga diri dalam kelompok buruh yang bekerja mencari nafkah di sana. Kebencian yang makin menghebat menimbulkan pemberontakan yang dipimpin oleh Olabu dan Tamu'u. Selain timbul peristiwa pembuhuhan terjadi pula perampokan kekayaan Belanda di tempat itu.

Terlihat di sini bahwa rasa harga diri membuahkan perlawanan dan pertumpahan darah yang merupakan ujud perlawanan di Sumalata yang berkobar tahun 1898. Dalam hal ini maka tingkah laku pejabat kolonial berperan pula untuk mematangkan situasi. Harga diri ini muncul untuk menjaga kehormatan diri dan kelompok terhadap penghinaan oleh bangsa

asing. Akar-akar dan benih-benih nasionalisme mungkin sekali bersumber dari rasa harga diri ini.

Mengenai hal itu menjadi lebih jelas bilamana kita tinjau peristiwa yang terjadi di Gorontalo pada bulan Januari 1942. Dalam masa akhir berkuasanya kolonialis dan imperialis Belanda di Indonesia, gerakan-gerakan nasionalisme muncul dan menampakkan diri dalam berbagai tempat, bentuk dan cara. Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo adalah manifestasi dari bangsa yang pada dasarnya menghendaki kemerdekaan nasional, lepas dari penindasan yang dilakukan oleh suatu kekuatan asing. Bentuk perlawanan yang muncul ketika kekuasaan Belanda sangat goyah menjelang masuknya Jepang di Sulawesi Utara khususnya di Gorontalo, adalah bentuk atau ujud yang berdasarkan kekuatan politik dan masa rakyat yang sudah dijiwai oleh nasionalisme dengan pimpinan dari tokoh masyarakat setempat antaranya Nani Wartabone, J.A.P. Kalengkongan, Kusno Danupojo dan lain-lain, maka kekuasaan kolonial Belanda di sana dapat direbut dengan mudah. Sayang sekali bahwa satu kekuatan asing yang jauh lebih kuat segera tiba dan menghancurkan harapan rakyat untuk mengecap alam kemerdekaan lebih lama lagi. Jepang mendarat 11 Januari '42 di Minahasa dan melebarkan kekuasaannya ke sana dan dimulailah penindasan dan pemerasan yang sebelumnya tidak dikenal.

Salah satu akibat pemerasan dan penindasan itu adalah munculnya peristiwa di Limboto sekitar tahun 1942. Memang ternyata di mana-mana di seluruh Indonesia, bahwa untuk mendukung peperangannya melawan Sekutu, maka Jepang mengerahkan rakyat untuk bekerja mati-matian membantunya. Dalam hal ini rakyat dikerahkan untuk menghasilkan antara lain kebutuhan logistik, tenaga kasar dan sebagainya untuk membantu memenangkan perang tersebut. Tanah-tanah milik rakyat diperintahkan untuk ditanami bahan makanan berupa padi dan sebagainya sedangkan hasilnya diserahkan kepada mereka.

Hal serupa dialami juga oleh rakyat di Gorontalo. Sawah ditanami tapi hasilnya tidak boleh dinikmati oleh rakyat. Untuk menghidupi keluarga maka tidak jarang rakyat bekerja jauh di luar desa dan memperoleh upah berupa beras. Tanpa mempertim-

bangkan kepentingan dan penderitaan rakyat, maka upah berupa padi ataupun beras harus juga diserahkan ke tangan Jepang. Tidak ada jalan lain lagi selain memberontak. Tanpa makan maka ia akan mati, lebih baik berusaha membela diri dengan menyerang sumber penderitaan rakyat. Walaupun akhirnya kalah, tentu akan mati juga. Tanpa makan akan mati, melawan pun akan mati, sehingga mereka memilih melawan saja. Terlihatlah di sini motif ekonomi memegang peranan yang cukup penting, sama halnya ketika Belanda memaksakan penagihan pajak pada orang yang bukan kewajibannya untuk membayar.

C. JALANNYA PERLAWANAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan di depan, maka yang hendak diutarakan di sini adalah empat perlawanan yang terjadi di Gorontalo antara 1862 sampai 1942. Tiga perlawanan yang pertama ditujukan kepada Belanda sedang yang terakhir ditujukan kepada Jepang. Perlawanan pertama muncul pada tahun 1862 disusul perlawanan yang kedua pada tahun 1898. Yang ketiga terhadap Belanda terjadi pada tahun 1942 yang bercirikan politik. Yang keempat di tahun 1942 juga tetapi terhadap Jepang.

1. Perang Panipi

Seperti halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Utara pada khususnya, maka di daerah Gorontalo juga terhadap beberapa kerajaan pribumi. Lima di antaranya bersekutu dalam *Limo lo Pohala'a* artinya lima kerajaan yang berserikat. Dua di antara kelima kerajaan itu yang paling besar pengaruhnya ialah Kerajaan Gorontalo (Hulontalo) dan Limboto (Limutu). Kerajaan Gorontalo menguasai pesisir selatan daerah itu sedang kerajaan Limboto terletak di pedalaman di sekitar danau Limboto. Antara kedua kerajaan tersebut jauh sebelumnya pernah terlibat dalam pertentangan dan perselisihan yang menimbulkan perang selama kira-kira 100 tahun lamanya.

Tetapi akhirnya kedua kerajaan itu berdamai dan membina kewajiban saling menghormati sebagai dua kerajaan dengan kekuasaan dan kehormatan yang sederajat. Untuk melukiskan rasa saling menghormati, apabila seseorang berada di wilayah

kerajaan Gorontalo, dia akan menyebutnya "'limutu-Hulontalo'" dan apabila berada di wilayah kerajaan Limboto, dia pasti akan menyebut "'Hulontalo-Limutu'", kalau sedang membicarakan kerajaan-kerajaan tersebut. Soalnya diakui dan dianggap oleh umum di sana bahwa kedua kerajaan ini adalah menjadi pemuka dari lima kerajaan yang ada di sana, di mana pengakuan itu ditunjang oleh ikatan kekeluargaan antara mereka.

Kemudian dengan masuknya kolonialis dan imperialis Barat di daerah Gorontalo maka terjadilah perubahan di antaranya dalam bidang kebudayaan. Dimulai dengan kehadiran Portugis kemudian Belanda dan Jepang, maka satu per satu unsur-unsur kebudayaan asli mulai terdesak. Untunglah oleh adanya pengaruh Islam yang kuat maka masyarakat mampu mempertahankan diri menghadapi ekspansi kebudayaan dari luar. Kalau seandainya menemukan hal-hal yang baru yang akan mengubah adat istiadat, maka mereka kembali kepada semboyan lama yakni "adat ber-sendenkan syarak dan syarak bersendenkan Kitabullah".

Salah satu yang tetap menjadi pertentangan dengan bangsa penjajah di Gorontalo yaitu persoalan wajib pajak, karena biasanya menurut ketentuan adat pada masa itu para keturunan raja tidak dikenakan wajib pajak. Begitulah keadaan sudah terjadi sehingga kaum imperialis dan kolonialis mulai masuk di Gorontalo dan melalui tindakan politik, militer dan ekonomi, sering memaksakan kehendaknya sehingga secara berangsur-angsur melumpuhkan kedudukan kerajaan.

Pada tahun 1862 Belanda mulai mengatur siasat untuk menggabungkan Limebedea menjadi satu distrik dengan Batudaa sedangkan pemegang pemerintahannya adalah orang-orang yang tidak disenangi rakyat. Belanda mulai melaksanakan pemerasan melalui pembayaran pajak. Panipi seorang pemuka masyarakat yang disegani di daerah itu tampil ke depan membela rakyat yang hendak dikenakan wajib pajak. Mereka adalah keturunan raja yang sesuai adat, tidak diwajibkan membayar pajak. Mereka bertahan pada aturan adat dan nilai-nilai budaya mereka.

Pada saat peristiwa tersebut yang menjadi kepala pemerintahan adalah Marsaoleh Malangga Kaluku, ipar Panipi sendiri, karena isterinya adalah adik kandung Panipi. Belanda merasa

terhina dengan tindakan Malangga Kaluku sehingga mereka menangkapnya lalu di pasung dikandang kuda di desa Tula-denggi, tempat yang dinamakan Duinggi.

Pada tahun 1863 selain persoalan pajak juga pada setiap hari Jumat anak-anak/rakyat Mahangga Kaluku harus membersihkan kandang peternakan kuda milik Belanda. Tetapi pernah Malangga Kaluku tidak mengirimkan anak-anaknya dengan alasan bahwa setiap hari Jumat mereka akan sembayang.

Inilah yang menjadi sebab musabab mengapa Panipi beserta pengikutnya menyatakan perang terhadap Belanda. Pertempuran hebat mulai terjadi di antara kedua belah pihak. Belanda merasa kewalahan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Panipi. Panipi seorang yang kebal peluru dan mempunyai pengetahuan mistik yang menyebabkan Belanda kehilangan akal. Begitu banyak pasukan Belanda dikerahkan tetapi tidak mampu berbuat apa-apa dan untuk mengakhiri perang ini Belanda menggunakan Lahamolla, ayah mantu Banihu untuk dapat mendamaikan perang tersebut. Dalam perundingan ini kedua panglima perang Panipi yaitu Bobihu dan Antula ditangkap Belanda sewaktu menghadiri pesta makan malam di kapal perang Belanda. Mereka ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Balikpapan (Kalimantan). Demikian juga Panipi diundang Belanda dengan persiapan menghadapi perang Aceh. Begitu Panipi sampai di pelabuhan dia ditangkap dan dibawa ke Manado. Sepanjang perjalanan kapal motor tersebut miring dan hampir tenggelam sehingga sampai di Manado diganti lagi dengan kapal motor yang agak besar dan selanjutnya dibawa ke Makasar tetapi keadaan kapal tetap miring. Di Makasar Panipi diturunkan ke darat untuk diproses, tapi tanpa disadari oleh Belanda dia sudah menghilang dan berjalan kaki sampai ke Poso dan selanjutnya menuju ke Gorontalo.

Berita larinya Panipi dari Makasar membuat tanda tanya besar pada Belanda sebab beberapa hari kemudian mendapat berita dari Gorontalo bahwa Panipi sudah berada di Paguyaman.

Belanda mengerahkan bantuan tentara sebanyak 120 anggota untuk menyerang Panipi tetapi semuanya sia-sia belaka. Adapun penyerangan Belanda berpusat di benteng peninggalan Portugis yang bernama Otama, Otabia dan Ulupahu, letaknya kurang lebih

100 meter lebih tinggi dari benteng Panipi yang menghadap di sebelah kanan jalan ke Batudaa di desa Dembe I, sedangkan persenjataan Panipi hanya berupa pedang, tombak dan beberapa senjata rampasan dari Belanda. Konon senjata yang dipergunakan Panipi masih ada yaitu tombak berada di Isimu dan parang berada di Batudaa serta contoh pakaian perang dapat dilihat pada buku Rosenberg tahun 1863. Belanda yang sudah tidak sanggup lagi di bidang strategi kemudian mengambil jalan penyelesaian politik yaitu mencari jalan keluar bagaimana caranya membunuh Panipi.

Dengan perantaraan seorang kaki tangan di Gorontalo Belanda mendapat petunjuk bahwa untuk membunuh Panipi bukan dengan peluru senjata biasa tetapi harus dengan peluru yang terbuat dari anak kancing bajunya. Cara tersebut digunakan oleh Belanda melalui anak buah Panipi yang bernama Dauda. Kebetulan peluru dari anak kancing tersebut menurut bahasa Gorontalo adalah *raga-raga* dan telah ditembakkan mengenai paha Panipi maka gugurlah Panipi sebagai seorang patriot bangsa dalam membela masyarakat serta menghancurkan Belanda di Gorontalo.

Adapun letak makam Panipi sampai sekarang tidak jelas. Menurut berita mayat Paniti setelah dimakamkan di atasnya diikat beberapa ekor kerbau untuk menginjak-injaknya sehingga tidak dapat diketemukan lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa mayatnya dimakamkan di tepi sungai dan sekarang tidak bisa ditemukan lagi.

2. Perlawanan di Sumalata

Sekitar tahun 1895 suatu maskapai pertambangan emas di buka di Sumalata, secara besar-besaran. Pertambangan emas itu dibuka karena rib (urat mas) di sana didapati mengandung pasir mas. Administratur Knappert yang memegang pimpinan maskapai itu sangat bangga akan maskapainya itu, apalagi dengan perhitungan bagaimana besar laba yang akan didapatnya nanti bilamana usahanya itu berhasil. Untuk mengejar laba besar yang telah ada di depan jangkauan mata dan tangannya itu administratur knappert bertindak terlalu keras terhadap kaum

buruh, sehingga kaum buruh memandangnya sebagai suatu kebiasaan yang tidak berprikemanusiaan.

Maki dan nista terlalu murah keluar dari mulutnya. Beberapa orang mandur dapat meredakan ketegangan yang telah bertimbun-timbun pada kaum buruh, tetapi pada dua tiga orang yang berjiwa panas menggelegak, tak dapat mendinginkan dendamnya.

Dua orang di antaranya ialah Tamu'u dan Olabu telah bersatu dengan sumpah akan membela kaum buruh dengan tetesan darah mereka dengan niat administratur Knappert mesti dilenyapkan. Demikianlah dalam suatu kesempatan pada tahun 1898 bulan Mei sewaktu Knappert melontarkan cacian dan makian yang bertubi-tubi pada mereka berdua di suatu tempat, keduanya terus menyambarnya dengan belati, sehingga administratur itu tewas.

Seluruh maskapai terjadi huru-hara. Perampokan atas harta maskapai segera terjadi. Tetapi seorang pun tak dapat lolos sebelum digeledah baik-baik. Konon uang perak yang beribu-ribu ringgit jumlahnya itu oleh para perampok disimpan dalam lobang tabung di sekitar pertigaan lobang, dan sampai tahun 1960 belum dikutik-kutik. Dan untuk memadamkan huru-hara, didatangkan *schutterij* (tentara bantuan) dari Gorontalo. Olabu dan Tamu'u tidak dapat melarikan diri jauh-jauh, karena itu mereka dapat ditangkap dan dihukum mati.

Sebenarnya maskapai Sumalata itu telah mulai mengeluarkan hasil, tetapi karena terjadinya perampokan atas hartanya itu tambang itu ditinggalkan. Barang-barang besi, kuali-kuali besar, besi-besi leideng dan lain-lain ditinggalkan begitu saja di dalam hutan, sehingga kini. Konon kata orang sejumlah ribuan uang perak dan ringgit sampai sekarang belum dikorek-korek orang dari persembunyiannya, karena takut akan sumpah kutuk Tamu'u dan Olabu.

3. Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo

Sejak Perang Dunia II meletus, negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 diduduki Jerman. Pemerintah Belanda menyingkir ke London untuk bisa berfungsi sebagai pemerintah pelarian. Tahun 1941, Jepang menyerbu Teluk Mutiara dan pecahlah Perang

Pasifik. Pemerintah pelarian Belanda yang ada di London menyatakan perang kepada Jepang. Perang tersebut merupakan masa penuh kejadian-kejadian yang tragis, bagi rakyat di negeri-negeri di Asia. Para pemimpin pergerakan nasional Indonesia menyadari kenyataan sesudah kekuasaan Belanda dijatuhkan sebagai suatu kesempatan yang baik untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo merupakan bahagian dari pergerakan kemerdekaan pada umumnya. Ada tiga masalah yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, ialah :

- a. Putusnya hubungan pemerintah Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan yang sudah berpindah ke London.
- b. Menghadapi penyerbuan Jepang.
- c. Menghadapi tuntutan Pergerakan Nasional.

Untuk menghadapi penyerbuan Jepang dan gerakan rakyat di Gorontalo, maka pemerintah Hindia Belanda telah menyusun organisasi yang disebut : *Vernielings Corps (V.C.)* seperti juga di daerah lain. Organisasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengrusakan atau pembumihangusan semua alat-alat vital yang ada di daerah Gorontalo jika sewaktu-waktu pemerintah Hindia Belanda terpaksa meninggalkan Gorontalo. Khusus untuk daerah Gorontalo, yang menjadi sasaran V.C ialah irigasi, pelabuhan, jembatan, bahan makanan serta objek-objek lain yang sangat penting bagi kehidupan rakyat.

Menanggapi gerak gerik Belanda untuk melaksanakan rencana ini, maka pada tanggal 10 Januari 1942, tokoh kudeta kepada Asisten Residen Korn dan *Controleur* Dancona menyatakan sebagai berikut, "Jika Pemerintah Hindia Belanda akan melaksanakan pembumihangusan daerah Gorontalo, maka akan menghadapi tantangan dari rakyat". Sebelum ancaman ini dilancarkan, Nani Wartabone bersama tokoh-tokoh pergerakan lainnya, telah melakukan gerakan di bawah tanah berupa penyusupan ke tubuh alat-alat bersenjata Belanda dan mempengaruhi mereka agar memihak kepada rakyat. Di samping itu pula dibentuk suatu badan yang disebut "Komite 12" pada tanggal 16 Januari yang beranggotakan semua tokoh-tokoh partai politik

yang ada di Gorontalo pada waktu itu, yaitu: Nani Wartabone dan Kusno Dhanupojo masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua serta anggota-anggota terdiri dari: Sugondo, Usman Monoarfa, Gafar Usu, A.R. Ointu, Usman Tumu, Usman Hadju, A.S. Dhanu, Hasan Badjeber, Oe. H. Buluati dan Sagaf Alhasnie.

Dengan berhasil didudukinya Manado, maka pada tanggal 19 Januari 1942, V.C. memberikan perintah kepada anggota-anggotanya untuk segera melakukan pengrusakan di Gorontalo. Tapi hal ini segera diketahui oleh gerakan rakyat, dan Nani Wartabone segera mengancam pemimpin *Vernelings Corps*, Arsitek Layhart yang waktu itu sebagai kepala *Burgerlijke Openbare Werken (BOW)*, yaitu P.U. sekarang bersama seluruh anggota.

Dengan adanya ancaman yang diadakan oleh gerakan rakyat di bawah pimpinan Nani Wartabone ini, maka pemerintah Hindia Belanda segera mengadakan persiapan untuk menangkap tokoh-tokoh gerakan rakyat, tetapi hal ini sia-sia belaka. Situasi makin gawat, lebih-lebih pada tanggal 22 Januari 1942, di mana telah terjadi pembakaran sebuah kapal motor milik Firma Lasahido, yang menyebabkan amarah rakyat makin meningkat dan segera rakyat mengadakan persiapan untuk menangkap semua orang Belanda yang ada di Gorontalo.

Tepat hari Jumat, tanggal 23 Januari 1942 menjelang subuh, Nani Wartabone telah memelopori pengambil-alihan Residen Corn wakil pemerintah Hindia Belanda bersama stafnya, di mana seterusnya Asisten Residen Corn bersama stafnya dimasukkan ke dalam penjara. Sebelumnya juga *Controleur* Dancona telah ditangkap dan untuk sementara pada pagi hari itu dikurung di Kantor Pos untuk menyaksikan peristiwa yang bersejarah itu. Kemudian setelah Nani Wartabone membawa *Controleur* Dancona ke tangsi, barulah rakyat bubar. Sementara itu segenap anggota polisi kota (*Stads Politie*) dan polisi lapangan yang jumlahnya satu kompi telah mengerahkan dan menggabungkan diri dengan gerakan Wartabone.

Berita pengambil-alihan kekuasaan tersebar luas di kalangan rakyat, dan mendapat dukungan dari lapisan masyarakat yang pada saat itu telah berbondong-bondong menuju halaman kota sebagai pusat gerakan yang dilancarkan. Pada pukul 10.00 Nani Wartabone naik podium dan menyampaikan pidato sebagai berikut, "Mulai hari ini kita telah merdeka. Daerah ini sudah tidak ada lagi pemerintah Belanda. Kita semua yakin bangsa Indonesia akan menguasai negara kita sendiri. Kita semua sudah merdeka". Demikian antara lain pidato yang diucapkan oleh Nani Wartabone yang mendapat sambutan yang gemuruh serta sorak-sorai bersemangat.

Pada saat itu pula lagu Indonesia Raya dinyanyikan, sementara sang Merah Putih dikibarkan di samping podium disaksikan oleh massa rakyat. Selesai pidato dari Nani Wartabone maka diadakan rapat pamong praja yang pertama pada pukul 10.30. Mulai saat itu Gorontalo merupakan daerah pertama yang mencetuskan dirinya sebagai daerah merdeka, yang memiliki status daerah de faktor, serta alat-alat kekuasaan yang riil.

Sebagai lanjutan perjuangan, dibentuk tampuk pemerintahan yang akan menjalankan administrasi, dan pertahanan rakyat yang bertanggung jawab terhadap keamanan. Ratusan orang Belanda yang mengundurkan diri dari Minahasa dan Manado yang mendarat di Gorontalo dapat ditawan. Dan pergerakan politik dari Minahasa yang ditawan Belanda, dapat dibebaskan oleh rakyat Gorontalo. Pemimpin-pemimpin pergerakan yang dibebaskan oleh rakyat Gorontalo itu antara lain: G.B. Dauhan, Jogugu Mokoginta, O.H. Pantow, Max Tumbel dan lain-lain.

4. Peristiwa Jepang di Limboto

Peraturan pemerintah Jepang dalam segala-galanya amat keras sekali, terutama dalam bidang makanan. Di mana-mana diadakan pengawasan yang kuat. Siapa saja yang membawa bahan-bahan makanan dari satu kampung ke lain kampung harus ada surat izin.

Untuk memperoleh surat izin bukan soal mudah. Bermacam-macam pertanyaan harus dijawab, walaupun mendapat surat izin tapi bahan makanan yang dibawa diukur sekedar

keperluan tidak boleh banyak. Usaha rakyat di bidang perdagangan menjadi macet. Rakyat mengungsi dari kota ke tempat-tempat yang jauh yang dianggap aman. Pada suatu waktu di musim panen banyak rakyat terdiri dari anak-anak dan wanita Cina pergi ke sawah untuk mengambil upah memotong padi.

Kemudian beberapa rakyat di bagian distrik Limboto membawa beberapa puluh kg padi dengan tidak mempunyai surat izin. Mereka ini lantas dibawa ke kantor polisi di Limboto untuk diperiksa dan akhirnya padi mereka ditahan. Orang ini memberikan keterangan bahwa mereka di rumah tidak mempunyai makanan, dan padi adalah upah mereka yang didapat beberapa hari mengetam padi. Anak istri mereka sementara mereka tinggalkan pergi makan upah, mereka tidak tahu entah makan entah tidak. Biarlah kami dihukum kalau memang kami bersalah asalkan padi ini jangan ditahan.

Tapi semua keterangan mereka, serta permintaan mereka tidak diterima, malahan mereka dipukul, dan disuruh kembali dengan tangan hampa. Keesokan harinya datanglah mereka ini untuk menghadap kepala polisi A.H. Tangahu untuk meminta agar mereka diizinkan membawa padinya ke rumah, karena sama sekali tidak punya makanan. Tapi permohonan mereka tidak diterima, malahan sebaliknya mereka diusir. Entah karena mereka tidak sabar lagi karena dipukul, maka terjadilah perkelahian dengan senjata di mana kepala polisi tersebut dipukul oleh rakyat dengan senjata sehingga mendapat luka-luka berat. Kemudian mereka ditangkap dan dimasukkan dalam sel, yang beberapa bulan kemudian mereka (lima orang) dihukum pancung kepalanya di Bakia, di antaranya seorang yang bernama Palalu. Ini pertama kalinya terjadi pemancungan di Gorontalo dan di situlah orang banyak dikumpulkan untuk menyaksikan pemancungan itu pada tahun 1942.

D. AKIBAT PERLAWANAN

Dari keempat perlawanan yang diutarakan yang datanya sempat dikumpulkan di daerah Gorontalo, maka pada dasarnya keempat perlawanan itu menemui kegagalan. Namun jika hendak

dicari penyebab utamanya, maka sifat lokal perlawanan-perlawanan itulah yang menyebabkannya. Perlawanan yang terjadi tidak melibatkan seluruh rakyat di daerah tersebut, baik perlawanan terhadap Belanda maupun terhadap Jepang. Memang jika membicarakan perlawanan terhadap Belanda pada tanggal 23 Januari 1942 cukup melibatkan seluruh rakyat. Tetapi itupun masih bersifat lokal dan karena masih tetap ada orang yang kurang bersungguh-sungguh untuk membela atau mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai, tambahan pula kekuatan asing yang menggantikannya jauh lebih besar, maka akhirnya gagal pula. Perlawanan di Sumalata dan Limboto tidak sampai melibatkan seluruh daerah ini dan dapat dikategorikan sebagai semacam gerakan protes sosial. Hal ini jika diingat bahwa perlawanan itu berkobar disebabkan sikap para pejabat kolonial dan yang dinilai sama sekali tidak mau memperhatikan martabat mereka sebagai manusia.

Setelah Panipi ditangkap dan tewas, maka pemerintah kolonial Belanda tetap melanjutkan maksudnya untuk menagih pajak kepada mereka yang dahulunya bukan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa pengorbanan Panipi tidaklah menghasilkan apa yang menjadi tujuan berlangsungnya perlawanan yang dipimpinnya. Demikian pula yang terjadi setelah dipadangkannya pemberontakan di tambang emas Sumalata. Walaupun buruh yang ada pernah melancarkan pemberontakan namun tidak berhasil menghentikan hasrat pemerintah kolonial untuk mengeruk kekayaan alam yang ada di bumi Gorontalo. Pekerjaan dalam pertambangan itu memang terhenti sebentar tetapi kemudian dilanjutkan lagi.

Mengenai akibat yang terjadi sesudah berhasilnya kaum nasionalis di Gorontalo merebut kekuasaan dari tangan kolonialis Belanda pada 23 Januari 1942, maka dapat dikatakan bahwa walaupun untuk beberapa bulan saja, namun kekuasaan asing untuk pertama kalinya dapat direbut dan didirikanlah pemerintahan nasional di daerah itu. Bendera Merah Putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tetapi sayang sekali bahwa hanya beberapa bulan saja, masuklah kekuatan asing yang

baru yakni Jepang ke daerah itu dan menyatakan bahwa pemerintahan nasional diambil alih oleh mereka.

Setelah menguasai Gorontalo, maka semakin lama tentara pendudukan Jepang semakin menunjukkan sifat mereka yang sebenarnya. Mereka bukannya datang untuk membebaskan melainkan turut menambah kesengsaraan rakyat. Pemberontakan yang terjadi di Limboto adalah sebenarnya manifestasi dari rakyat yang tidak mampu menderita lebih lama lagi di bawah kekuasaan imperialis Jepang. Pemberontak dapat ditumpas oleh kekuatan militer Jepang. Hancurnya pemberontakan di Limboto sepanjang diketahui tidak membawa akibat apa-apa terutama bagi kelangsungan kehidupan pemerintahan Jepang yang menguasai daerah itu sampai mereka menyerah kepada Sekutu.

BAB 3 PERLAWANAN DI MINAHASA

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

Ketika bangsa Barat mulai mengarungi Nusantara, maka di Minahasa belum ada seorang pun yang menjadi pemeluk sesuatu agama. Menurut laporan dari seorang paderi Spanyol bernama Bias Palomino tahun 1619, orang Minahasa mempercayai adanya tiga dewa di langit dan tiga dewa di bumi. Jiwa manusia tidaklah mati tapi sekaliannya pergi ke tempat kediaman dewa-dewa Minahasa. Pemerintahan dijalankan secara demokratis. Bahasa Minahasa masih sekeluarga dengan bahasa-bahasa di Filipina. Hasil pertanian di Minahasa seperti padi, bawang, babi, sayur-sayuran, kacang-kacangan, sagu, kelapa, ubi, pisang dan cengkih melebihi yang dihasilkan oleh daerah-daerah lainnya.

Pada tahun 1563 Sultan Hairun dari Ternate mengirimkan armadanya untuk menaklukkan dan mengislamkan daerah Sulawesi Utara yang rakyatnya belum memeluk agama Islam. Armada itu dipimpin oleh Pangeran Baabullah.¹⁾ Portugis yang dalam pada itu telah lama bermukim di Ternate, mengetahui maksud yang dikandung oleh Sultan Hairun di balik pengiriman armada Ternate ke Sulawesi Utara. Apabila rakyat di daerah itu telah memeluk agama Islam, maka tentulah mereka akan lebih menyukai hubungan dengan Ternate daripada membina hubungan dengan Portugis. Karena itu Portugis mengirimkan armadanya pula untuk menggagalkan misi Ternate di atas di mana armadanya itu dipimpin oleh Laksamana Henrique de Sa, yang turut membawa seorang paderi Katolik bernama Diogo de Magelhaes;²⁾ Langkah yang diambil Portugis itu berhasil mencegah maksud Sultan Hairun sekaligus berhasil mempengaruhi Raja Babontehu yang pusat kerajaannya di pulau Manado Tua.³⁾ untuk kemudian masuk agama Katolik. Ia dibaptiskan bersama-sama 1500 rakyatnya. Kebetulan Raja Posumah dari Siau sedang menjadi tamu kerajaan Babontehu. Raja Siau ini pun minta dibaptiskan. Sampai sekarang tahun 1563 diperingati sebagai tahun di mana Injil untuk pertama kalinya diberitakan di Sulawesi Utara di mana

pada tahun itu rakyat Minahasa tidak sempat diislamkan oleh Ternate akibat dihalang-halangi oleh Portugis.

Usaha penginjilan dari paderi Diogo de Magelhaes yang dimulai 1563 dilanjutkan oleh paderi Mascarenhas. Peranan Portugis kemudian diambil alih oleh Spanyol berdasarkan telah dipersatukannya kedua negara itu di Eropa mulai 1580. Dari pangkalan Spanyol di Ternate, dikirimlah pada tahun 1606 sebuah armada pimpinan Christoval Suarez untuk mengikat persahabatan dengan rakyat Minahasa. Usaha ini berhasil dan terjalinlah persahabatan antara mereka dengan salah seorang pemimpin Minahasa bernama Tololiu. Atas dasar persahabatan itu maka Spanyol boleh menjalankan usaha dagang serta menyiarkan agama Katolik di Minahasa.

Tahun 1617, penguasa Spanyol di Ternate bernama Lucas de Vergara Gaviria mengirimkan dua paderi Katolik yang bernama Scialamonte dan Cosmas Pinto yang bekerja selama dua tahun di Minahasa. Atas usaha Scialamonte dan Cosmas Pinto maka beberapa pemuda Minahasa dikirimkan ke Ternate untuk dididik dalam seminarium Katolik yang ada di sana. Kedua orang Spanyol itu kemudian diganti oleh seorang paderi bernama Simi mulai 1620. Sebelum paderi Simi ini tiba, ada seorang paderi Sepanyol bernama Bias Palomino⁴⁾ yang telah mengunjungi beberapa tempat di Minahasa antaranya Manado, Kali, Kakaskasen, Tomohon, Sarongsong, Tombariri, Tondano dan Kema. Di sini terlihat bahwa orang Spanyol bermaksud menjalin persahabatan agar mereka dapat menyebarkan agama Katolik sambil mengadakan kegiatan perdagangan.

Tetapi kemudian mereka selangkah lagi maju di mana Spanyol diizinkan mendirikan benteng di Manado pada tahun 1617.⁵⁾ Di benteng ini ditempatkan pasukan kecil berjumlah 10 anggota. Namun karena tidak mereka peroleh manfaat, apalagi ancaman Belanda yang berpangkalan di Ternate semakin menghebat, maka tidak lama kemudian benteng itu ditinggalkan. Namun pada tahun 1623 mereka kembali mendirikan benteng yang diperkuat dengan 40 serdadu, memenuhi perintah Gubernur Spanyol yang berkedudukan di Manila (Filipina). Tentara-tentara Spanyol yang ditempatkan di benteng di Manado ini, tugasnya adalah

untuk mengamankan perdagangan dan penyiaran agama di Minahasa. Tetapi tingkah laku mereka terhadap rakyat semakin lama semakin tidak senonoh. Mereka seringkali mengadakan perampasan makanan rakyat bahkan banyak kali memperkosa gadis-gadis Minahasa.

Sementara itu Spanyol mendatangkan lagi dua paderi Katolik pada tahun 1639, bernama Yuan Yranzo dan de Alkala, berturut-turut untuk Tomohon dan Kali, dua tempat di pedalaman Minahasa. Tidak lama kemudian de Alkala diganti oleh paderi Lorenzo Garralda yang bersama-sama paderi Yuan Yranzo, bekerja di Minahasa selama lima tahun (1639 - 1644). Kegiatan mereka terhenti akibat pecahnya perang antara Minahasa dan Spanyol, sebagai akibat tindakan orang-orang Spanyol yang saling bertentangan di Minahasa. Sementara paderi-paderi mereka menyiarkan agama Katolik tentara Spanyol melakukan tindakan-tindakan yang sangat menyakiti hati rakyat berupa perampasan dan pemerkosaan. Sesudah terusir dari Minahasa mereka mencoba kembali lagi, tetapi rakyat Minahasa mempergunakan tangan Belanda untuk mematahkan maksud Spanyol itu.

Dengan melalui peristiwa itu maka kedudukan Spanyol di Minahasa digantikan oleh Belanda. Tapi Belanda belum segera menetap di Minahasa, hanya mengaktifkan perdagangan beras dengan perantaraan orang-orang Cina yang berlayar dari Maluku dengan mempergunakan jung (perahu besar). Barulah pada tahun 1657 Gubernur Maluku Simon Cos memerintahkan didirikannya sebuah benteng di Manado. Untuk mengerjakannya maka didatangkanlah tukang-tukang dari Ternate dan Gorontalo juga orang-orang Cina.

Agar tidak timbul salah paham dalam bidang perdagangan maka diadakanlah kontrak yang pertama antara Minahasa dengan Belanda pada 10 Januari 1679. Kontrak itu ditandatangani oleh tiga pemimpin rakyat Minahasa yang disebut *Kapala Walak*, yakni Paat, Supit dan Lonto alias Pedro Ranti. Belanda diwakili oleh Gubernur Maluku R. Padtbrugge. Ternyata kontrak itu kemudian bukan saja meliputi soal perdagangan namun lebih luas

lagi. Atas dasar kontrak itu maka Belanda menafsirkannya sebagai pengakuan Minahasa sebagai taklukan Belanda.

Dalam perjanjian itu rakyat Minahasa akan membantu Belanda dalam soal keamanan, akan memasukkan padi dan beras serta membantu merampungkan pekerjaan pembuatan benteng Amsterdam di Manado. Sebaliknya Belanda berjanji untuk melindungi rakyat Minahasa terhadap serangan dari luar (antaranya dari Spanyol dan bajak laut Mindanao), tidak mengenakan pajak kepada rakyat, tidak akan menuntut penyerahan kayu untuk diekspor dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari ternyata Belanda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian di atas. Minahasa masih tetap diserang oleh bajak laut (1776-1777), Belanda menggunakan orang-orang yang dibenci oleh rakyat Minahasa, perampasan dan penipuan hasil bumi rakyat tidak dicegah oleh pejabat Belanda yang berwewenang.

Hal-hal di atas makin lama makin meresahkan rakyat dan tidak ada usaha sedikit pun dari Belanda untuk mengatasinya, padahal rakyat Minahasa senantiasa melaksanakan kontrak yang telah ditandatanganinya dengan baik. Ketika Belanda harus menghadapi Inggris yang mengancam Minahasa pada awal abad ke-19, rakyat Minahasa diminta bantuannya. Di dalam hal ini rakyat melihat bahwa Belanda tidak mau memperhatikan penderitaan rakyat malahan mengerahkannya apabila mereka dalam kesulitan. Perlawanan rakyat Minahasa yang dipelopori oleh orang Tondano merupakan manifestasi dari rakyat yang dijadikan obyek pemerasan tanpa mau menghiraukan protes-protes dan usul-usul untuk perbaikannya.

Hal demikian terjadi pula di abad ke-20 walaupun dalam bentuknya yang berbeda. Kemerdekaan RI sudah diproklamasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Tapi Belanda yang berdasarkan kekuasaannya sebelum perang, kembali mau menjajah Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Utara. Kaum nasionalis di Minahasa menghimpunkan diri untuk menggalang kekuatan menentang kembalinya Belanda di atas. Belanda mengira bahwa dengan menempatkan pasukan-pasukan mereka yang kebanyakan anggotanya berasal dari Minahasa, maka

tentulah hal itu dapat menenteramkan hasrat rakyat di Minahasa pada khususnya, dan Sulawesi Utara pada umumnya. Sejarah membuktikan bahwa golongan militer yang berjiwa nasionalis dalam tubuh tentara NICA⁶⁾ telah memadukan kekuatan dengan golongan pemuda yang pro Republik untuk merebut kekuasaan yang berhasil pada 14 Pebruari 1946. Latar belakang politik yang dijiwai oleh nasionalisme Indonesia nampak jelas dengan adanya perlawanan ini. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya pernyataan dari para pemimpinnya bahwa Sulawesi Utara adalah bagian dari RI.

B. UJUD PERLAWANAN

Yang diketengahkan dalam bab ini adalah perlawanan yang dilakukan rakyat Minahasa terhadap Spanyol (1644) dan Belanda. Perlawanan rakyat Minahasa dalam zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal ialah "Perang Tondano" mulai 14 Januari 1807 sampai 4 Agustus 1809. Perlawanan yang dilakukan di zaman pemerintahan NICA (Belanda) terjadi pada tanggal 14 Februari 1946⁷⁾ yang berhasil merebut pemerintahan NICA dan digabungkan kepada Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Waktu itu Sulawesi Utara dikuasai para pejuang pro Republik sampai 11 Maret 1946 dan hanya dengan tikaman dari belakang oleh para pengkhianat bangsa, barulah NICA dapat menduduki kembali Minahasa.

Yang diutarakan dan dibicarakan di sini hanya tiga di antara sejumlah perlawanan yang telah terjadi. Perlawanan yang dikobarkan rakyat Minahasa terhadap Spanyol, walaupun hanya berlangsung singkat, tapi telah dapat mengusir kolonialis Spanyol ke luar Minahasa. Untuk mencegah jangan sampai Spanyol kembali lagi, maka rakyat Minahasa menjalankan siasatnya dengan mengundang kehadiran Belanda. Motif perlawanan rakyat Minahasa pada waktu itu ialah untuk mengenyahkan Spanyol yang mempergunakan itikad baik rakyat Minahasa dengan melakukan hal-hal yang sangat merugikan rakyat. Yang paling menyinggung perasaan rakyat Minahasa ialah tingkah laku mereka yang tidak segan-segan merampas makanan rakyat, sehingga dipandang rendah nilai kelakuannya oleh rakyat

Minahasa. Uluran tangan persahabatan dari rakyat Minahasa ternyata dipandang sebagai kelemahan oleh orang Spanyol.

Spanyol bukan saja merampok makanan rakyat untuk keperluan mereka sendiri, tetapi yang paling menyakitkan hati adalah perbuatan mereka memperkosa wanita-wanita Minahasa, yang dapat dikenakan sanksi *kanaramen* (adat istiadat) dengan hukuman mati. Dengan penuh kecemasan rakyat Minahasa yang ramah terhadap tamu itu, melihat perlakuan demi perlakuan yang dialami akibat ketidak-sopanan orang-orang Spanyol itu. Bertentangan dengan perbuatan anggota-anggota militernya, para paderi Katolik bangsa Spanyol yang bekerja sampai di pedalaman Minahasa, senantiasa mengajarkan amal dan perbuatan baik yang bersumber dari ajaran agama Katolik yang mereka bawa.

Para keluarga Minahasa senantiasa dirundung keresahan karena harus menghindari anak-anak gadisnya dari incaran orang-orang Spanyol yang tidak bertanggung jawab itu. Mereka akhirnya mengobarkan perlawanan juga, demi kelangsungan hidup rakyat yang selalu terancam sumber-sumber ekonominya. Dan terutama demi nama baik dan kehormatan wanita yang tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi. Kesabaran rakyat Minahasa mencapai batasnya ketika seorang pemimpin mereka yang ada di Tomohon, dilukai oleh tentara Spanyol. Pertempuran mulai berkobar di Tomohon dan menjalar sampai ke seluruh penjuru Minahasa. Akhirnya Spanyol meninggalkan benteng mereka di Manado akibat tekanan yang dialami dari para *waraney* ⁸⁾ tentara Minahasa.

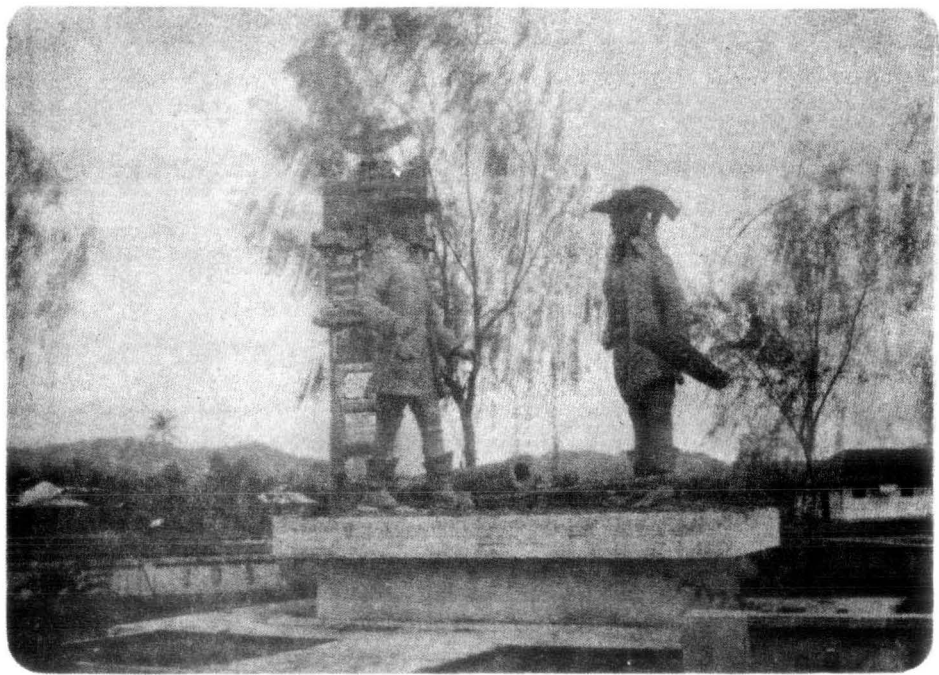
Untuk menjaga agar Spanyol tidak kembali lagi, maka orang Minahasa mengundang kehadiran Belanda yang dalam pada itu sudah bermukim di Ternate (Maluku). Belanda datang tahun 1657 dan mendirikan benteng di Manado. 9) Persahabatan antara rakyat Minahasa dengan VOC (Belanda) dituangkan dalam perjanjian 10 Januari 1679 yang beberapa kali diperbaharui kembali. Tapi lama kelamaan ternyata Belanda seringkali menyalah-gunakan perjanjian yang dibuatnya dengan rakyat Minahasa. Kelakuan yang serakah dari beberapa oknum pejabat

Belanda mengakibatkan kerugian yang diderita dan menambah kesengsaraan rakyat Minahasa. Beberapa pemimpin rakyat yang hanya mementingkan diri sendiri berkomplot dengan Belanda, yang semakin menambah kebencian dan kemelaratan rakyat.

Para pemimpin rakyat Minahasa mengadakan permusyawaran beberapa kali di **Batu Pinawetengan** 10), suatu tempat yang bersejarah yang sejak zaman nenek moyang, dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam pertemuan itu ditekankan untuk tidak membiarkan kejahatan yang dilakukan Belanda lebih lama lagi. Dengan dipelopori oleh rakyat Tondano, pecalah perang antara rakyat Minahasa melawan Belanda.

Ketika rakyat Minahasa menandatangani perjanjian persahabatan dengan Belanda, yang diperbaharui beberapa kali, antara lain Belanda berjanji bahwa akan melindungi Minahasa dari serangan bajak laut Mindanao yang seringkali menimbulkan kerugian besar kepada rakyat. Tapi ternyata Belanda tidak mampu atau sengaja lalai dalam perlaksanaan janji itu di mana perampokan dan pembunuhan serta pemerkosaan tetap berlangsung. Dengan demikian salah satu motif perlawanan waktu itu ialah untuk menghancurkan kekuasaan kolonial yang gagal melaksanakan janjinya untuk melindungi keselamatan rakyat Minahasa.

Dengan segala siasat licik Belanda mampu mempertahankan diri untuk menguasai Indonesia termasuk Minahasa. Kekuasaan mereka berakhir pada tahun 1942 ketika Jepang datang menyerbu dan berhasil menduduki Minahasa serta kemudian juga seluruh Indonesia. Penderitaan rakyat dalam masa pendudukan Jepang berakhir ketika mereka pada tahun 1945 menyerah kepada pihak Sekutu. Atas dasar kekuasaannya sebelum berkobarnya peperangan, maka Belanda mau kembali menjajah Indonesia. Kaum nasionalis menganggap bahwa kembalinya Belanda merupakan rongrongan terhadap jiwa dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di Minahasa kaum nasionalis mulai menyusun kekuatan di bawah



tanah untuk mempertahankan proklamasi. Yang menjadi intinya adalah golongan pemuda yang tergabung dalam dua organisasi utama yakni PPI dan BPNI. 11) Mereka berhasil menarik beberapa anggota militer NICA yang diketahui pro Republik.

Dengan bersatu padunya golongan pemuda dan golongan militer yang pro Republik itu maka kekuasaan NICA di Sulawesi Utara berhasil ditumbangkan dan segera dinyatakan bahwa wilayah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Republik Indonesia. Di sini terlihat jelas bahwa motif politik memegang peranan utama yang dinyatakan dari tingkah laku kaum nasionalis yang bergerak dan berjuang untuk menegakkan kekuasaan nasional yang sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Wilayah Sulawesi Utara secara geografis lebih jauh letaknya dengan daerah-daerah lain di sekitar Jawa dan Sumatera. Namun faktor geografis tidaklah menjadi halangan untuk berjuang mempertahankan Republik.

Dalam suatu rencana perlawanan yang dilaksanakan dengan rapi dan berhasil, maka pada tanggal 14 Februari 1946, rakyat Minahasa yang dipelopori oleh golongan pemuda dan golongan militer yang pro Republik, berhasil merebut kekuasaan dari tangan NICA (Belanda). Para pemimpin waktu itu antaranya ialah : Letkol Ch.Ch Taulu, Mayor S.D. Wuisan, Residen B.W. Lapien, John Rahasia dan kawan-kawannya. Tetapi perjuangan mereka 24 hari kemudian digagalkan oleh kaum pengkhianat yang dikepalai oleh Kapten J. Kaseger yang pro Belanda. Pemerintahan NICA dapat berdiri kembali melalui pengorbanan dari para pejuang kemerdekaan, yang telah gugur demi membela kehormatan bangsanya.

C. JALAN PERLAWANAN

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, data perlawanan rakyat Minahasa yang berhasil dikumpulkan yakni perlawanan rakyat terhadap Spanyol 1644, perlawanan rakyat pada 1807-1809 terhadap kekuasaan Hindia Belanda, dan perlawanan yang berhasil merebut kemerdekaan dari tangan NICA (Belanda) tahun 1946. ketiga perlawanan dimaksud itulah yang akan diuraikan berturut-turut di bawah ini.

1. Perlawanan Rakyat Minahasa Terhadap Spanyol 1644

Ketika Portugis melalui para pekabar Injilnya mulai menetap di Minahasa pada tahun 1563, maka rakyat Minahasa menyambut mereka itu dengan ramah tamah sebagai tamu. Agama Katolik yang mereka bawa segera dianut oleh rakyat di beberapa tempat. Dengan munculnya Spanyol pada tahun 1521 di Nusantara 12) maka terjadi persaingan dan perebutan pengaruh antara kedua bangsa Eropa itu. Persaingan itu dilakukan pula dengan Kesultanan Ternate yang menganggap bahwa wilayah Sulawesi Utara adalah bagian dari kerajaannya. Persaingan Portugis dan Spanyol itu berakhir tahun 1580 sejalan dengan dipersatukannya kedua bangsa itu di bawah satu tampuk pemerintahan di Eropa. Belanda muncul dan berhasil membina hubungan persahabatan di Maluku. Mereka mengusir kekuatan Spanyol pada tahun 1613, sehingga Spanyol mengundurkan diri dan bertahan di Sulawesi Utara yang sebelum itu telah dijalinnya persahabatan dengan rakyat Minahasa mulai tahun 1606.

Misi Portugis dalam bidang penyiaran agama Katolik diambil-alih oleh Spanyol. 13) Banyaklah paderi Spanyol yang bertugas sampai di pedalaman Minahasa. Juga Spanyol diizinkan mendirikan benteng di Manado. Paderi-paderi Spanyol berhasil menarik rakyat Minahasa sehingga banyak di antaranya yang memeluk agama Katolik. Tapi persahabatan yang terjadi antara Minahasa dan Spanyol makin lama makin disalahgunakan oleh Spanyol sendiri. Selain mereka menempatkan paderi-paderi, Spanyol juga menugaskan sejumlah tentaranya di Minahasa. Mereka berkeliaran di seluruh pelosok Minahasa dan mulai melakukan tindakan yang tidak disukai rakyat.

Penempatan pasukan militer Spanyol di Minahasa dilakukan sesuai perintah Gubernur mereka yang berkedudukan di Filipina . Perintah itu dikeluarkan pada tahun 1617 yang dengan itu Spanyol menempatkan 10 anggota militer di Manado. Di tempat itu mereka diizinkan mendirikan benteng, tetapi tidak lama kemudian benteng itu ditinggalkan tanpa sebab yang jelas. Barulah pada tahun 1623 mereka kembali lagi ke Manado. Dalam benteng di Manado ditempatkan kekuatan militer yang lebih besar lagi yakni sebanyak 40 tentara. Penempatan kekuatan militer

Spanyol ini mungkin sekali dilakukan bersamaan dengan langkah serupa yang mereka lakukan di Siau. Di kerajaan itu mereka mendirikan dua buah benteng, berdasarkan perjanjian antara kerajaan Siau (Raja Don Jeronimo Winsulangi) dengan Gubernur Spanyol di Manila (Filipina) pada tahun 1593.

Sejak mereka berada di Minahasa, Spanyol membina hubungan dagang dengan membeli hasil bumi antara lain beras dan kelapa. Dan sebagai gantinya mereka memasukkan barang-barang seperti gerabah, kain-kain, termasuk alat-alat militer seperti topi dari kuningan. Perdagangan itu berjalan lancar bersamaan dengan usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh paderi-paderi mereka.

Namun ada satu hal yang mereka lakukan yang menyakiti hati rakyat Minahasa. Tentara-tentara yang ditempatkan dalam benteng di Manado, seringkali mengadakan perjalanan sampai ke pedalaman. Di daerah pedalaman mereka kerap kali mengadakan tindakan kekerasan, dan merampas bahan makanan rakyat. Pada waktu itu daerah Minahasa memang sering menjadi sasaran serangan perampokan yang dilakukan oleh bajak laut Mindanao dari Filipina. Mereka datang dan rakyat menyadari mereka sebagai musuh yang harus dihindari atau dihadapi dengan penuh kepahlawanan. Tidak demikian halnya dengan Spanyol yang selama ini dianggap sebagai sahabat. Alangkah terperanjatnya rakyat Minahasa ketika melihat bahwa orang-orang Spanyol ini pun tidak bedanya dengan bajak laut yang datang hanya untuk merampok bahan makanan rakyat.

Amarah rakyat Minahasa makin meluap lagi karena bukan saja Spanyol merampas bahan makanannya, tetapi juga para gadis Minahasa menjadi sasarannya juga. Mereka datang ke desa-desa dan mengambil begitu saja gadis-gadis yang mereka temui. Tindakan ini adalah pelanggaran tata susila yang sukar dimaafkan begitu saja. Keramahtamahan yang menjadi ciri khas rakyat Minahasa telah mereka salahgunakan untuk mengejar hawa nafsu di kalangan oknum-oknum militer Spanyol itu. Pelanggaran tata susila di atas merupakan pelanggaran adat istiadat (*kanaramen*)¹⁴⁾ yang telah berurat dan berakar dalam

masyarakat Minahasa, di mana pelanggaran kehormatan merupakan tindakan yang harus dikenakan hukuman yang setimpal.

Tindakan-tindakan yang semakin lama semakin merugikan rakyat Minahasa, lama kelamaan menumpuk menjadi kebencian yang ditujukan kepada semua orang Spanyol yang ada di Minahasa. Bukan saja mereka melakukan perampasan bahan makanan serta pemerkosaan, tapi mereka tidak segan-segan pula bertindak kejam terhadap rakyat bahkan terhadap pemimpin pula. Perlawanan terhadap mereka justru pecah ketika tentara Spanyol yang berada di pedalaman Minahasa, memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Rakyat menganggap bahwa perbuatan itu sudah keterlaluan dan menurunkan martabat dan harta diri pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyat. Perlu diketahui bahwa adat istiadat Minahasa pada waktu itu mengharuskan seorang pemimpin menduduki jabatannya secara demokratis yaitu melalui suatu pemilihan di antara paraarganya.

Perlakuan Spanyol yang dianggap tidak lagi menghargai nilai persahabatan dengan rakyat Minahasa ini, bahkan berani berlaku kejam terhadap pemimpin yang diangkat oleh rakyat, menyebabkan rakyat Minahasa mengangkat senjata terhadap mereka. Mulai di Tomohon, tentara Spanyol harus berperang dengan rakyat Minahasa yang sudah lama menumpuk kebencian terhadap diri mereka. Di mana-mana orang-orang Spanyol itu terdesak dan akhirnya bertahan di benteng Manado. 15) Serangan dan pengepungan yang dilakukan oleh rakyat Minahasa terhadap benteng Spanyol itu menyebabkan mereka kehabisan bahan makanan sehingga terpaksa memutuskan untuk meninggalkan Minahasa. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap kekuasaan Spanyol yang terjadi tahun 1644 itu, berhasil dimenangkan oleh rakyat. Mulai saat itu rakyat Minahasa terbebas dari kungkungan kaum kolonialis Spanyol. Dan untuk mencegah jangan sampai Spanyol datang dengan balabantuannya, maka rakyat mengadakan persahabatan dengan Belanda.

Persahabatan itu dimulai tahun 1657. Tiga orang utusan rakyat Minahasa kemudian hari menandatangani perjanjian persahabatan dengan VOC (Belanda) pada tanggal 10 Januari

1679. Kehadiran militer Belanda yang mendirikan bentengnya di Manado tahun 1657, langsung di bawah pimpinan Gubernur Simon Cos dari Ternate. Sebelum itu Spanyol pernah datang menyerang Minahasa di bawah pimpinan Bartolomeo de Souisa. Namun mereka terpaksa meninggalkan Minahasa. Karenanya untuk mencegah jangan sampai hal itu terulang, maka rakyat Minahasa membina persahabatan dengan Belanda.

2. Perang Tondano 1807 – 1809

Kontak resmi untuk pertama kalinya antara rakyat Minahasa dengan VOC dibuktikan dengan adanya "Perjanjian Persahabatan" 10 Januari 1679 antara kedua belah pihak. 16) Isi perjanjian itu antara lain menetapkan kewajiban kedua belah pihak dalam bidang perdagangan. Rakyat Minahasa diwajibkan menyerahkan kayu, ijuk dan beras kepada VOC dan sebagai gantinya maka dimasukkan barang-barang keperluan hidup sehari-hari seperti pakaian (tekstil) dan alat rumah tangga. Pengumpulan beras dan sebagainya itu dipercayakan kepada empat dari 26 pemimpin rakyat Minahasa yang disebut *Kapala Balak*. Mereka ialah Kapala Balak Tomohon, Tonsarongsong, Airmadidi dan Tontemboan (Tompakewa). *Balak* atau *Walak* adalah wilayah yang berada di bawah Kapala Balak. Wilayah ini pada pertengahan abad ke-19 disamakan dengan distrik.

Badan yang dibentuk VOC untuk menyelenggarakan pengumpulan dan pengiriman hasil-hasil di atas disebut *Gecommitteerden* yang terdiri dari tiga petugas Belanda (*Koopman*, *Onderkoopman* dan *Boekhouder*) dan empat petugas yaitu keempat Kepala Balak di atas. Komisi ini bertanggung jawab kepada Residen Belanda yang berkedudukan di Manado untuk selanjutnya kepada Gubernur Maluku. Karena pengawasan yang kurang ketat maka keempat Kepala Balak di atas dapat mengeruk kekayaan pribadi. Barulah pada tahun 1710 hal ini disadari oleh VOC sehingga keempat Kepala Balak itu dibebaskan dari tugas-tugas komisi yang kemudian hanya berfungsi sebagai pemimpin rakyat seperti sebelumnya.

Menjelang akhir abad ke-18, seorang bernama Puluwang yang berasal dari Bantik menghasut rakyat agar memberontak.

Latar belakang maksud pemberontakan tidaklah jelas diketahui, tapi karena hal itu ia ditangkap, diadili dan dibuang ke luar distrik Batik. Waktu itu yang menjadi Residen ialah J.D. Schierstien (1780-1791). Namun kemudian, Puluwang menggunakan akal dengan berpura-pura masuk agama Kristen dan dibaptiskan dengan nama Urbanus Mattheosz. Ia mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Belanda serta menunjukkan pengabdian kepada VOC, sehingga ia berhasil mendekati Residen bahkan menjadi tangan kanannya dalam urusan penagihan hasil bumi yang menjadi bagian tugas *Gecommitteerden* di atas 17).

Pengaruh Puluwang ini semakin lama semakin besar terhadap Residen sehingga dengan mudah ia mempergunakan kewibawaan Residen untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ia memperoleh keuntungan yang besar dari *Gecommitteeren* bahkan siapa yang hendak menemui Residen harus membayar uang kepadanya. Rakyat Minahasa mengalami pemerasan yang luar biasa akibat tindakannya bersama para anggota Komisi itu. Karenanya rakyat mengatakan bahwa lebih baik mereka melihat perampok (bajak laut) Mindanao datang dari pada Komisi. Harta benda dapat disembunyikan atau dilarikan terhadap bajak laut tetapi terhadap Komisi, harta benda rakyat harus diantarkan sendiri. Hal ini mengungkapkan betapa tertindihnya rakyat akibat praktek-praktek pemerasan yang dialami mereka waktu itu. Karena itu rakyat sengaja lalai mengerjakan sawah dan ladangnya atau mengumpulkan hasil hutan berupa kayu dan ijuk di atas, sebab makin banyak hasilnya makin banyak pula yang harus diserahkan kepada para petugas Komisi di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar hasil yang dikumpulkan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. VOC menderita kerugian besar sebab nilai hasil-hasil dari Minahasa berkurang pesat tanpa mereka mampu mencegahnya. Gubernur Maluku Alexander Cornabe sengaja datang dan berunding dengan rakyat Minahasa pada bulan Juli 1790. Tapi walau harga pembelian hasil bumi sudah dinaikkan, namun keuntungan VOC tidak pernah menunjukkan perbaikan.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau para petugas komisi datang, rakyat setempat harus menyambut mereka dengan pesta

yang meriah. Karena itu alangkah marahnya komisi itu terutama Puluwang ketika mereka pada suatu hari pergi ke Tondano. Seorang kepala desa (*Hukum Tua*) bernama Pangalila merasa prihatin dengan nasib yang menimpa rakyat akibat pemerasan bertahun-tahun yang dilakukan Puluwang dan komisi tersebut. Karena itu Pangalila menyambut kedatangan mereka dengan dingin. Puluwang tersinggung, sehingga ia mencari jalan untuk menjatuhkan Hukum Tua Pangalila dari jabatannya itu. Waktu itu hasil bumi dari Toulour (sekitar danau Tondano) dikumpulkan dulu baru diserahkan kepada Kepala Balak Tonsea. Pangalila terlambat mengumpulkannya sehingga hal ini dijadikan alasan bagi Puluwang untuk menangkapnya. Pangalila karena sebab-sebab yang tidak diketahui ternyata tewas dalam tahanan di Manado. 18)

Seorang Hukum Tua lainnya di Tondano bernama Sumondak bersimpati dengan nasib yang dialami Pangalila. Ia pergi ke Manado dan mengatakan bahwa semua orang Tondano yang berada di Manado dipanggil pulang ke desa asalnya. Para kepala desa (*Hukum Tua*) masa itu berada di bawah seorang pemimpin yang disebut *tonaas*. Kata Sumondak bahwa *tonaas* di Tondano meminta agar semua rakyatnya pulang. Berita itu terdengar oleh Residen tetapi maksud panggilan pulang tidak diketahuinya. Residen mencium bahaya sehingga memerlukan datang ke Tondano. Tiga kali Residen mengundang agar seluruh rakyat hadir untuk mengadakan pertemuan dari hati ke hati dengannya, tetapi maksudnya itu tidak tercapai untuk mengajukan perasaan rakyat Tondano. Residen Schierstein pulang ke Manado tanpa hasil.

Barulah beberapa waktu kemudian Residen mengetahui apa sebab rakyat Tondano berdiam diri tidak mau mengemukakan isi hati kepadanya dalam tiga kali pertemuan. Ia menerima informasi bahwa orang Tondano sudah bersekutu dengan orang Langowa, Tompasso dan Kawangkooan untuk memerangi orang-orang yang jelas memihak Belanda. Residen pergi ke Tondano, diundangnya rakyat untuk bertemu tetapi rakyat tetap bersikap dingin dan berdiam diri saja. Residen menyangka bahwa kata-katanya

berhasil menentramkan hati rakyat sehingga ia pulang dengan tenang ke Manado.

Keresahan yang terpendam di kalangan Tondano terus berlangsung di bawah Residen G.F. Durr yang menggantikan Schierstein tahun 1791. Puluwang terus dipergunakan oleh residen baru ini sebagai juru bahasa dan perantara dengan rakyat Minahasa. Karena kecerdikannya mempengaruhi Durr, maka residen itu menggelarnya *Vader en Commandant der Minahasa* atau Bapak dan Komandan orang Minahasa. Kesengsaraan rakyat Minahasa di bawah Durr tidak berkurang malahan menjadi lebih hebat. Pemerasan berlangsung tanpa mampu dielakkan. Irian-iringan pedati Puluwang sarat oleh beras, babi dan hasil-hasil lainnya dari pedalaman Minahasa sebagai hasil pemerasan. Akhirnya Residen mendengar berita bahwa para pemimpin dan rakyat Minahasa hendak mengobarkan pemberontakan terhadap Belanda.

Untuk menanggulangi ancaman pemerasan lebih lanjut maka para Kepala Balak mengadakan permusyawaratan rahasia di suatu tempat yang terkenal dengan nama *Batu Pinawetengan un Nuwu* di dekat Langowan (Minahasa Tengah). Dalam pertemuan itu pembicaraan hanya berkisar pada kejahatan yang dilakukan Puluwang yang dilindungi terus oleh Durr. Kemudian yang hadir sepakat mengobarkan pemberontakan untuk menghentikan praktek pemerasan lebih lanjut yang sangat merugikan seluruh rakyat Minahasa. Berita tentang maksud mengadakan perlawanan sampai ke telinga Durr. Ia sangat takut dan mulai sadar bahwa sangat berbahaya baginya kalau melindungi Puluwang. Namun kepribadiannya terlalu lemah untuk bertindak menghukum orang itu. Dengan bermuslihat tanpa sepengetahuan Puluwang, maka Durr mencoba mengundang para Kepala Balak yang mau mengobarkan perlawanan itu untuk berunding di Manado. Tapi mereka tidak mau bertemu dengan residen di Manado. Residen bertanya tempat mana yang disetujui untuk dijadikan tempat perundingan. Mereka menjawab setuju kalau diadakan di Tomohon.

Sementara itu untuk mencegah dilangsungkannya pertemuan di Tomohon, maka Puluwang menyebarkan desas desus bahwa

residen akan datang dengan sejumlah tentara untuk mengadakan penangkapan terhadap diri para Kepala Balak. Kepada residen ia melaporkan bahwa para Kepala Balak sudah bersepakat untuk membunuh Durr di mana saja sehingga berbahaya untuk menghadiri pertemuan di Tomohon. Tapi fitnahan dan siasat yang dijalankan Puluwang tidak berhasil. Pertemuan di Tondano berlangsung juga. Dalam pertemuan itu para Kepala Balak mengeluarkan isi hatinya yang sangat membenci Puluwang. Puluhan tahun lamanya ia melakukan pemerasan yang mengakibatkan penderitaan dan kemelaratan di kalangan rakyat.

Sepulangnya dari pertemuan, Residen Durr bukannya bertindak untuk menjerihkan persoalan atau memperhatikan keluhan yang didengarnya di Tomohon. Durr malah memecat Kepala Balak Negeri Baru bernama Agustijn Karinda dan Kepala Balak Paslaten Tomohon bernama Loho. Durr mempergunakan pasukan orang Ternate untuk menyerbu dan membakar desa Atep yang berada di bawah Hukum Tua Gerrit Wuisang, juga desa Kapatrang yang semuanya di wilayah Walak tondano.

Situasi internasional waktu itu turut berpengaruh pula di daerah ini. Tahun 1795 Perancis menduduki Negeri Belanda dan mendirikan Republik Bataf. Dengan sendirinya pula Indonesia langsung berada di bawah kekuasaan baru ini. Karena permusuhannya dengan Perancis maka Inggris mengancam Indonesia yang pada kenyataannya diperintah oleh Republik Bataf buatan Perancis. Tahun 1801 munculah suatu armada kapal perang Inggris di depan pelabuhan Manado. Residen Durr karena kelemahan pribadinya serta merta menyerahkan diri lalu langsung diakui Inggris sebagai residen. Tahun 1802 Residen Durr yang menyerah kepada Inggris diganti oleh Residen C. Ch. Prediger. Tahun 1806 sekali lagi armada Inggris muncul di Manado. Mereka membakar sebuah kapal di pelabuhan dan mengirim ultimatum agar Residen Prediger menyerah. Angkatan laut Inggris itu dipimpin oleh Commandant C. Elphinstone. Prediger menjawab ultimatum bahwa ia tidak mau menyerah begitu saja seperti halnya Durr pada tahun 1801. 19)

Langkah pertama Prediger adalah memobilisasi 2000 pemuda Minahasa yang akan dilatih, dipersenjatai kemudian berperang

melawan Inggris. Perintah mobilisasi itu diselewengkan oleh Puluwang. Ia mengatakan bahwa para pemuda itu akan dipakai untuk menagih hutang hasil bumi yang belum diserahkan semasa pemerintahan Residen Durr dulu. Dengan cepat berita ini membakar kemarahan rakyat Minahasa.

Sebanyak 15 dari 26 Kepala Balak bersekutu untuk memerangi Belanda. Langkah menentukan ke arah pelaksanaan pemberontakan telah diambil. Diadakanlah pertemuan rahasia terakhir pada pertengahan tahun 1806 yang dihadiri oleh para Kepala Balak dari Tondano, Kakas, Langowan, Sonder, Tompas, Kawangkoan, Pasan, Ponosakan dan Tonsawang. Juga hadir dari Remboken, Kakaskasen, Tomohon, Sarongsong, Rumoong dan Tombasian. Sembilan Kepala Balak yang disebut pertama akan menyerahkan rakyat mereka untuk turut di medan laga sedang enam lainnya yang tersebut terakhir akan membanru secara diam-diam. Adapun hasil lengkap siasat yang diatur dalam perundingan itu yakni :

- a. Perlawanan dipusatkan di tengah rawa di pesisir barat danau Tondano di mana akan didirikan benteng;
- b. Pasukan inti seluruhnya terdiri dari orang Tondano;
- c. Urusan perbekalan makanan menjadi tanggung jawab orang Kakas, Langowan, Tompas, Kawangkoan, Sonder, Pasan, Ratahan, Ponosakan dan Tonsawang;
- d. Tugas memata-matai di sekitar Amurang diserahkan kepada orang Rumoong dan Tombasian; di Manado diserahkan kepada orang Kakaskasen, Sarongsong, Klabat, Tomohon dan Ares;
- e. Gudang perbekalan dipusatkan di Poso dan dari sana akan dibawa oleh orang Remboken dan Kakas dengan perahu di waktu malam;
- f. Orang Kakaskasen, Tomohon, Sarongsong, Rumoong dan Tombasian harus mencuri atau merampas senjata lengkap dengan amunisinya namun harus jangan sampai ketahuan musuh;
- g. Senjata api dan kelengkapannya yang berhasil diperoleh harus tiba ke tangan orang Tondano melalui rute Kawang-

koan, Tompaso, Langowan, Paso lalu langsung ke benteng Moraya;

- h. Rakyat dari 15 Walak yang bersekutu harus bersama-sama mendirikan benteng dimaksud dari bahan kayu dan bambu;
- i. Kalau orang Tondano akan menembak maka akan diberikan suatu tanda disertai teriakan *Kumuru Maasa*, yang artinya "Merunduklah hai orang Minahasa", maksudnya agar jangan sampai terkena peluru nyasar;
- j. Yang menjadi panglima perang adalah Korengkeng dan Sarapung, keduanya dari Tondano.

Suasana di Minahasa pada waktu itu amat rawan, terutama bagi kelangsungan kekuasaan Belanda di sini. Ancaman Inggris dari laut sewaktu-waktu dapat tiba berupa serangan kapal perang dan pendaratan untuk merebut daerah ini melalui Manado sebagai tempat kedudukan Residen Belanda. Akhir tahun 1806 kedua belah pihak merampungkan persiapan militer. Pasukan perlawanan berhasil mendirikan benteng Moraya di kompleks berawa paya di pesisir barat danau Tondano. Sekeliling benteng diberi ranjau dari bambu yang ditajamkan. Usaha pendekatan pihak musuh dari segala jurusan dengan mudah dapat diketahui oleh pasukan yang bertahan di benteng itu. Prediger memobilisasi 2000 pemuda, dilatih dan dipersenjatai untuk menghancurkan perlawanan dari sekaligus untuk menghadapi datangnya serangan Inggris.

Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bulan Januari 1807, Prediger mulai mengerahkan pasukannya. Sebagai komandan ialah Kapten Hartingh dibantu oleh J. Wenderstijd. Pasukan terdiri dari orang Belanda, Borgo, Ternate dan orang-orang Minahasa yang memihak Belanda. Ribuan pasukan dikerahkan masuk ke pedalaman Minahasa untuk memerangi orang Tondano yang bertahan di sana. Rakyat dari para Kepala Balak yang menjadi sekutu orang Tondano turut pula berpura-pura membantu mengangkut senjata, amunisi dan perbekalan perang lainnya. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh mereka dengan mencuri, merampas dan melarikan sejumlah besar senjata. Sebelum pasukan pimpinan Kapten Hartingh itu tiba,

senjata - senjata dan perlengkapan lainnya telah di tangan pasukan perang orang - orang Tondano. Pasukan - pasukan Belanda terdiri dari orang Belanda, *'burger* atau borgo, orang Ternate dan laskar tolongan, yang dikepalai oleh seorang Kapten Belanda yaitu Frans Willem Hartingh. 20) Markas pusat dari pasukan Belanda adalah di Manado yaitu di benteng Fort Amsterdam.

Pusat pertahanan rakyat Tondano yaitu di bagian barat danau Tondano di hulu sungai Temberan (sekarang danau Tondano) di mana telah didirikan dua buah benteng ialah benteng **Moraya** dan **Paapal**.

Lokasi ini adalah suatu tempat yang strategis, karena memiliki dua sifat perang yaitu bisa bertempur di perairan danau dan bisa di darat. Perang di perairan danau memang disiapkan oleh rakyat Tondano, karena mereka memiliki perahu yang ratusan jumlahnya.

Persenjataan rakyat, adalah tombak, senjata tajam seperti keris dan pedang (*Santi*) serta meriam. Sedangkan pihak Belanda peralatan perangnya selain bedil dan meriam, juga menggunakan rakit-rakit dan kora - kora yang didatangkan dari Ternate, kemudian diangkut ke danau Tondano dengan dipikul oleh orang-orang yang bagaikan semut dan secara bergiliran melalui jarak kira-kira 30 km.

Adapun pimpinan perang dari rakyat Tondano ialah Panglima Korengkeng dan Panglima Sarapung. Dengan tempik sorak para utusan menunjuk kepala walak Korengkeng dan Sarapung dari Taouliang dan Taoulimambot sebagai Pimpinan Umum peperangan yang akan dihadapi dengan Prediger dengan pembantu-pembantunya. Sedangkan beberapa orang lagi di antaranya Tewu, Matulandi, Sumondak, Item, Walintukan, Komimbun dan Rumapar selain mendapat tugas-tugas khusus atau bagian-bagian, mereka pula diharuskan membantu kedua panglima tadi. Tewu, selain pembantu Pimpinan Umum, ditugaskan pula untuk mengepalai perbentengan Moraya. Rumapar ditugaskan sebagai komandan pasukan penyerbu, mengadakan pertempuran di luar perbentengan/ di perkampungan musuh sampai ke kota Manado 21)

Penyerangan-penyerangan pasukan Belanda yang telah dilancarkan sejak awal tahun 1807 ke markas pertahanan rakyat Tondano yaitu perbentengan dan di danau, walaupun telah menjelang tahun kedua, belum juga membawa hasil, sebab pertahanan rakyat Tondano cukup kuat.

Kedua belah pihak mengalami pasang - surut dalam kemenangan dan kekalahan, demikian pula korban dari masing - masing pihak tak terhindarkan. Rumapar, gugur sebagai patriot yang gagah berani ditembus peluru Belanda.

Periode perang ini, diselang-seling dengan usaha mengajak berunding oleh pihak Belanda, tetapi yang selamanya ditolak oleh pimpinan perang. Namun tak dapat disangkal bahwa ada pula segelintir pemuka pribumi Minahasa yang sudah dapat dirangkul oleh Belanda melalui perundingan dan janji untuk diberi kedudukan dan lain-lain.

Suatu siasat Belanda yang turut melemahkan pihak pertahanan pasukan Tondano, yaitu mereka melepaskan beberapa ekor burung merpati dengan sumbu api yang diikatkan pada kaki burung-burung itu, lalu terbangnya diarahkan ke perkampungan dan berbentengan pasukan Tondano, sehingga menimbulkan kebakaran di rumah-rumah yang beratapkan daun rumbia dan ijuk. Bahaya kebakaran ini mengganggu dan melemahkan daya tempur pasukan yang sedang bertahan. 22)

Pada 31 Juli 1807, residen Prediger berhubung sakit dipanggil ke Ternate, kemudian terus ke Belawi. Ia diganti oleh residen Balfour, yang datang bersama-sama Kapten Lodewijk Weintre serta tambahan alat perang dan serdadu bantuan beberapa ratus dari Ternate. Pada 2 Agustus 1809 berangkatlah balatentara yang banyak itu dipimpin oleh Kapten Weintre menuju Tondano; tanggal tiga Agustus segala persiapan dilaksanakan, sebab pada tanggal 4 Agustus, akan dimulai penyerangan besar-besaran. Perahu dan rakit, kora-kora yang ratusan banyaknya disiapkan oleh pasukan Belanda.

Disegala pihak, benteng dan Kampung Tondano dikepung rapat-rapat sehingga bantuan dari luar tak dapat masuk. Meskipun demikian Kawanua segaris pun tak ada hatinya akan

menaikkan bendera putih. Lebih baik mati dari pada menarik sumpah.

Tanggal 4 Agustus 1809 perang pun dimulai lagi dengan serangan pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Weintre menuju benteng Moraya. Bunyi bedil dan meriam bersahut - sahutan. Perahu dan kora-kora pasukan Belanda banyak yang hancur dan tenggelam.

Meskipun demikian balatentera Belanda makin cepat majunya, seraya dari segala pihak benteng Moraya dan Paapal dikepung serapat-rapatnya. Kawanua bertambah juga keberaniannya, sedikit pun tak ada getar. Mereka menentang musuh yang banyak itu.

Matahari telah miring, hari telah petang, kekuatan pasukan Tondano belum juga berkurang, malah bertambah ramainya menembak. Pasukan Belanda agaknya tak mau menunda perang itu sampai besok. Sudah pukul 8, pukul 10 pukul 12 tengah malam, perang pun belum juga berhenti. Hanya kekalahan telah miring kepada pasukan Tondano, sebab alat perangnya makin habis. Kira-kira pukul dua tengah malam, kawanua melepaskan tembakan yang terakhir. Pasukan Belanda pun naiklah berlumba-lumba memanjat benteng Moraya dan Paapal. Dengan kekuatan pedang pasukan Tondano mencoba lagi melawan sampai bertewasan sana sini. Darah pun mengalirlah laksana air, mayat pun bertimbunan, yang melawan terus ditembak atau dipancung, sedang yang tidak berdaya lagi ditawan.

Beberapa menit kemudian perang pun padam. Dalam perang ini gugurlah sebagian patriot, kedua panglima perang Korengkeng dan Sarapung yang gagah berani itu.

Di antara laskar Tondano yang gugur kedapatanlah beberapa pahlawan wanita yang berani mati mempertahankan tanah airnya. Yang ditawan banyak, tetapi yang berhasil meloloskan diri banyak pula. Pahlawan-pahlawan yang ditawan dibuang ke beberapa tempat. Yang ringan hukumannya dibuang ke Tikala Manado, sedang yang berat dibuang ke Ternate dan Banda. 23)

Mengenai berakhirnya Perang Tondano ini pada awal Agustus 1809, dr. E.C. Godee Molsbergen dalam bukunya

"*Geschiedenis van de Minahassa tot 1829*" melaporkan sebagai berikut :

"*De Inname van Tondano had plaats in den nacht van 4 op 5 Augustus. De dappere tegenstand tegen een overmacht had den Tondaners niet gebaat. Kapitein Weintre zond aan den onderprefect Balfour een uitvoerig geschrijven over het wapen feit.*"²⁴⁾

artinya : "Jatuhnya Tondano terjadi pada malam hari tanggal 4 menjelang 5 Agustus. Perlawanan pasukan Tondano yang gagah berani terhadap kekuatan yang jauh lebih besar, tidak membawa hasil. Kapten Weintre menulis laporan panjang lebar kepada *Onder-Prefect* balfour tentang jalannya peperangan".

3. Perebutan Kekuasaan NICA di Sulawesi Utara

Sejalan dengan janji kemerdekaan yang diucapkan Perdana Menteri Koiso di Tokyo pada 7 September 1944, maka pada tanggal 28 September 1944, di Tondano (Minahasa) Penguasa Jepang untuk keresidenan Manado (*Manado Syu*) membentuk organisasi "Komite Tenaga Rakyat" di bawah ketua G.E. Dauhan dan 12 anggota. Komite ini berfungsi sebagai penasihat bagi *Manado Syuciji* Laksamana Muda K. Hamanaka yang memerintah Sulawesi Utara/Tengah waktu itu. Awal tahun 1945, komite diubah menjadi *Manado Syukai Gi In* atau Badan Perwakilan Rakyat Keresidenan Manado di bawah Ketua E.H.W. Palengkahu dengan tambahan 15 Anggota baru di samping 13 anggota lama. 25) *Manado Syukai Gi In* ini berfungsi sebagai lembaga perwakilan sementara yang bertugas mengajukan usul-usul dan mengarahkan rakyat demi kepentingan Pemerintahan pendudukan di daerah ini. Fungsi itu kemudian diubah lagi sehingga tugasnya adalah sebagai "Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia untuk wilayah *Manado Syu*".

Perubahan ini terjadi sekitar bulan April 1945. Jumlah anggota lama 28 orang dan diperluas dengan paling kurang lima orang lagi. Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 14 Agustus.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi perubahan lagi atas status dan peranan badan persiapan di atas. Ketuanya tetap E.H.W. Palengkahu dan namanya ialah Panitia Kemerdekaan Indonesia Sulawesi Utara/Tengah". Panitia inilah yang menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan sipil dari tangan Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka sendiri. Upacara penyerahan dilakukan di Tondano pada tanggal 21 Agustus 1945. 26).

Sebagai kelengkapan pemerintahan, maka pada 23 Agustus 1945, dibentuklah organisasi kemiliteran bernama *Pasukan Pembela Tanah Air* atau disingkat *Pasukan PTA* lengkap dengan panji-panjinya. Sebagai komandan ialah P.A. Tiendas dengan nama jabatan *Hulubalang*. Akademi Militer didirikan di Tondano dengan Direktur W.F. Sumanti. Upacara pembentukan Pasukan PTA dan Akademi Militer Tondano dipimpin oleh Letnan Kolonel Takasaki yang menjabat selaku Kepala Staf tentara pendudukan Jepang di daerah ini. Menurut rencana, semua persenjataan Jepang di daerah ini akan diserahkan kepada Pasukan PTA pimpinan Hulubalang P.A. Tiendas ini 27).

Sementara itu Suciji Laksamana Muda K. Hananaka dipanggil Sekutu untuk menghadap di Morotai. Sepulangnya dari Morotai, ia membatalkan dan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintah sipil yang sudah diserahkan beberapa hari yang lalu. Juga diperintahkannya untuk membubarkan Pasukan PTA dan penutupan Akademi Militer Tondano. Para pemimpin dan rakyat terutama pemuda-pemudanya tidak berdaya melawan waktu itu sebab Jepang belum sempat menyerahkan perseniataannya apalagi sejak waktu itu tidak ada kesempatan sedikit pun merebut senjata seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia.

Beberapa hari kemudian tanggal 8 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diboncengi NICA dan tentaranya mendarat di Manado. Mereka menerima penyerahan kekuasaan Jepang pada tanggal 10 Oktober. Tentara Sekutu dari unsur tentara Australia menerima penyerahan kekuatan militer sedang tugas-tugas pemerintahan sipil diambil alih oleh NICA 28).

Aparatur pemerintahan sipil yang telah dibentuk tidak dapat berfungsi sama sekali apalagi Pasukan PTA boleh dikatakan

belum memiliki senjata kecuali beberapa pucuk pistol yang di tangan para komandan pasukan. Karenanya walaupun dikandung maksud untuk melawan Belanda (NICA) namun hal itu tidak sempat dilakukan sehingga kaum nasionalis kemudian melakukan gerakan di bawah tanah. Mereka mengorganisasi para pemuda sehingga terbentuklah di Manado organisasi *Barisan Nasional Pemuda Indonesia (BPNI)* pada akhir Agustus 1945. BPNI ini dipimpin oleh John Rahasia dan Ch. D. Pontoh. pasukan Pemuda Indonesia (PPI) yang pernah dibentuk pada tanggal 15 Pebruari 1945 di Seretan Tondano diaktifkan lagi di bawah pimpinan E.D. Johanes dan kawan-kawannya 29). Dalam banyak hal, kedua organisasi pemuda nasionalis itu bekerja bahu membahu bahkan mereka memiliki keanggotaan rangkap.

PPI berpusat di Tondano di mana didirikan Markas Besar. Para pemimpin tingkat Markas Besar PPI ialah E.D. Johanes, H.M.L. Legoh, A. Pakasi, J.M.L. Supit, W. Panggalila, Masengi, V. Adam, J.W. Kumaunang, R. Pulukadang dan lain-lain. Bagian perlengkapan Markas Besar ialah W. Pangalila, N. Kumaunang, J. Karinda, J. Runtu dan lain-lain. Para Penghubung/Kordinator Pemuda ialah E. Matulandi, E. Runturambi, L.J. Mewengkang, B. Wower, J. Musu, J. Worek dan lain-lain.

PPI membentuk sektor-sektor di seluruh Minahasa termasuk di Manado. Kota Manado diberi status khusus berhubung di situ berkedudukan pusat organisasi BPNI yang merupakan partner PPI dalam perjuangan di bawah tanah. Susunan lengkap sektor-sektor itu sebagai berikut :

- 1) Kota Tondano terdiri atas empat sektor:
 - a. Tondano Kota, pimpinan A. Pakasi dan kawan-kawan.
 - b. Kampung Jawa Tondano, pimpinan R. Pulukadang dan kawan-kawan.
 - c. Tondano Barat/Koyo/Tataaran, pimpinan J. Pange-manan dan kawan-kawan.
 - d. Tondano Timur/Tondano Pante, pimpinan K. Gosal dan kawan-kawan.
- 2) Kota Manado terdiri atas tiga sektor:
 - a. Manado Utara, pimpinan J. Rahasia dan kawan-kawan.

- b. Manado Tengah, pimpinan M. Canon dan kawan-kawan.
- c. Manado Selatan, pimpinan N. Tooy dan kawan-kawan.
- 3) Sektor Kakas dan sekitarnya pimpinan W.H. Maleke dan kawan-kawan.
- 4) Sektor Tomohon dan sekitarnya, pimpinan F.H.L.W. Mondang dan kawan-kawan.
- 5) Sektor Airmadidi dan sekitarnya, pimpinan V. Mandey dan kawan-kawan.
- 6) Sektor Dimembe-Likupang dan sekitarnya, pimpinan F. Korah dan kawan-kawan.
- 7) Sektor Winawerot, pimpinan B. Karamoy dan kawan-kawan.
- 8) Sektor Girian-Bitung dan sekitarnya, pimpinan B. Sumampouw dan kawan-kawan.
- 9) Sektor Paso dan sekitarnya, pimpinan H.S. Kaeng dan kawan-kawan.
- 10) Sektor Ramboken dan sekitarnya, pimpinan J. Mamusung dan kawan-kawan.
- 11) Sektor Langowan dan sekitarnya, pimpinan W. Saerang dan kawan-kawan.
- 12) Sektor Tompaso dan sekitarnya, pimpinan G. Tewu dan kawan-kawan.
- 13) Sektor Tompaso Baru dan sekitarnya, pimpinan H.B. Estefanus dan kawan-kawan.
- 14) Sektor Kawangkoan dan sekitarnya, pimpinan W. Taulu dan kawan-kawan.
- 15) Sektor Leilem, pimpinan M.W. Pelealu dan kawan-kawan.
- 16) Sektor Sonder dan sekitarnya, pimpinan A. Linu dan kawan-kawan.
- 17) Sektor Amurang dan sekitarnya, pimpinan H. Kaligis dan kawan-kawan.
- 18) Sektor Motoling dan sekitarnya, pimpinan J. Piay dan kawan-kawan.
- 19) Sektor Ratahan-Tombatu dan sekitarnya, pimpinan J.M. Methusala dan kawan-kawan.
- 20) Sektor Belang dan sekitarnya, pimpinan H. Safar dan kawan-kawan.

Di luar daerah Minahasa, PPI membentuk pula sektor-sektor nya di Kotamobagu, Milibagu, Gorontalo, Tahuna, Tabukan dan beberapa tempat lainnya. Organisasi PPI ini kelihatannya paling kompak dan paling komplit menyusun garis-garis perjuangan di bawah tanah menantang masuknya kembali kaum kolonial Belanda di daerah ini.

Selain mengadakan usaha konsolidasi ke dalam PPI dan BPNI aktif mengadakan pendekatan yang mungkin dengan aparat sipil dan militer NICA. BPNI mulai terbentuknya akhir Agustus 1945 menerbitkan dua surat kabar yakni "**Catapult**" (berbahasa Belanda) dan "**Suara Indonesia Muda**" (berbahasa Indonesia). Kedua surat kabar ini untuk menandingi surat kabar kolonial "**Palita**" yang diterbitkan mulai masuknya NICA. Kedua surat kabar itu penggandaannya menggunakan fasilitas kantor NICA tanpa sepengetahuan mereka, melalui orang-orang Indonesia yang pro Republik yang bekerja di situ. Sebaliknya PPI mendekati orang-orang Indonesia yang menjadi tentara NICA. Pendekatan itu berhasil dilakukan. Ternyata banyak juga anggota tentara NICA berkebangsaan Indonesia yang pro Republik di antaranya Sersan Ch.Ch. Taulu. Ketika ia dihubungi PPI, maka serta merta ia mengatakan sanggup berjuang untuk RI bersama kawan-kawan lain antaranya Sersan S.D. Wuisan 30).

Pertemuan pertama disusul dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang menghasilkan disusunnya rencana untuk merebut kekuasaan NICA di daerah ini. Dengan cepat mereka berhasil merangkul sejumlah personil militer NICA. Beberapa di antaranya ditunjuk secara rahasia untuk menjalankan tugas sebagai penghubung dengan PPI/BPNI di antaranya Sersan W. Waney, Kopral W.F. Sumanti, Kopral N. Korompis, Kopral J. Sambuga, dan seorang pegawai dinas telepon militer bernama N. Tooy. Aparatur Sipil NICA juga didekati, di antaranya Hukum Besar (Kepala Distrik) Manado B.W. Lopian dan Hukum Kedua (Camat) Kauditan M. Tangkilisan 31).

Satu insiden terjadi di Sindulang (Manado Utara) tanggal 15 Desember 1945 di mana para pemimpin PPI/BPNI yang pulang mengadakan rapat gelap, diserang oleh sejumlah pemuda yang tidak dikenal. Polisi rahasia Belanda (NEFIS) menangkap

beberapa orang di antaranya, namun karena tidak cukup bukti, maka para pemimpin PPI/BPNI itu dilepaskan lagi. Belanda menyadari bahwa kekuatan pemuda harus dirangkul agar mereka tidak menghambat kelancaran pemerintahan kolonial NICA di daerah ini. Untuk itu dibentuk suatu organisasi bernama "*Comite van Initiatief*"; pimpinan D.A.Th. Gerungan dan kawan-kawannya. Tapi maksud NICA tercium oleh para pemuda sehingga setiap program komite itu selalu digagalkan 32).

PPI/BPNI merencanakan gerakan untuk menghambat upacara tanggal 10 Januari 1946 di Manado yang hendak dilaksanakan oleh NICA. Upacara itu merupakan peringatan persahabatan antara Belanda dan Minahasa yang ditandatangani pada 10 Januari 1679 di mana hal ini selalu diperingati/dirayakan tiap tahun sebelum masuknya tentara pendudukan Jepang. Walaupun sudah diatur dengan rapi, namun gerakan rahasia itu bocor ke tangan NICA. Banyak pimpinan PPI/BPNI yang ditangkap sehingga rencana itu gagal.

NICA semakin menyadari bahwa mereka harus dapat merangkul para pemuda akibat serentetan insiden yang tidak mereka kehendaki. Alat untuk itu ialah dengan mengaktifkan *Comite van Initiatief*. Untuk menyelidiki maksud mereka dan bahwa sesungguhnya NICA bermaksud baik, maka para pemimpin PPI/BPNI yang ditangkap akibat peristiwa 15 Desember 1945 dan 10 Januari 1946 dilepaskan lagi. Komite dibentuk sampai tingkat kecamatan dan desa-desa di seluruh Minahasa dalam rangka penyelenggaraan kongres pemuda yang direncanakan pada tanggal 9 Pebruari 1946. Semua organisasi pemuda tanpa memandang aliran politik dan agamanya, akan dilebur menjadi satu organisasi dalam kongres tersebut. PPI/BPNI membentuk organisasi bayangan yang dinamakan "**Persatuan Indonesia Muda**" disingkat PIM dan hadir dalam kongres dimaksud. Delegasi PIM berhasil mengacaukan suasana rapat sehingga organisasi yang dicita-citakan Belanda tidak dapat terbentuk 33).

Sementara perhatian NICA tertuju ke Kongres Pemuda tanggal 9-2-1946 yang diadakan di Kinilow (dekat Tomohon), para pemimpin PPI/BPNI lainnya bersama-sama anggota-anggo-

ra KNIL pimpinan Sersan Ch.Ch Taulu, mengatur rencana pemberontakan. Unsur-unsur pemuda nasionalis itu mengadakan rapat rahasia bersama unsur-unsur militer di atas pada hari yang sama bertempat di rumah Sersan S.D. Wuisan di Titiwungen (Manado). Rapat rahasia itu dipimpin oleh Sersan Ch.Ch. Taulu. Hasil lengkap rapat rahasia yang bertujuan merebut kekuasaan NICA itu adalah sebagai berikut ini.³⁴⁾

1) Kode/isyarat yang digunakan:

Siang hari dengan mengacungkan dua jari ke atas yang melambangkan bendera kebangsaan Merah Putih; malam hari, menegur dengan angka "dua" yang harus dijawab dengan "delapan" yang khusus digunakan pada gerakan hari pertama; malam hari, bilamana perlu kode/isyarat dapat diubah "empat" dijawab "enam" yang penting jumlahnya sepuluh.

- 2) Mengirimkan berita ke semua markas pemuda sampai ke sektor-sektor mengenai pelaksanaan gerakan.
- 3) Menetapkan tanggal 13-2-1946 lewat tengah malam tepatnya jam 03.00 14-2-1946 sebagai saat pelaksanaan gerakan.
- 4) Apabila salah satu pimpinan tertangkap, gerakan dipercepat lagi.
- 5) Aksi harus dijalankan sangat rahasia dan sedapat mungkin tanpa menimbulkan keributan.
- 6) Menyergap rumah jaga di asrama Teling I dan Teling II diteruskan merebut gudang senjata/amunisi, perlengkapan pakaian dan makanan.
- 7) Menangkap semua orang Belanda, Indo Belanda dan semua orang Indonesia yang dicurigai serta menguasai semua pos militer dan polisi.
- 8) Menangkap semua orang yang dicurigai yang tinggal di luar asrama militer dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar nama dan alamatnya.
- 9) Menangkap semua orang Belanda berstatus partikular/sipil di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
- 10) Diusahakan tidak melepaskan tembakan kalau tidak perlu

kecuali membela diri, membela kawan atau jika memang terjadi tembak menembak dengan musuh.

Ternyata esok harinya Taulu dan Wuisan ditangkap karena dicurigai oleh NICA. Namun karena rencana sudah matang, maka gerakan dilanjutkan juga. Yang menjadi inti adalah unsur militer NICA dalam Kompi VII di asrama Teling I. Mereka turut dicurigai tapi hanya dilucuti peluru-pelurunya sedangkan senjatanya tidak. Dengan senjata tanpa peluru, dimulailah gerakan tepat jam 01.00 tanggal 14-2-1946. Regu penyerbu pimpinan Kopral J.M. Runtukahu berhasil mengelabui dan melucuti senjata piket markas Teling I, merampas senjata mereka dan memimpin gerakan militer selanjutnya. Gudang senjata dirampas, tempat tahanan dibuka, sehingga Taulu dan Wuisan bebas kembali. Keduanya lalu mengambil alih komando dan berhasil sepenuhnya menguasai asrama Teling I. Jumlah pasukan mereka bertambah dengan mereka yang sejak semula diam-diam saja tapi hatinya memihak Republik.

Selesai menguasai kompleks militer di Teling (Manado). pasukan dikirim untuk menawan Kapten Blom yang menjadi Komandan Garnisun KNIL di Manado. Manado dan sekitarnya sepenuhnya dikuasai jam 09.00 pagi waktu setempat. Jam berikutnya dikirim pasukan pimpinan Sersan F. Bisman ke Tomohon. Mereka ditugaskan menawan Residen NICA Letkol. Coomans de Ruyter dan *Troepencommandant* KNIL Letkol de Vries. Perlu ditambahkan bahwa kota tomohon untuk sementara jadi ibukota Karesidenan Manado sebab kota Manado belum pulih akibat dihancurkan oleh serangan Sekutu dulu. Pasukan pimpinan Bisman ini menunjuk Inspektur Polisi Samsuri sebagai perantara untuk meminta agar Residen dan komandan KNIL itu menyerahkan diri. Terjadi satu insiden singkat dengan seorang perwira KNIL yang lari dari Manado menuju Tomohon. Tembak menembak berakhir dengan tewasnya tentara Belanda itu. Bisman menampakkan hasil dengan menyerahkan kedua pejabat nica itu bersama seluruh anggotanya. Mereka kemudian dijadikan tawanan bersama-sama yang tertawan di Manado dan tempat-tempat lainnya di Minahasa. Semua tawanan Belanda ini

dikumpulkan di Sario (Manado), di penjara Manado atau di markas Teling. Dengan berhasilnya gerakan operasi kaum militer nasionalis bersama PPI/BPNI ini, masyarakat Sulawesi Utara berhasil menawan dua bangsa penjajah yakni Jepang di Girian (Tonsea-Minahasa) dan Belanda di Manado 35).

Setelah gerakan ini berhasil maka para pejuang pimpinan Taulu dan Wuisan menyelenggarakan rapat yang dihadiri para pimpinan unsur-unsur militer, pemuda dan pamongpraja yang pro Republik. Rapat diadakan pada sore hari tanggal 14 Februari 1946 di rumahnya B.W. Lapien di Singkil (Manado Utara). Diputuskan bahwa B.W. Lapien memegang jabatan Residen menggantikan Letkol Coomans de Ruyter sedang Ch.Ch Taulu diangkat menjadi Letnan kolonel menggantikan Letkol de Vries. Rapat menugaskan Letkol Taulu mengeluarkan "maklumat No1" yang isinya antara lain tentang pemberitahuan sudah direbutkan kekuasaan NICA, agar rakyat tetap tenang dan mengadakan kegiatan seperti biasa, dan agar para pejuang segera melaksanakan pengalihan kekuasaan ke tangan Republik. "Maklumat No 2" isinya tentang pemberitahuan pengangkatan B.W. Lapien selaku Residen. Selanjutnya dikeluarkan surat tugas kepada PPI untuk turut membantu tentara menjaga keamanan. Hal ini mengingat jasa yang sangat besar dari para pemuda dalam gerakan itu 36).

Langkah selanjutnya ialah menghubungi Pemerintah Pusat waktu itu berkedudukan di Yogyakarta. Dua tentara TRISU yakni Kopral A.S. Rombot dan Kopral D. Kawilarang ditugaskan menyelenggarakannya. Berita itu dapat dikirimkan berkat bantuan dari dua orang petugas PTT di Tomohon bernama Tan Ing Hwa dan A.J. Lamamentik. Berita itu dikirimkan melalui kapal barang SS Luna milik Belanda tetapi markonisnya pro Republik bernama Mr. Robert Ensleigh seorang Australia. Diberitahukan bahwa siaran itu dapat ditangkap di Ujungpandang, dan Yogyakarta bahkan sampai ke Brisbane (Australia), San Fransisco (Amerika Serikat) dan Nederland. Pemerintah pusat dan dunia internasional memaklumi apa yang telah terjadi 37).

Berita pertama yang disiarkan tanggal 15 Pebruari 1946 disusul dengan berita kedua yang meminta agar Sekutu di Ujungpandang mengirimkan komisi untuk melihat dari dekat keadaan yang sebenarnya. Sekali lagi Mr. Robert Ensleigh memberikan jasa baiknya sebab tanpa melalui radio kapal barang **SS Luna**, maka hubungan dengan dunia luar sama sekali tidak mungkin diadakan. Komisi Sekutu datang dan berlabuh di pelabuhan Manado pada tanggal 23 Pebruari 1946 menumpang kapal **MV EL Libertador**. Pihak kita belum mau menemui mereka di kapal sebab kapal itu memakai bendera Belanda. Ketika diganti dengan bendera Sekutu, maka jalan perundingan antara kedua terbukalah.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Residen B.W. Lapien dengan beberapa anggota, yakni Letkol Ch.Ch. Taulu, D.A. Th. Gerungan, E. Katoppo, Hakim Hidayat, Ch. D. Pontoh, W. Saerang dan A.B.H. Woworuntu. Delegasi Belanda terdiri dari Coomans de Ruyter (Ketua), Letkol de Vries, A.I. Lutheyu dan Inspektur Polisi de Leeuw. Keempat delegasi Belanda ini sebelumnya adalah tawanan pihak kita tapi dilepaskan atas permintaan Sekutu, agar delegasi Belanda dapat terbentuk. Sebagai penengah adalah delegasi Sekutu pimpinan Letkol Colson (Inggris) dengan para anggota Mayor Wilson (Australia) dan dua perwira Belanda yakni Kolonel Gibel dan Kolonel de Rooy 38).

Perundingan dimulai jam 11 pagi tanggal 24 Pebruari yang sesuai rencana harus sudah berakhir jam 20.00 (malam harinya). Berbagai macam cara yang dipergunakan delegasi Belanda tetapi delegasi Indonesia tetap tidak mau menyerahkan kembali kekuasaan yang telah di tangannya. Bahkan kelihatan delegasi Sekutu memihak delegasi Belanda dengan meminta agar delegasi Indonesia mau menerima usul agar kekuasaan diserahkan kembali sebab katanya melanggar peraturan internasional; juga dikemukakan tentang soal pemberontakan di masa perang yang belum dicabut walau perang belum berakhir. Sampai habis waktu yang ditentukan, perundingan itu tidak menghasilkan apa-apa. Hanya di akhir perundingan disetujui bahwa delegasi Indonesia harus menyelenggarakan referendum untuk mengetahui apakah rakyat

mau kembali diperintah Belanda atau ingin terus di bawah Republik. Referendum dimaksud harus diadakan besok di mana hasilnya akan dilaporkan dalam perundingan lanjutan di darat. 39).

Keesokan harinya, tanggal 25 Pebruari 1946, delegasi Sekutu diundang turun untuk menyaksikan kamp tawanan Belanda di Manado dan kamp tawanan Jepang di Girian. Sementara itu sebagian pimpinan Republik lainnya menyelenggarakan musyawarah di Tomohon yang dihadiri oleh para pimpinan dari Minahasa. Bolaang Mongondow, Sangir Talaud dan Gorontalo yang dianggap mewakili suara rakyat Sulawesi Utara. Hasil kongres itu ialah bahwa rakyat Sulawesi Utara memilih tetap di bawah Republik dan menolak kembalinya kekuasaan Belanda. Delegasi Belanda pimpinan Coomans de Ruyter kemudian diundang turun dari kapal di mana dua delegasi lainnya telah menanti. Perundingan dilangsungkan di kompleks asrama Teling Manado. Delegasi Sekutu memimpin perundingan dan setelah mengetahui bahwa rakyat memilih tetap di bawah Republik, maka Letkol Colson atas nama Sekutu mengumumkan bahwa mulai saat itu Sulawesi Utara berada dalam keadaan perang dengan Sekutu. Dimintanya agar semua tawanan Belanda diizinkan diangkut ke kapal bersama keluarga bersama orang-orang yang memihak mereka di darat. Baik pernyataan perang maupun permintaan itu diterima dengan baik oleh delegasi kita. Sesudah itu delegasi Sekutu dan Belanda kembali kembali ke kapal dengan catatan perlu diadakan perundingan lanjutan lagi di waktu-waktu mendatang. 40).

Pemerintahan sipil pimpinan B.W. Lopian bersama Komandan TRISU Letkol Ch.Ch Taulu mulai mengalami hambatan-hambatan. Ke dalam dirongrong oleh perang urat syaraf yang dilancarkan oleh J. Kaseger, Kapten KNIL yang kemudian dirangkul dan diangkat menjadi Mayor TRISU. Kekayaan pemerintah semakin menipis untuk membagi gaji, pensiun dan pengeluaran-pengeluaran lainnya termasuk biaya kamp tawanan 8000 orang Jepang di Girian. Tersiar kabar bahwa di mana Belanda akan datang menyerang, di mana kapal perang **Piet Hein** mondar mandir di perairan Sulawesi Utara. Pihak

Sekutu yang mengabarkan bahwa di mana mereka akan datang dengan pesawat terbang, tidak juga muncul, sementara hubungan dengan pemerintah pusat RI tidak mungkin dilaksanakan untuk minta bantuan 41).

Sejak suksesnya perebutan kekuasaan 14 Pebruari 1946, pihak pimpinan PII telah minta agar para pimpinan pemuda segera dipersenjatai untuk mencegah kemungkinan datangnya serangan Belanda. Tapi pimpinan TRISU terlalu lambat menyalurkan senjata dimaksud. Barulah pada awal Maret 1946 penyaluran pertama dilakukan hanya untuk Markas Besar PPI di Tondano. Sebelum itu para pemuda telah dilatih oleh instruktur-instruktur TRISU di Manado dan Tondano. Ketika sedang berlangsung tahap berikutnya pada tanggal 11 Maret 1946, pecalah pemberontakan. Pasukan yang ditugaskan menjaga tawanan Jepang di Girian membelot memihak Belanda. Mereka datang menyerang asrama Teling di mana sedang berlangsung pemuatan senjata-senjata ke atas kendaraan untuk para pemuda PPI. Letkol Ch.Ch. Taulu yang bermarkas di situ tidak sempat bertindak dan terpaksa menyerah. Ternyata pimpinan pemberontakan adalah J. Kaseger yang sebelumnya disinyalir lebih memihak Belanda tapi dibiarkan saja. Ia berkhianat dan dengan menggunakan pangkat Kapten KNIL seperti sebelum terjadinya peristiwa 14 Pebruari 1946, ia memimpin gerakan pemberontakan yang berhasil menikam dari belakang. Taulu dan para pimpinan Republik dari unsur militer, sipil dan pemuda ditangkap dan dibawa ke kapal perang **Piet Hein** yang sementara itu sudah berlabuh di pelabuhan Manado 42).

Para pimpinan yang tertangkap oleh gerakan Kapten J. Kaseger yang berkhianat itu ialah antara lain Letkol Ch.Ch. Taulu, Residen B.W. Lopian, E.D. Johannes, W. Pangalila, F.H.L.W. Mondong, W. Pantouw, A.H.A.A. Kawilarang, Mayor S.D. Wuisan, Kapten F. Bisman, Kapten A.F. Nelwan dan staf pemerintahan sipil/militer lainnya termasuk sejumlah pemuda dari PPI. Manado dapat dikuasai Belanda tapi di pedalaman segera terjadi perlawanan. Yang terbesar muncul di Tondano tempat kedudukan Markas Besar PPI. Sebagaimana pimpinan PPI

antaranya R. Pulukadang, E. Lewu, A. Pangemanan dibantu oleh seorang TRISU bernama No Korompis, memimpin para pemuda dan siswa-siswa pro Republik untuk melawan tentara NICA pimpinan J. Kaseger. Kapten NICA ini ternyata telah diangkat selaku *Territorial Commandant* KNIL oleh NICA. Barulah seminggu kemudian perlawanan bersenjata di sekitar Tondano dapat berakhir oleh menyerahnya No Korompis dan pasukan-pasukan PPI yang dipimpinnya 43).

D. AKIBAT PERLAWANAN

Sebelum memaparkan akibat-akibat dari perlawanan-perlawanan suku Minahasa terhadap kolonialis - imperialis Spanyol dan Belanda seperti yang diuraikan di depan, maka baiklah didalami dahulu *paper* Drs. A.B. Lopian dari Leknas LIPI, yang berjudul "Bentuk-bentuk Perlawanan Terhadap Kolonialisme", antara lain sebagai berikut : " Jadi di dalam klise kisah perlawanan terhadap kolonialisme, ada dua pihak yang berhadapan, yakni kelompok penguasa kolonial dengan antek - anteknya yang merupakan pihak yang jahat melawan pejuang-pejuang bangsa yang mempertaruhkan jiwa raganya demi kebenaran dan keadilan. Kaum kolonialis dalam tindak-tanduknya melakukan segala macam eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat.

Bedanya dengan ceritera *Western* ialah bahwa di sini unsur jahat akhirnya kalah dan pihak yang baik keluar sebagai pemegang, sedangkan banyak kisah perlawanan terhadap kolonialisme sebelum Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949), biasanya merupakan tragedi karena perlawanan dan pemberontakan seringkali berakhir dengan penumpasan oleh pasukan dari pemerintah kolonial" 44).

Lebih jauh Drs. A.B. Lopian dalam *paper* tersebut mengatakan antara lain sebagai berikut : " Bahwa perlawanan itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, bahwa ada perbedaan antara perlawanan yang sedang menghadapi masuknya kekuasaan asing (seperti dalam hal perang di Aceh, perang Padri dan sebagainya) dan perlawanan yang merupakan sebuah pemberon-

takan terhadap pemerintah kolonial yang sudah bercokol di satu daerah; bahwa kekuasaan asing dapat masuk melalui bermacam-macam seperti: perang frontal (seperti di Banda), kontrak persahabatan (seperti di Minahasa) atau terselubung dalam suatu perang saudara." 45)

Kemudian, Drs A.B. Lapien dalam *paper* tersebut itu juga mengatakan, " Akhirnya kita tiba pada pertanyaan - pertanyaan yang berkisar pada akibat-akibat dari pada perlawanan itu. Jika perlawanan gagal, perlu dipertanyakan apa yang menyebabkan kegagalan itu : kurang perencanaan, organisasi yang tidak beres, perlengkapan dan persenjataan yang lemah, hilangnya kepercayaan terhadap pimpinan perlawanan, perasaan solidaritas yang menjadi luntur di kalangan pihak yang melawan dan/atau sebab lain-lain yang mengakibatkan pihak pemerintah kolonial dapat mempertahankan kekuasaannya. Dalam hal perlawanan itu berhasil, kita masih bisa bertanya, apakah dengan demikian program perjuangan telah dicapai.

Musuh dapat dikalahkan, perang dapat berakhir dengan sukses tetapi belum tentu sasaran yang dituju dapat dikatakan telah ditemukan." 46)

Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas, pemaparan akibat perlawanan Minahasa terhadap kolonialis - imperialis Spanyol dan Belanda itu hendak dijelaskan di bawah ini :

1. Akibat perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol yang berhasil itu, aspek-aspek positifnya yaitu orang Minahasa makin berkembang kepercayaan terhadap diri dan kekuatan sendiri, makin dipererat kesatuan dan persatuannya, telah lebih terlatih menentang peralatan perang orang Eropa yang telah lebih baik buaatannya bahkan menguasainya (alat perang rampasan) dan pula orang Minahasa telah diperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa daerahnya dengan bahasa Spanyol. Tentu ada juga aspek negatifnya seperti kekuatiran bahwa kembalinya Spanyol telah, mengundang calon kolonialis baru yaitu Belanda.
2. Akibat perlawanan rakyat Tondano/Minahasa lewat Perang Tondano, yang gagal karena perlengkapan dan persenjataan yang lemah, aspek positifnya sangat kurang dibanding dengan akibat perlawanan yang beraspek negatif. Aspek yang

dapat disebut hanyalah teladan kepahlawanan dari rakyat dan pimpinan-pimpinannya dalam membela kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek negatifnya adalah : Cakar kolonialis – imperialis Belanda yang bernama *devide et impera* telah lebih dalam masuk, feodalisme yang sebelumnya tak dikenal oleh rakyat Minahasa, mulai diletakkan dasarnya oleh Belanda, terjadi kerenggangan pada kesatuan dan persatuan walak-walak di Minahasa, malah benih dendam dikecamkan terhadap antar walak, jiwa patriotis dari pemimpin-pemimpin rakyat Minahasa dikendurkan dengan pembuangan tokoh-tokoh perlawanan keluar daerah Minahasa dan sanjungan dan pujian semua oleh Belanda terhadap Minahasa sebagai propinsi ke-12 atau *Twaalfde Provincie* dari Negara Belanda mulai ditanam.

3. Akibat perlawanan rakyat Indonesia di Minahasa dan sekitarnya terhadap kolonialis-imperialis Nica, yang belum sukses pada mulanya (1946) namun sukses sesudahnya (1949/1950) mempunyai akibat banyak yang positif seperti: perasaan kesatuan nasional telah makin subur, (lemah di sektor Sulawesi Utara, lari ke Jawa ke sektor Republik Indonesia yang lebih kuat), kesadaran bernegara Proklamasi telah bertempat di sanubari sebagian besar rakyat Minahasa, dan kesadaran dalam kehidupan internasional telah berkembang dan menjadi pendirian pemimpin-pemimpin rakyat Minahasa seraya berusaha terus dengan cara terang-terangan maupun dengan gerakan di bawah tanah untuk merobohkan kekuasaan Belanda lewat Nica-nya yang mau bercokol kembali di Minahasa sesudah Perang Dunia kedua.

Namun aspek negatifnya "bukannya tidak ada "tetapi sudah tidak berarti lagi misalnya segelintir kecil pemimpin Minahasa dengan organisasinya "*Twapro*" dan "KKM" (Komite Ketatanegaraan Minahasa).

BAB 4. PERLAWANAN DI BOLAANG MONGONDOW

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

1. Letak dan Batas Wilayah

Bolaang Mongondow adalah suatu daerah yang berada di Pulau Sulawesi pada bagian utara. Sekarang ini Bolaang Mongondow sebagai suatu Daerah Tingkat II, yang merupakan bagian dari Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara. Daerah ini berada di antara Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa dan Daerah Tingkat II Kabupaten Gorontalo. Dalam jaringan derajat ternyata, daerah Bolaang Mongondow terletak antara $1^{\circ}0,30'$ dan $0^{\circ}20'$ LU serta antara $16^{\circ}24'$ BT dan $17^{\circ}54'$ BT. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan dengan Laut Maluku.¹⁾

Luas wilayah Bolaang Mongondow mencakup 7600 km², yang di dalamnya berada sungai-sungai yang besar dan panjang, masing-masing Sungai Onggak Dumoga dengan panjang 87,2 km, Sungai Onggak Mongondow 42,1 km dan Sungai Ajong 30,2 km. Di samping itu antara Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow berada danau Moat yang luasnya kurang lebih 900 ha²⁾. Antara Bolaang Mongondow dan Gorontalo, di sebelah utara dibatasi dengan Sungai Taludaa. Daerah yang melebar sejauh kira-kira 66 km berada di antara Sungai Poigar dan sungai Tanjung Flesko. Bagian yang menyempit berada di antara desa Sauk di utara dan desa Popadu di selatan³⁾. Daerah Mongondow juga dihiasi dengan beberapa buah gunung yakni Gunung Ambang dengan ketinggian 1780 m yang berada di Kecamatan Modayag, Gunung Koladdom dengan ketinggian 1714 m. Paniki 11817 m, Simbalang 1921 m, Sinandaka 1770 m, Tukulan 1235 m, Umeda 1426 m dan Gunung Usising yang berketinggian 1461 m⁴⁾.

2. Perkembangan Penduduk

Bolaang Mongondow didiami oleh empat suku sebagai

penduduk asli, yaitu suku Mongondow, suku Uki, suku Bintauna, dan suku Kaidipang-Bolaang Itang. Kemudian berdatanglah pendatang dari luar daerah ini, yakni dari Minahasa, Gorontalo, Sangir Talaud, Cina, Arab dan Pakistan. Sehubungan dengan kegiatan pemerintah di bidang transmigrasi maka sekarang ini di daerah Bolaang Mongondow terdapat penduduk yang berasal dari Bali dan Jawa. Juga banyak yang berasal dari Toraja dan Maluku. Karena adanya instansi pemerintahan, maka dewasa ini hampir semua suku bangsa di Indonesia terdapat di Bolaang Mongondow.

Sampai dengan abad ke-19 belum dapat dipastikan jumlah penduduknya. Barulah pada tahun 1924 disebutkan bahwa penduduk Bolaang Mongondow berjumlah 56.274, terdiri dari 51.269 beragama Islam dan 5.005 beragama Kristen. Pada tahun 1930 penduduk berkurang menjadi 47.344, yang belum diketahui apa sebabnya. Dalam *memorie* Residen Manado M. van Rhijn yang dibuat dalam tahun 1941, dinyatakan bahwa jumlah penduduk 81.914 jiwa, yang terdiri dari 119 orang Eropa, 835 Cina, 387 Timur Asing lainnya, dan 80.573 penduduk asli. Dalam tahun 1945 penduduk berjumlah 87.000 jiwa dan di tahun 1954/1955 jumlahnya sekitar 129.103 jiwa. Tahun 1975 jumlah penduduk menjadi 243.110 jiwa dan di tahun 1977 penduduk berjumlah 265.007 jiwa 5). Dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk tahun 1978, maka jumlah penduduk Bolaang Mongondow di tahun 1978 sebanyak 273.606 jiwa 6). Dan pada tahun 1980 setelah disensus maka penduduk menjadi 288.000 jiwa

3. Wilayah Hukum Pemerintahan

Sampai dengan abad ke-17 sejarah Bolaang Mongondow terisi dengan kegiatan pertentangan antara kekuasaan-kekuasaan yang ada di daerah. Mengenai sejarah raja-raja Bolaang Mongondow mulai diungkit dalam sejarah sejak adanya VOC beroperasi di Sulawesi Utara sekitar tahun 1650. Dalam tahun 1694 Bolaang Mongondow membuat perjanjian dengan Kompeni 8).

Kegiatan Portugis dan Spanyol rupanya tidak berbekas di Bolaang Mongondow, dan hanya terbatas pada soal dagang yang

tidak memakan waktu yang lama atau hanya sebentar saja. Dalam perdagangan dengan Portugis dan Spanyol dikenal alat-alat seperti tombak, piring dan kain sikayu. Walaupun keberadaan Portugis dan Spanyol hanyalah di sekitar abad ke-16 namun sempat mereka berhadapan dengan bentuk perlawanan terhadap penduduk di Bolaang Mongondow. Peristiwa di Buntalo karena kemarahannya terhadap penduduk orang Portugis menembakkan meriam ke arah sebuah bukit dan terjadilah tanah longsor. Di Pinolosian orang Portugis berhadapan dengan orang Bogani Bolaang Mongondow yang dipimpin oleh Beangkasi. Perlawanan lain juga terjadi di Dumoga. Semua perlawanan ini telah muncul akibat rasa tidak senang penduduk setempat terhadap orang Portugis 9).

Semua kejadian yang disebutkan di atas tidak ada yang menyangkut persoalan wilayah. Kehadiran Inggris di Indonesia pada tahun 1811-1816 tidak terlihat pengaruhnya di Bolaang Mongondow. Masalah perwilayahan barulah muncul kemudian waktu Belanda kolonial berada di Manado. Kontrak perbatasan pernah diatur pada tanggal 30 September 1694 yang menetapkan bahwa batas antara Minahasa dan Bolaang Mongondow adalah sungai Poigar, Pontak dan Buras. Kontrak ini berlaku antara Kompeni dan Bolaang Mongondow. Sebelumnya, di tahun 1691 Raja Loloda Mokoagow, dipecat oleh Kompeni sebagai raja Bolaang Mongondow 10).

Dalam tahun 1691 itu juga Raja Loloda Mokoagow diganti oleh Jakobus Manoppo dengan penetapan Kompeni. Penetapan Kompeni ini berlaku pada tanggal 20 Mei 1695 yaitu pada hari kontrak pertama antara Bolaang Mongondow dengan VOC. Pada masa pemerintahan Jakobus Manoppo, diadakanlah perundingan mengenai perbatasan Minahasa dengan Bolaang Mongondow, yang berlaku pada tanggal 21 September 1694. Antara Raja Bolaang Mongondow dengan para pemimpin Minahasa ditetapkan bahwa batas bagian utara adalah sungai Poigar. Di bagian selatan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1731 ialah dengan batas sungai Byjat atau Burat. Di tahun 1700 negeri-negeri yang berada di bawah pemerintahan Bolaang Mongondow adalah

Lolayang, Pojowa, Mohamai, Motoboi, Kepandakan, Kotabangon, Mojang, Dumoga, Gogagoman, Pinaba, Kansil, Tabang Uwaingo, Pasi dan Otam 11).

Pada tahun 1734 Makalaba pengganti Jakobus Manoppo yang meninggal dunia tahun 1730, dibuang oleh Kompeni ke Manado. Raja Fransiskus Manoppo naik takhta dan kemudian diganti oleh Raja Salomon di tahun 1735. Raja Salomon Manoppo menunjukkan sikap yang tidak mau bekerja sama dengan Kompeni, antara lain ia mencabut pal-pal batas daerah yang diatur Kompeni. Akibatnya ia ditangkap oleh Kompeni dan diinternir di Ternate. Dari Ternate Raja Salomon Manoppo dibawa ke Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan. Sebagai reaksi terhadap perbuatan Kompeni kepada Raja Salomon Manoppo, maka timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh Sabaha Jambet. Mereka menuntut agar Raja Salomon Manoppo dikembalikan ke takhtanya. Akhirnya ke Ternate lalu ke Bolaang Mongondow. Tanggal 30 Agustus 1764 Raja Salomon Manoppo meninggal dunia. Eugenius Manoppo putra Salomon Manoppo membuat kontrak dengan Kompeni pada tanggal 5 Mei 1756, dan dengan itu pada tanggal 31 Januari 1767 ia disahkan oleh Kompeni menjadi raja. Pada masanya ibu negeri kerajaan dipindahkan dari Bolang ke Dumoga atau ke Kotabangon. Dalam tahun 1700 Eugenius Manoppo meninggal dunia penggantinya sesudah pengangkatan terus meninggal dunia lalu digantikan lagi oleh Markus Manoppo yang diberi gelar Sultan.

Pengangkatan sebagai Sultan dijadikan sebagai tantangan terhadap Ternate dan Sultan Tidore oleh Kompeni. Ia diangkat sebagai Sultan pada tanggal 30 Oktober 1773, oleh Gubernur Valckenaar. Ia dipuji sebagai seorang yang bijaksana, pandai, cakap dan seorang yang dihormati. Memang ia dibesarkan di Ternate di bawah Gubernur Valckenaar. Pada tahun 1779 Manuel Manoppo menjadi raja. Ia juga dibesarkan di Ternate. Raja Manuel Manoppo, yang dikenal sebagai putra Raja Salomon Manoppo pernah menandatangani kontrak dengan Inggris pada tanggal 20 Juni 1811. Kontrak ini tidak membawa pengaruh pada Bolaang Mongondow. Pada tahun 1823 Manuel Manoppo meninggal dunia dan diganti oleh Cornelis Manoppo, putera

Eugenius Manoppo dengan seorang istri di Manado. Pusat kegiatan dipindahkan di tepi sungai Sumoit dalam tahun 1820. Pada masanya agama Islam masuk ke Bolaang dari Gorontalo. Pada tanggal 5 Pebruari 1829 Ismail Cornelis Manoppo, putera Cornelis Manoppo menjadi raja. Kemudian pada tanggal 1 Pebruari 1830 Jacobus Manuel Manoppo, putera Manuel Manoppo diangkat dan diberi gelar Sultan. Sultan ini menentang Belanda dengan menutup semua sekolah yang sudah diusahakan oleh Belanda. Alasan yang dipakai adalah karena guru P. Bastiaan telah meninggal dunia. Hal ini menjadi persoalan yang besar bagi pemerintah Belanda di kemudian hari. Pada tanggal 8 September 1898 Adrianus Cornelis, putera Cornelis Manoppo diresmikan menjadi raja. Telah menjadi kebiasaan, bahwa setiap pengangkatan raja yang baru, maka pemerintah penjajah selalu memperbaharui kontrak dalam rangka membatasi kekuasaan raja. Tahun 1862, raja ini diganti oleh Johannes Manuel Manoppo. Ia adalah putera Jacobus Manuel Manoppo. Raja ini sempat ditemui oleh pendeta Wilken, Schwarz dan de Lange yang ke Bolaang Mongondow pada tahun 1866 dan tahun 1875. Tahun 1878 raja ditangkap dan ditahan di Manado dan kemudian dibuang ke Jawa. Raja diganti oleh Abram Sugeha, yang dilantik dalam tahun 1880. Ibunya adalah anak raja Eugenius Manoppo. Abram Sugeha menjadi raja sampai tahun 1892 dan diganti oleh Riedel Manuel Manoppo, putera Johanes Manuel Manoppo. Ia naik takhta dalam tahun 1893-1901. 21).

Pada akhir abad ke-19, di Bolaang Mongondow terdapat lima kerajaan yang berpemerintahan sendiri, yakni:

- a. Kerajaan Bolaang Mongondow, di bawah Raja Riedel Manuel Manoppo (1893-1901). Ibukota kerajaan ialah Bolaang yang terletak di pesisir utara. Penggantinya yaitu Raja Datu Cornelis Manoppo (1901-1927), memindahkan ibukota ke Kotobangon di pedalaman.
- b. Kerajaan Bolaang Uki, di bawah Raja Willem van Gobel (1872-1901). Ibukota mula-mula di Walungu dan kemudian di Sauk. Kedua tempat ini terletak di pesisir utara. Penggantinya yakni Hasan Iskandar van Gobel (1901-1914). Di tahun 1906 ia memindahkan ibukota ke Molibagu di pesisir selatan.

- c. Kerajaan Bintauna, di bawah Raja Muhammad Turaju Datunsolang (1895-1948). Ibukotanya berpindah-pindah Mulai dari Fantayo, Minanga yang semuanya terletak di pesisir utara.
- d. Kerajaan Bolaang Itang, di bawah Raja Bondji Ponto (1890-1907). Ibukotanya ialah Bolaang Itang yang terletak di pesisir utara. Penggantinya Raja Ramsuit Ponto (1907 - 1950).
- e. Kerajaan Kaidipang, di bawah Antugia Korompot (1897-1910). Ibukota kerajaan ialah Boroko yang terletak di pesisir utara dekat perbatasan dengan Gorontalo.

Itulah kelima kerajaan yang ada di daerah Bolaang Mongondow pada akhir abad ke-19, yang semuanya berkembang sampai abad ke-20 13).

Pada akhir ke-19, pemerintah kolonial mulai mempersiapkan rencana pembentukan *Onderafdeeling* bagi daerah Bolaang Mongondow, yang masih merupakan satu lingkungan wilayah jabatan atau *ambtsressort* bagi seorang pamongpraja bangsa Eropa atau *Europees Bestuursambtenaar*. Hal ini adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menurut asas dekonsentrasi berdasarkan *Reglement op het beleid der reglement* 1855 (*Staatsblad* 1855 No. 2) Kepala *Onderafdeeling* administratif ini nantinya diberi gelar jabatan *Controleur Binnenlands bestuur* bagi yang pejabatnya lulusan jurusan Indologi *Universiteit Leiden* dan gelar jabatan *Gezaghebber* bagi yang lulusan *Bestuursacademie* ¹⁴⁾. Berhubung *Onderafdeeling* Bolaang Mongondow baru kemudian dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901 maka sebelum itu semua penguasa berhubungan dengan Residen Belanda yang berkedudukan di Manado ¹⁵⁾.

Onderafdeeling Bolaang Mongondow terdiri dari kerajaan-kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna, Kaidipang dan Bolaang Itang 16). Pemerintah kolonial pada tahun 1901 membentuk *onderafdeeling* Bolaang Mongondow dengan *Controleur* yang pertama ialah Anthon Cornelis Veenhuyzen. Raja Bolaang Mongondow Ridel Manuel Manoppo (1893-1902) menolak penempatan seorang pejabat Belanda. Ketidak-senangan ini berhubungan dengan Raja Salmon Ma-

noppo yang dibuang ke Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan pada tahun 1748-1754. Sebagai reaksi Belanda mengangkat Datu Cornelis Manoppo sebagai raja. Terjadilah politik adudomba. Raja Datu Cornelis Manoppo menetapkan Kotobangon sebagai ibukota kerajaan yang baru. Kedudukan *Controleur* berada di Kotabaru di kaki gunung Siak dekat Kotobangon. Kemudian pemerintah Belanda mendirikan ibukota yang baru yaitu Kotobangon di tanah Togop tepat berdampingan dengan ibukota Kotobangon. Tahun 1904 adalah tahun mulainya penetapan *Controleur* di Onderafdeeling Bolaang Mongondow. Pada masa pemerintah Raja Laurens Cornelis Manoppo yang dilantik pada tanggal 28 Juni 1928, jabatan *Controleur* untuk sementara dirangkap oleh Asisten Residen Gorontalo, yaitu Mr. M. Allaart sampai tahun 1930. Kemudian pada tanggal 23 April 1930 diangkatlah *Controleur* Ochtman sebagai *Controleur* yang tetap untuk Onderafdeeling Bolaang Mongondow 17). Dalam masa penjajahan Belanda mulai tahun 1901-1942, Kotamobagu tetap dijadikan sebagai ibukota Onderfdeeling 18). Pemerintah Jepang di Bolaang Mongondow pada tahun 1942 menempatkan seorang pejabat Jepang di daerah Bolaang Mongondow, yaitu Matsuda. Jepang segera mengatur jabatan-jabatan pemerintahan di Bolaang Mongondow, dengan menggunakan nama-nama Jepang 19).

Pada tahun 1943 Jepang mengangkat Henny Jusuf Cornelis Manoppo sebagai raja Bolaang Mongondow. *Bunkenkanrikan*. Matsuda tidak pernah diganti sampai saatnya Jepang menyerah kepada Sekutu. Tahun 1945-1950 Bolaang Mongodow dikembalikan lagi kepada Kontrolur Belanda yang semuanya berkedudukan di Kotamobagu sebagai ibukota Onderafdeeling, yang mulai pada tanggal 8 Maret 1948 menjadi gabungan Bolaang Mongondow.

Gabungan Bolaang Mongondow yang dibentuk berdasarkan *Zelfbestuursnegelen* 1938 *Staatsblad* No. 18 dan 27 tahun 1946, dan disahkan oleh Residen Manado tanggal 20 Agustus 1948 No. B 17/1/8, mulai 8 Maret 1948, dan dibubarkan pada tahun 1954. Sebagai ibukota kabupaten otonom ditetapkan Kotamobagu. Daerah-daerah yang berstatus swapraja yaitu Bolaang Mongon-

dow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaipang Besar dan kemudian dihapuskan mulai pada tanggal 4 Juli 1959 sesuai UU no. 29/1959. Pada tahun 1954 daerah Bolaang Mongondow terdiri dari sembilan distrik yaitu Pasi, Lolayan, Dumoga, Bolaang, Kotabunan, Bolaang Uki, Bintauna, Bolaang Itang dan Kaidipang. Dalam reorganisasi tahun 1964 jumlah kecamatan di daerah Bolaang Mongondow menjadi 15 buah yakni Bintauna, Bolaang, Bolaang Itang, Bolaang Uki, Dumoga, Kaidipang, Kotabunan, Kotamobagu, Lolak, Lolayan, Modayak, Pasi, Pinolosian, Poigar dan Sangtombolang. Reorganisasi wilayah kecamatan berlaku mulai 1 Juli 1964. Daerah Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan yang terjadi dari 204 desa 20). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960, maka Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow masuk bagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara Tengah. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 1964, maka Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow adalah bagian wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, keadaan ini berlaku sampai sekarang 21).

B. UJUD PERLAWANAN

Bangsa asing telah memasuki Bolaang Mongondow sejak abad ke-16. Kehadiran bangsa-bangsa asing telah dimulai dengan kehadiran Portugis dan Spanyol dan kemudian diikuti oleh Belanda, Jepang dan akhirnya Sekutu. Dari sejarah beradanya bangsa asing di daerah Bolaang Mongondow tidak banyak reaksi yang dibuat oleh penduduk setempat, namun apa yang telah dibuat oleh rakyat yang ada di Bolaang Mongondow walaupun kecil dan sedikit telah juga diakui sebagai kejadian yang berupa rentetan dan jalinan sejarah melawan penjajah dalam segala bentuk dan bidangnya.

Pada uraian terdahulu di dalam menguraikan tentang wilayah hukum pemerintahan terlihat adanya reaksi-reaksi atau perlawanan kecil yang dilakukan oleh penduduk Bolaang Mongondow terhadap bangsa asing yang berlangsung sebelum abad ke-20. Perlawanan-perlawanan tersebut berlatar belakang menolak orang asing dan hal-hal yang disebabkan oleh cara penggantian raja oleh Belanda yang tidak diterima oleh rakyat.

Dan pada permulaan abad ke-20 ada perlawanan di Pondodon (1901). Aksi selama masa pergerakan nasional (1908-1942) kegiatan peristiwa terisi dengan kegiatan yang ada hubungan dengan pemerintah Belanda, tetapi tak banyak nampak usaha perlawanan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka situasi antara tahun 1945-1950 daerah Bolaang Mongondow terisi dengan aksi perlawanan oleh penduduk yang menamakan diri **Pasukan Banteng Maesa (PBM)** dan **Pasukan Pemuda Indonesia (PPI)**. Laskar Banteng Bolaang Mongondow serta perlawanan terhadap NICA di Molibagu di kecamatan Bolaang Uki. Perlawanan ini dilancarkan untuk menolak kembalinya penjajah Belanda, dan sebagai perjuangan mempertahankan dan melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan, dalam rangka memben-tuk pemerintahan Republik Indonesia di Bolaang Mongondow.

C. JALAN PERLAWANAN

1. Perlawanan Rakyat Sebelum Abad Ke-20

Terhadap Portugis - Spanyol rakyat Bolaang Mongondow telah memberikan perlawanan yaitu di Buntalo dan di Pinolosian. Orang Bogani dan Pinolosian telah mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Beangkasi. Peristiwa perlawanan yang lain telah berlangsung di Dumoga. Semua perlawanan ini hanya berlatar belakang pada penolakan terhadap orang asing di Bolaang Mongondow 22).

Dalam abad ke-17, Raja Loloda Mokoagow dipecat oleh Belanda. Di abad ke-18 Raja Makalabah dibuang oleh Belanda ke Manado. Kemudian juga dalam abad ke-18 Raja Salomon Manoppo ditawan oleh Belanda ke Ternate sebagai akibat perlawanan raja terhadap Belanda, di mana raja telah mencabut palpat batas yang telah dipancarkan oleh Belanda. Dari Ternate Raja Salomon Manoppo dibuang ke Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan. Karena peristiwa ini maka timbul pemberontakan rakyat Bolaang Mongondow yang dipimpin oleh Sadaha Jambet, yang menuntut agar Belanda mengembalikan Raja Salomon Manoppo ke Bolaang Mongondow.

2. Perlawanan Rakyat Pontodon Tahun 1901

Pontodon adalah suatu desa yang berada di kecamatan Passi, Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, yang diperkirakan berada dua kilometer jauhnya dari ibukota Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Kotamobagu. Dari desa Pontodon ke timur sejauh 1 Km berada desa Pangian, lebih ke timur lagi sejauh setengah Km terhadap perkebunan penduduk Pontodon yang bernama Papak. Pada tahun 1901 penduduk desa Pontodon berjumlah $\pm$ 400 jiwa bekerja pada perkebunan Papak. Pada tahun 1901 desa Pontodon dikepalai oleh Arkalang. Kepala desa diangkat oleh Datu (Raja Mongondow) Laurens Junius Cornelis Manoppo. Antara rakyat Pontodon dan Belanda timbul perang, yang disebut perang Pontodon. Rakyat Pontodon melancarkan perlawanan terhadap Belanda, karena:

- a. Rakyat Pontodon tidak menghendaki adanya orang asing di desa Pontodon;
- b. Rakyat tidak mau adanya campur tangan asing dalam pemerintahan raja;
- c. Masuknya Belanda ke Pontodon dengan mengambil tanah perkebunan Papak dijadikan tempat untuk membangun perkampungan yang baru dalam rangka pembentukan kota yang baru dengan mendirikan asrama (tangsi) polisi Belanda, telah menimbulkan kemarahan rakyat karena perkebunan Papak sebagai sumber kehidupan mereka telah diambil oleh Belanda.

Pada tahun 1901 Belanda masuk ke Bolaang Mongondow dengan tentaranya yang dipimpin oleh *Controleur* Van Huizen. Belanda langsung memasuki perkebunan Papak tanpa memberi tahu dan tanpa meminta izin sebelumnya kepada pemerintah dan penduduk Pontodon. Perkebunan dipagari oleh Belanda dan dibangun asrama. Perbuatan Belanda ini telah menimbulkan kemarahan penduduk Pontodon sehingga mereka menggantungkan potongan-potongan kayu (*stek*) di sekeliling pagar sebagai tanda protes dan siap berperang. Melihat kejadian itu maka Belanda segera menetapkan dan mengumumkan tatatertib di markas Belanda di Papak. Antara lain disebutkan bahwa pada hari Minggu tidak menerima tamu dari luar. Bila tatatertib dilanggar, maka akan dikenakan hukuman. Ternyata melalui

tatatertib ini rakyat Pontodon mengambil kesempatan untuk menyerang. Huruma seorang penduduk desa Pontodon pada hari Minggu memasuki markas Belanda di Papak dengan alasan akan menjual batu. Karena pelanggaran ini maka Huruma ditangkap dan dirantai oleh Belanda. Sebagai akibatnya rakyat Pontodon melaksanakan penyerangan dan pecahlah perang Pontodon yang berlangsung selama tiga bulan. Penyerbuan pertama dipimpin oleh dua tokoh wanita, bernama Sopina dan Abolon. Kehadiran rakyat Pontodon disambut dengan Belanda dengan tembakan. Sopina berhasil menerobos pagar dan masuk ke dalam markas. Dengan bersenjatakan pisau, pedang yang diikatkan pada pergelangan tangan, tombak, bambu runcing dan kapak, rakyat Pontodon menyerang dan bertahan serta berusaha memukul Belanda agar segera meninggalkan desa Pontodon dan perkebunan Papak. Para pemimpin rakyat Pontodon yang memimpin perang melawan Belanda ini adalah Mama Kapala, Korompot, Pade Korompot, Ligatu, Abo Kui Mokoginta. Lima tentara Belanda telah tewas. Haruma juga tewas. Ia dikuburkan bersama sebelas orang lainnya dalam sebuah makam. Banyak korban berjatuhan pada kedua belah pihak. Orang lelaki berumur 10 tahun ke atas, banyak yang dibunuh dan dibuang ke Nusa Kambangan di Jawa Tengah. Dari mereka yang dibuang ke Nusa Kambangan, yang sempat kembali ke desa Pontodon ada empat orang yaitu Bugol, Pakois, Akeg dan Bolanga. Lainnya tidak kembali lagi termasuk Limbanon dan kawan-kawannya.

Sebagai akibat dari perlawanan ini, rakyat Pontodon banyak yang mengungsi ke Kayumoyondi (Bolaang Mongondow), Ponikian (Minahasa), Ongkau (Minahasa) dan Ratatotok (Minahasa). Markas kedudukan *Controleur* di Papak dipindahkan ke Kotamobagu. Perang Pontodon telah memberikan situasi baru bagi Bolaang Mongondow 23).

3. Perlawanan Rakyat Molibagu 1946 – 1950

Pada tahun 1945 Jepang menyerah, dan kedudukan Jepang diganti oleh NICA. NICA antara lain berada di Kotamobagu, Bolaang Uki, dan dalam tahun 1946 rakyat Molibagu telah bergerak dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih dan berusaha

membentuk pemerintahan sendiri. Mereka berusaha membentuk KNIP. Pejuang-pejuang di Molibagu berusaha mengadakan hubungan dengan Jogjakarta. Di Molibagu disusun para menteri di bawah pimpinan salah seorang Perdana Menteri. Tahun 1946 NICA yang berada di Bolaang Uki diserbu oleh kelompok **Pemuda Rela Mati**, yang dipimpin oleh Harun Fanta. Serangan dilakukan pada waktu malam. Perlawanan ini disebabkan oleh karena dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17-8-1945 dan tidak mau melihat lagi kekuasaan asing. Dengan menggunakan peralatan Jepang maka persiapannya dilakukan di desa Salongo kemudian terjadi perang terbuka dan para pemuda bergerilya di bawah pimpinan Badarudin Bekedula. Dalam peristiwa 14 Februari 1946, yang dikenal dengan Peristiwa Merah Putih di Manado, di Molibagu dan daerah Bolaang Mongondow juga dikikibarkan Sang Merah Putih. Pada saat itu para pemuda yang berada di hutan keluar semua. Para pemuda itu lalu ditangkap oleh Belanda, dipenjarakan dan dibawa ke Tomohon. Bekedula masuk kembali ke hutan dan bergerilya. Barulah pada tahun 1950 Bekedula dengan kawan-kawannya meninggalkan hutan. Bekedula akhirnya menjadi Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bolaang Uki 24).

4. Perlawanan Pasukan Benteng Maesa 1945 – 1947

Pembentukan organisasi Pasukan Benteng Maesa (PBM) bermula dari percakapan antara *Kenpeiho* W.M. Palealu (pembantu tentara pada *Kenpeitai*) dengan Hirayama sewaktu menjalankan tugas piket di Markas *Kenpeitei* Manado Sulawesi Utara di Tomohon pada malam tanggal 14 Agustus 1945. Percakapan itu berisi tentang perjuangan baru yaitu berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ini terjadi karena Hirayama memberitahukan tentang kekalahan Jepang, padahal berita kekalahan itu dirahasiakan oleh Jepang. Pelealu bersama Hirayama mengemukakan tekad perjuangan mereka kepada N.P. Somba yang berkedudukan sebagai pembantu *Kenpeitai*. Somba meneruskan hal ini kepada B.W. Lapien, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Distrik Pemerintahan Sipil di Lango-wan. Tanggal 25 Agustus diadakan pertemuan rahasia di tempat

kediaman Hirayama di Tomohon, yang dihadiri oleh Pelealu, Hirayama, Somba dan B.W Lopian. Kemudian B.W Lopian merestui pembentukan organisasi kelaskaran, terdiri dari bekas *Heiho*, *Keibodan*, *Seinendan* dan Angkatan Muda Indonesia di bawah pimpinan W.M. Pelealu. Disetujui juga tentang lokasi Markas Basis Komando dan tempat penampungan serta pengemblengan anggota dari segi fisik dan mental sebagai Depot Pendidikan kader-kader organisasi PBM.

Pada tanggal 12 September 1945 para anggota inti pasukan diberangkatkan dari Tomohon menuju Kotamobagu dengan menumpang dua buah kendaraan truck angkatan perang Jepang yang diperlengkapi dengan peralatan perang, bahan pakaian dan makanan serta obat-obatan. Pada malam tanggal 29 menjelang 30 September 1945 diadakan upacara pembentukan organisasi PBM bertempat di tengah hutan di belakang perkebunan Mopusi kira-kira 20 Km dari Kotamobagu, dengan susunan acara sebagai berikut :

- a. Pengibaran Sang Saka Merah Putih, yang diiringi dengan nyanyian kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan anggaran dasar organisasi PBM;
- c. Pembacaan keputusan komposisi personalia pucuk pimpinan organisasi.
- d. Ikrar bersama berupa pengangkatan sumpah pasukan untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan penandatanganan lembaran ikrar bersama yang dimaterai dengan darah masing-masing anggota (jari jempol kanan disayat dan darah ditempelkan).

Upacara tersebut dilakukan di depan api unggun dan dokumennya disimpan sendiri oleh Ketua/Komandan Pasukan dalam satu peti besi dan dibungkus dengan karung lalu dimasukkan ke dalam tanah. Dalam anggaran dasar organisasi "Pasukan Banteng Maesa" disebutkan antara lain bahwa wilayah operasi meliputi daerah Sulawesi Utara bekas Keresidenan Manado, yang berasas dan bertujuan menentang adanya penjajah kembali oleh pihak Belanda atas Indonesia dan membela serta mempertahankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni negara Republik Indonesia, dengan sifat organisasi adalah

kelaskaran bersenjata, dan nama organisasi adalah "Pasukan Banteng Maesa", yang berpusat di pedalaman Kotamobagu.

Komposisi personalia Badan Pucuk Pimpinan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) **Penasehat**
 - a. Penasehat teknis/taktik operasi : Hirayama alias Pak Banteng;
 - b. Penasehat bidang politik : B.W. Lopian;
- 2) Kordinator/penghubung antar Daerah : N.P. Somba;
- 3) **Pucuk Pimpinan Penanggung Jawab**
 - a. Ketua/Komandan Pasukan : W.M. Pelealu;
 - b. Wakil Ketua/Wakil Komandan : Jou. Kolondam;
 - c. Sekretaris/Kepala Staf Pasukan : J.R. Massie;
 - d. Wakil Sekretaris/Wakil Kepala Staf Pasukan : A. Massie.

Organisasi PBM yang bermarkas Komando di Mopusi di pedalaman Kotamobagu berusaha menggerakkan seluruh rakyat untuk menentang Belanda yang akan menjajah kembali. Sering terjadi pertempuran di Kotamobagu dan di sekitar Markas Komando sendiri. Akibat dari pada perlawanan ini maka banyak dari pada pimpinan meringkuk di penjara Manado. Hirayama alias Pak Banteng tertangkap dalam pertempuran di sekitar Markas Basis Komando (Mopusi), ia dijatuhi hukuman tembak mati oleh Pengadilan Militer Belanda di Manado. Ada yang dibuang ke Nusa Kambangan (Somba). PBM yang berusaha mengadakan hubungan dengan Pemerintah R.I., telah mengutus orang ke Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan akhirnya petugas PBM bertemu dan menerima instruksi dari Dr. G.S.S.J. Ratulangi selaku Pimpinan Pergerakan Perjuangan Kemerdekaan RI Wilayah Indonesia bagian Timur, di samping sebagai Gubernur Sulawesi.

Pada tanggal 14 Pebruari 1947 pimpinan dan penanggung-jawab organisasi "Laskar Rakyat RI" Daerah Sulawesi Utara Eddie Mongdong menghubungi W.M. Pelealu untuk melebur organisasi-organisasi kelaskaran di daerah Sulawesi Utara. Sejak

waktu itu PBM dilebur dalam organisasi "*Laskar Rakyat RI Daerah Sulawesi Utara*"²⁵).

5. Perlawanan Pasukan Pemuda Indonesia Laskar Banteng

Pemerintahan Jepang di Bolaang Mongondow dimulai pada tanggal 9 Maret 1942, yakni saat tibanya Matsuda selaku pembesar Jepang yang dikirim oleh Komandan Tentara Pendudukan di Minahasa. Bolaang Mongondow dijadikan sebagai gudang makanan bagi kepentingan perang Jepang. Jepang membentuk pula barisan-barisan pemuda di Bolaang Mongondow yaitu *Seinendan*, *Keibodan* dan sebagainya. Di samping itu dikerahkan *romusya* untuk bekerja di perkebunan dan pembuatan jalan. Sangat terasa penderitaan rakyat di masa Jepang. Akhirnya terjadilah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17-8-1945, yang sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang, untuk mencegah kemarahan dan balas dendam pihak rakyat Indonesia di daerah Bolaang Mongondow terhadap Jepang.

Pada tanggal 17 September 1945, *Fukugunco* Lolayan J.F.K. Damapolii, yang sedang berada di rumahnya yang terletak antara desa Motoboi Kecil dan desa Molinow dikunjungi secara rahasia oleh dua orang anggota Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). Kedua orang itu adalah anggota PPI yang bermarkas di Tondano (Minahasa). Mereka itu ialah John L. Massie dan J. Kolondam. Mereka ditugasi oleh N.P. Somba pimpinan PPI di Tondano agar di Bolaang Mongondow segera dibentuk PPI untuk berjuang membela kemerdekaan Indonesia. Di rumah Damapolii terjadilah pertemuan rahasia pembentukan pengurus PPI yang berstatus komisiariat, yang susunannya sebagai berikut :

Ketua	:	J.E.K. Damapolii
Sekretaris	:	Nurtina Gonobala
Anggota-anggota:		Abdurachman Mokobombang, SA. Moko- bombang, A.H. Raupu, S. Daun, L. Moko- bombang, A. Atom dan MS Datu.

Damapolii bersama istrinya telah mendengar berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita ini dimantapkan oleh Pengurus Komisariat PPI. Dari beberapa anggota terlihat adanya keraguan tentang berita kemerdekaan itu sehingga diutus beberapa orang pemuda ke Molobagu untuk mengecek kebenarannya di Gorontalo. Hubungan perjuangan antara Bolaang Mongondow dengan Gorontalo dilakukan melalui Molobagu. Di Molobagu mereka mendapat kepastian tentang berita kemerdekaan. Menurut A. Hatam naskah Proklamasi Kemerdekaan itu diperoleh dari Gorontalo yang dibawa oleh seorang petugas dengan menunggang kuda. Naskah Proklamasi itu ditaruh di bawah sadel kuda, sehingga walaupun melalui pos-pos pemeriksaan yang berlapis-lapis, naskah tersebut dapat tiba dengan selamat.

Naskah Proklamasi Kemerdekaan itu akhirnya memasuki Kotamobagu. Hal ini lebih membakar dan mengobarkan semangat perjuangan PPI. Damapolii selaku Ketua Komisariat PPI membentuk barisan kelaskaran yang diberi nama "**PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow**". Sebagai Komandannya diangkat Abdurrachman Mokobombang. PPI Laskar Banteng ini terdiri dari pasukan pemuda dan pasukan wanita. Pasukan wanita terdiri dari satu kompi yang bergerak dengan komandannya Nurtina Gonibala (isteri JEK Damapolii). Keanggotaan pasukan wanita dalam PPI Laskar Banteng terdiri dari para wanita yang berasal dari desa Motoboi Kecil dan desa Molinow yang berada tidak jauh dari Kotamobagu ibukota Dati II Bolaang Mongondow sekarang ini.

Selanjutnya dibentuk kelompok-kelompok yang masing-masing dipimpin oleh SA. Mokobombang, A.H. Raupu, Saridin Daun, L. Mokobombang, A. Atom dan M.S. Datu. Kelompok-kelompok ini ditempatkan di kedudukan Markas Besar PPI Laskar Banteng di Motoboi Kecil, di perkebunan milik J.E.K. Damapolii. Di semua kerajaan yang ada di Bolaang Mongondow dibentuk Markas PII Laskar Banteng setempat. Untuk Kerajaan Bolaang Uki, bermarkas di Molibagu dengan komandannya Husein Tanta, dan Markas Pinolosian dipimpin oleh M. Gonibala. Para anggota PPI Laskar Banteng mendapat sehelai kain berwarna Merah Putih sebagai tanda anggota. Mereka

mempunyai beberapa pucuk senjata pistol, LE dan satu peti granat, di samping bambu runcing. Persenjataan diperoleh dari Takamoto, bekas komandan **Tokeitai** Bolaang Mongondow. Ia mengatakan, bahwa Jepang telah menyerah dan senjatanya mereka serahkan kepada para pemuda Indonesia. Keanggotaan PPI Laskar Banteng meluas ke desa-desa di seluruh daerah Bolaang Mongondow sehingga di desa-desa dibentuk ranting-ranting PPI Laskar Banteng. Kain Merah Putih yang menjadi tanpa keanggotaan PPI Laskar Banteng, segera dapat diterima oleh masyarakat dengan penuh semangat, karena pada tahun 1939, rakyat di daerah Bolaang Mongondow sudah mengenal Bendera Merah Putih, yang untuk pertama kalinya dikibarkan dalam rapat umum Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dalam rangka gerakan Indonesia berparlemen.

Dalam satu perjuangan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di kantor pemerintah di Kotamobagu oleh para anggota PPI Laskar Banteng, mereka diserang oleh polisi Belanda yang bersenjata lengkap. Usaha menaikkan Bendera Merah Putih itu dimaksudkan sebagai perjuangan mendirikan Pemerintahan Republik Indonesia di Kotamobagu yang mencakup seluruh daerah Bolaang Mongondow. Rencana itu gagal. Pada tanggal 27 September 1945 Damapolii ditangkap di rumahnya di desa Motoboi Kecil oleh empat polisi Belanda yang dipimpin oleh J. Van Boychen, tetapi semangat perjuangan tetap menyala. Secara darurat Nurtina Gonibala isteri Damapolii segera mengambil-alih kepemimpinan PPI daerah Bolaang Mongondow. Ia mengeluarkan instruksi yang berisi, agar PPI Laskar Banteng meningkatkan perjuangan gerilya melawan Belanda, sambil tetap menyusun kekuatan dan memantapkan latihan-latihan kemiliteran bagi para anggota. Latihan dilakukan di lapangan desa Molinow dekat Kotamobagu, dengan para pelatihnya terdiri dari Agust Sukarni, Harun Mamonto yang dikenal selaku komandan PPI Laskar Banteng Kecamatan Lolayan, T. Dolot, A.B. Mamonto dan Nurtina Gonibala sendiri selaku komandan pasukan wanita PPI Laskar Banteng. Latihan tersebut mulai berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November 1945. Akhirnya Pasukan KNIL menyerang desa Molinow dan dengan serangan ini

latihan-latihan terhadap pasukan PPI Laskar Banteng terhenti. Pasukan KNIL segera menduduki desa Molinow. Markas pasukan PPI Laskar Banteng dipindahkan ke perkebunan Tanoyan. Di tempat yang baru ini rakyat membantu di bidang logistik sehingga pasukan tidak khawatir dalam hal persediaan bahan makanan. Untuk mematahkan perlawanan Pasukan PPI Laskar Banteng, maka Belanda dengan KNIL mempersulit rakyat untuk ke kebun. Belanda mengharuskan rakyat apabila akan ke kebun supaya memiliki izin terlebih dahulu dari Belanda. Belanda menyebar mata-mata di tengah-tengah rakyat. Di Bolaang Mongondow didatangkan satu kompi pasukan KNIL dari Minahasa. Kompi KNIL tersebut dipimpin oleh Komandan Kapten Latuperissa.

Kehadiran pasukan KNIL itu atas permintaan komandan polisi Belanda, Harry Harun Manoppo, karena melihat begitu hebatnya perlawanan yang dilakukan oleh PPI Laskar Banteng. Sejalan dengan datangnya pasukan Belanda, maka NICA menempatkan *Controleur* Langendon di Bolaang Mongondow, yang berarti status *Onderafdeeling* seperti sebelum perang dijalankan kembali. Dalam aksi perlawanan ini pasukan PPI Laskar Banteng mengadakan penghadangan dan pemutusan kawat telepon. Kemudian banyak pimpinan PPI Laskar Banteng ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Kotamobagu. Nurtina Gonibala dibawa ke Manado dan dipenjarakan bersama-sama para pejuang yang bergerak dalam Peristiwa Merah Putih tanggal 14 Pebruari 1946 di Manado. Dari pusat di Tanoyan maka para anggota PPI Laskar Banteng yang belum ditangkap oleh Belanda, terus mengadakan perlawanan dengan bergerilya. Walaupun Belanda berusaha membatasi gerak rakyat untuk membantu para gerilyawan, tetapi rakyat tetap memberi bantuan logistik dan sekaligus memberikan keterangan tentang keadaan pasukan Belanda. Rakyat dan Pasukan PPI Laskar Banteng secara bersama-sama mengerjakan perkebunan dan persawahan penduduk. Rakyat membantu pelaksanaan dan tugas dapur umum. Dalam tugas di dapur umum dikenal nama Hatidah Mokobombang dan Gilli Mokobombang. Setelah Peristiwa Merah Putih 14 Pebruari 1946 di Manado, maka Residen B.W. Lapien bersama komandan F. Bisman mengunjungi Bolaang

Mongondow. Kedatangan ini menyebabkan markas di Tonayan dipindah ke Kotamobagu, tetapi Tonayan tetap dijadikan tempat latihan PPI Laskar Banteng. Sebenarnya tekad PPI Laskar Banteng untuk mendirikan pemerintahan Republik Indonesia di Bolaang Mongondow sudah direncanakan secara matang pada bulan November 1945, yaitu pada waktu pelaksanaan latihan yang terakhir di pusat latihan di desa Molonow. Mereka juga bermaksud akan melaksanakan serangan umum terhadap Belanda pada waktu malam. Namun rencana ini tercium oleh pasukan Belanda. Pada hari latihan terakhir telah terkumpul sekitar 400 orang pemuda yang akan turut menyerang dan akan merebut kekuasaan. Sekitar pukul 10.00 pada hari-hari terakhir latihan tiba-tiba pasukan Belanda menyerang markas PPI Laskar Banteng. Pihak polisi Belanda jatuh korban, sedangkan PPI Laskar Banteng segera mengundurkan diri ke hutan untuk menghindarkan jatuhnya korban di kalangan rakyat. Karena hebatnya PPI Laskar Banteng, maka polisi Belanda mundur ke Kotamobagu dan langsung meminta bantuan kepada pasukan dari Manado. Pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Latuperissa segera didatangkan dan segera ditempatkan di desa Molinow. Kemudian tibalah *Controleur* Langendon yang diangkat oleh Residen Coogans de Ruyter untuk menjalankan pemerintahan NICA di Bolaang Mongondow, yang berpusat di Kotamobagu. Penangkapan terhadap para pemimpin PPI Laskar Banteng membuat rakyat bersikap menolak terhadap kehadiran NICA. Rakyat turut bergerilya bersama pasukan PPI Laskar Banteng di hutan-hutan. Dari markas di perkebunan Tonoyan disusun serangan penghadangan yang dilakukan antara jalan Inobonto - Kotamobagu, Kotamobagu - Molobagu dan di sepanjang jalan pantai utara mulai Inobonto, Bintauna, Bolaang Itang sampai ke Boroko di Kaidipang Besar. Setiap pasukan Belanda yang lewat ditembak dan digranat. Walaupun kemudian banyak pimpinan ditangkap dan dipenjarakan, namun perjuangan PPI Laskar Banteng masih bertahan sampai bulan Pebruari 1946, di kala terjadi Peristiwa Merah Putih di Manado. Keberhasilan Peristiwa di Manado dengan berkibarnya Sang Saka Merah Putih, menyebabkan pasukan PPI Laskar Banteng yang bergerilya di

hutan-hutan turun dan menduduki seluruh daerah Bolaang Mongondow dan segera membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini terjadi di waktu kunjungan Residen B.W. Lapien yang dikawal oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten F. Bisman ke Bolaang Mongondow. Pasukan KNIL bersama komandannya Kapten Latuperissa diperintahkan untuk menurunkan bendera Merah Putih Biru dan menaikkan bendera Merah Putih. Tanoyon ditinggalkan dan semua pasukan PPI Laskar Banteng diperintahkan kembali ke desa-desa untuk memperkuat pertahanan di lingkungan masing-masing. Semua pimpinan PPI Laskar Banteng yang dipenjarakan oleh Belanda dibebaskan. Bendera Merah Putih di semua instansi dan kepolisian dikibarkan dengan megah.

Perjuangan politik sampai tahun 1950 dilakukan secara bersama dengan kegiatan-kegiatan bergerilya dari PPI-Laskar Banteng 26).

D. AKIBAT PERLAWANAN

Sampai dengan abad ke-16 keadaan Bolaang Mongondow telah terisi dengan kekuasaan yang teratur berupa kerajaan-kerajaan. Kedatangan Bangsa asing ke Bolaang Mongondow telah menimbulkan situasi baru bagi daerah ini, dan bangsa asing yang sempat menginjakkan kaki di daerah ini adalah Portugis, Spanyol, Belanda dan Jepang. Kehadiran mereka bukan hanya karena terdorong oleh perdagangan, tetapi kemudian juga bersifat penguasaan daerah, malah menegakkan pemerintahan. Apa yang dibuat oleh bangsa asing adalah bukan hanya sekedar menguasai tetapi sudah menjajah. Penjajahan ini tidak disenangi oleh rakyat yang ada di Bolaang Mongondow, sehingga mereka melancarkan aksi perlawanan. Dari bentuk perlawanan yang sangat sederhana hanya dengan senjata parang, tombak, kapak, berkembang menjadi perlawanan dengan senjata modern seperti bedil dan granat.

Perlawanan dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-19 memang tidak terlalu nampak. Perlawanan itu semata-mata bertolak dari penolakan terhadap kekuasaan asing, terutama ditujukan pada Portugis dan Spanyol. Perlawanan terhadap

Portugis dan Spanyol itu betapa sederhananya, namun hal itu telah turut menanamkan perasaan dan sikap rakyat Bolaang Mongondow untuk tidak mau dijajah oleh bangsa asing. Sikap itu terutama ditunjukkan kemudian oleh rakyat Bolaang Mongondow terhadap Belanda dan Jepang. Perasaan solider terhadap nasib rajanya yang diturunkan dari kedudukannya dan dibuang oleh Belanda, telah mengakibatkan adanya protes dan perlawanan rakyat. Peristiwa ini telah melahirkan kepercayaan dan penghargaan rakyat terhadap pemimpinnya. Sifat hormat dan taat kepada pimpinan dikarenakan perasaan sebagai satu bangsa, yang menjunjung satu bahasa dan mempunyai satu tanah air telah merupakan modal perjuangan dalam menghadapi semua bentuk penjajahan.

Perlawanan rakyat Pontodon telah membawa korban, baik bagi Belanda maupun bagi penduduk setempat. Aksi ini telah mempertebal rasa kemampuan diri untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang akan dikuasai oleh pihak asing. Juga peristiwa ini telah menunjukkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk menghalau penjajah walaupun dengan persenjataan yang tidak modern. Semangat juang dan patriotisme telah dibangkitkan. Rakyat mendapat pengalaman dalam perlawanan. Apa yang telah ditunjukkan oleh rakyat Pontodon telah membangkitkan semangat juang bagi gerakan-gerakan yang berikutnya baik dalam masa pergerakan nasional maupun dalam pendudukan Jepang di daerah Bolaang Mongondow.

Perlawanan yang telah dilancarkan di Molibagu, Molinow, Tanoyan, Kotamobagu dan hampir di semua daerah Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh para pemuda baik yang tergabung dalam pasukan Banteng Maesa maupun dalam Pasukan Pemuda Indonesia Laskar Banteng Bolaang Mongondow, baik terhadap Jepang maupun terhadap Belanda dan NICA, telah membawa akibat positif terhadap perjuangan rakyat Bolaang Mongondow. Korban telah berjatuhan dan keberanian serta kepercayaan rakyat dalam perjuangan telah ditingkatkan. Rakyat dan penduduk mendapat pengalaman di dalam menggunakan senjata modern. Seluruh rakyat telah digerakkan dan turut dalam perjuangan kemerdekaan. Organisasi-organisasi politik

menjadi berkembang karena beradanya para pemuda pejuang. Dari perlawanan ini telah ditempa dan ditumbuhkan para pemimpin yang berani bertindak dan berani mengambil resiko dengan patriotisme yang dalam. Ketrampilan militer berkembang pesat karena digodok oleh pengalaman dan perlawanan bergerilya. Para pemuda pejuang merupakan modal pembentukan Angkatan Bersenjata RI di Bolaang Mongondow. Perlawanan-perlawanan rakyat Bolaang Mongondow terhadap kolonialisme dan imperialisme telah menyebabkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat dihirup oleh rakyat Indonesia di Bolaang Mongondow. Dengan semua perlawanan itu maka Bolaang Mongondow tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kaum kolonialis dan imperialis pada akhirnya terpaksa angkat kaki dari Bolaang Mongondow, maka aman dan tentramlah seluruh rakyat di Bolaang Mongondow. Di sana tiada lagi kekuasaan asing yang mau menjadikan Bolaang Mongondow sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri. Perlawanan rakyat telah membawa rakyat Bolaang Mongondow hidup di alam segar, udara kemerdekaan, di mana Sang Saka Merah Putih akan tetap berkibar sebagai lambang kesucian dan keberanian dalam perjuangan dan perlawanan, yang telah dilahirkan oleh para Pahlawan Kusuma Bangsa dan membentuk para pemimpin bangsa yang setia kepada Amanat Penderitaan Rakyat.

CATATAN BAB I

- 1). D. Brillman, *Onze Zending Velden*, 1938; juga dalam A. Maluegha, *Ikhtisar Perkembangan Kekuasaan Belanda di Daerah Nusa Utara*, pidato ilmiah Dies UNSRAT, Manado. 1972, hal. 2; lihat E. Tatimu, *Monografi Kabupaten Sangir Talaud*, Tahuna, 1979, hal. 10.
- 2). A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 2-3.
- 3). *Ibid.*, hal.3-4; ditambah wawancara dengan D. Manatar tanggal 30-9-1980.
- 4). A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 3-4; wawancara dengan D. Manatar, 30-9-1980.
- 5). A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 9-10; wawancara dengan D. Manatar, 30-9-1980; wawancara dengan M.L. Malensang, 29-9-1980; N.M. Tucunan, *Hikajat Perang Arangkaa*, Lirung, 1972, hal. 5, 6, 11.
- 6). Wawancara dengan G.M.T. Sarapil, Tahuna, 29-9-1980.
- 7). H.B. Elias, *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di pulau Siau*, Manado, 1973, hal. 69.
- 8). *Ibid.*, hal. 71.
- 9). A. Sigarlaki dan kawan-kawan., *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Manado, 1977, hal. 67-68, 70; lihat E. Tatimu, *Kepulauan Sangihe Talaud*, Tahuna, 1975, hal. 10.
- 10). A. Maulegha, *op.cit.*, hal. 8-9.
- 11). Wawancara dengan M.L. Malensang, Tahuna, 30-9-1980.
- 12). A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 8; juga dilengkapi oleh H.B. Elias, *op.cit.*, hal. 85, 86, 111.
- 13). A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 8-9.
- 14). D. Brillman, *op.cit.*, hal. 112; A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 9.
- 15). D. Brillman, *op.cit.*, hal. 112; A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 9.
- 16). Wawancara dengan John Rahasia, Manado, 24-10-1980.
- 17). Wawancara dengan D. Manatar, Tahuna, 30-9-1980; juga dalam A. Maluegha, *op.cit.*, hal. 6; wawancara dengan R. Timbul, Tahuna, 3-10-1980.
- 18). Wawancara dengan D. Manatar, Tahuna, 30-9-1980.
- 19). Wawancara dengan R. Timbul, Tahuna, 3-10-1980.

- 20). Wawancara dengan R. Timbul dan A.N. Moleh, Tahuna, 3-10-1980.
- 21). Wawancara dengan R. Timbul dan A.N. Moleh, Tahuna, 3-10-1980.
- 22). Wawancara dengan R. Timbul, Tahuna, 3-10-1980.
- 23). Wawancara dengan R. Timbul, Tahuna, 3-10-1980.
- 24). G. Bawole dan kawan-kawan., *Struktur Bahasa Talaud*, hasil penelitian, Manado, 1973, hal. 1.
- 25). *Ibid.*, hal. 3, 4.
- 26). N.M. Tucunan, *op.cit.*, hal. 5.
- 27). *Ibid.*, hal. 7.
- 28). *Ibid.*, hal. 10.
- 29). *Ibid.*, hal. 10-11.
- 30). Wawancara dengan M.L. Malensang, Tahuna, 30-9-1980.
- 31). N.M. Tacunan, *op.cit.*, hal. 21.
- 32). *Ibid.*, hal. 22.
- 33). H.B. Elias, *op.cit.*, hal. 135-145.
- 34). *Ibid.*, hal. 140, 149.
- 35). Wawancara dengan D. Tatipang, Tahuna, 3-10-1980; wawancara dengan Th. Makahanap dan E.J. Sabaru, Tahuna, 2-10-1980; H.B. Elias, *op.cit.*, hal. 148-149, 151-152; L. Th. Manus, *Sejarah Kebangkitan Nasional Sulawesi Utara*, hasil penelitian, Manado, 1978, hal. 202.
- 36). Wawancara dengan D. Tatipang, Tahuna, 3-10-1980; Wawancara dengan Th. Mahanap dan E.J. Sabaru, Tahuna, 2-10-1980.
- 37). Wawancara dengan Th. Makahanap dan E.J. Sabaru, Tahuna, 2-10-1980.
- 38). Wawancara dengan Th. Makahanap dan E.J. Sabaru, Tahuna, 2-10-1980; dengan D. Tatipang, Tahuna 3-10-1980.
- 39). Wawancara dengan D. Tatipang, Tahuna, 3-10-1980; lihat dalam H.B. Elias, *op.cit.*, hal. 148.
- 40). H.B. Elias, *loc.cit.*
- 41). *Ibid.*, hal. 150.
- 42). Wawancara dengan D. Tatipang, Tahuna, 3-10-1980.
- 43). H.B. Elias, *op.cit.*, hal. 151.

CATATAN BAB II

- 1) MTS, 19771 : 11.
- 2) J. Bastiaans, 1938 : 231; M.H. Liputo, VIII, 1949 : 31.
- 3). L.Th. Manus, 1978 : 114; Manguda, 1977 : 11, 24.
- 4). M.H. Liputo, X, 1949 : 17.
- 5). S.R. Nur, 1976 : 71.
- 6). M.H. Liputo, IX, 1949 : 27 – 28.
- 7). L.Th. Manus, 1978 : 25; M.H. Liputo, XIII, 1950 : 2.

CATATAN BAB III

- 1). Pangeran Baabullah adalah putera Sultan Hairun (Sultan Ternate).
- 2). Sesuai motif kedatangan orang-orang Portugis yaitu: motif agama, motif ekonomi dan motif petualangan (Sartono Kartodirdjo cs, *Sejarah Nasional Indonesia* III, Jakarta, 1977, hal. 330).
- 3). Letaknya di teluk Manado, kira-kira sejam berperahu motor.
- 4). H.M. Taulu, *Sejarah Indonesia*, Manado, 1978, hal. 31.
- 5). *Ibid.* hal. 7.
- 6). NICA yaitu *Netherlands Indies Civil Administration*.
- 7). Yang terkenal dengan "Peristiwa Merah Putih".
- 8). "Waraney" adalah bahasa daerah Minahasa yang berarti "perwira".
- 9). Nama benteng itu Fort Amsterdam; sayang benteng itu sudah tiada/dimusnahkan oleh Jepang.
- 10). Kini situs purbakala tersebut, telah dipugar oleh Pemerintah.
- 11). PPI, yaitu Pasukan Pemuda Indonesia; dan B P N I, yaitu Barisan Pemuda Nasional Indonesia.
- 12). Ingat kapal pengeliling dunia yang ke-I oleh Magelhaes (1519–1521), (H.M. Taulu, *op.cit.*, hal. 5).
- 13). Karena pada tahun 1585, Portugal masuk daerah kuasa Spanyol (Sartono Kartodirdjo cs, *op.cit.*, hal. 330).
- 14). "Karnamen" adalah bahasa Minahasa, yang artinya "adat kebiasaan".

- 15). Yang oleh Spanyol disebut "*menado aen de cust* (E.C. Godee Molsbergen, *Geschiedenis van de Minahasa tot 1829*, Weltevreden, 1928, hal. 12).
- 16). Yang oleh Dr.H.J. de Graaf disebut "*een eeuwig verbond*" artinya "satu persekutuan abadi" (H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, s' Gravenhage/Bandung, 1949, hal. 203).
- 17). H.M. Taulu, *Perang Tondano*, Manado, 1937, hal. 9.
- 18). *Ibid.*, hal. 11.
- 19). *Ibid.*, hal. 19–21.
- 20). *Ibid.*, hal. 25.
- 21). Girot. W, *Perang Tondano*, Jakarta, 1963, hal. 94.
- 22). *Ibid.*, hal. 115.
- 23). H.M. Taulu, *op.cit.*, hal. 33, 34 dan 35.
- 24). E.C. Godee Molsbergen, *op.cit.*, hal. 169.
- 25). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan* (1945–1949) Daerah Sulawesi Utara, hasil penelitian, Manado, 1979, hal. 80–81; B. Wowor, *Sulawesi Utara Bergolak*, ALDA, Jakarta, 1979, hal. 22.
- 26). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *Ibid.*, hal. 81–82; B. Wowor, *op.cit.*, hal. 24.
- 27). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *ibid.*, hal. 72, 93.
- 28). F.R.J. Palit, *Tomohon dalam lintasan Sejarah Perang Pasifik*, Manado, 1978, hal. 94.
- 29). H.M.L. Legoh, *Empat belas Pebruari 1946 Mengisi Lembaran Sejarah Indonesia*, Manado, 1973, hal. 18–19.
- 30). *Ibid.*, hal. 114, 119.
- 31). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 121; Ch.Ch. Taulu, *Peringatan Perayaan Peristiwa Perebutan Kekuasaan di Sulawesi Utara 1946*, Jakarta, 1956, hal. 3–4; F.S. Watuseke, *Sejarah Minahasa*, Manado, 1968, hal. 61.
- 32). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 147–148; B. Wowor, *op.cit.*, hal. 36.
- 33). *Ibid.*, hal. 43.
- 34). H.S. Kaeng. *Selayang Pandang Sejarah Regional Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Sulawesi Utara*, Jakarta, 1971, hal. 29.
- 35). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 154.

- 36). *Ibid.*, hal. 155–157.
- 37). A.J. Lalamentik, *Sekelumit Sejarah Peristiwa Merah Putih 14 Pebruari 1946 di Minahasa*, Manado, 1979, hal. 2–3.
- 38). *Ibid.*, hal. 162–163.
- 39). L. Th. manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 163–166.
- 40). Ch.Ch. Taulu, *op.cit.*, hal. 8.
- 41). L.Th. Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 169.
- 42). Ch.Ch. Taulu, *op.cit.*, hal. 10.
- 43). B. Wowor, *op.cit.*, hal. 77.
- 44). Drs. A.B. Lopian, *Bentuk-Bentuk Perlawanan terhadap Kolonialisme*, Cibogo, 1980, hal. 1, 2 (paper).
- 45). *Ibid.*, hal. 5.
- 46). *Ibid.*, hal. 7.

CATATAN BAB IV

- 1). Manus dan kawan-kawan, *Laporan Penelitian Sejarah Perkembangan Kotamobagu sebagai ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow*, hal. 4.
- 2). GKDH Prop. Sulut, *Monografi Daerah Sulawesi Utara*, hal. 9–11.
- 3). Manus dan kawan-kawan, *loc.cit.*
- 4). Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 4–5.
- 5). Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 10–11.
- 6). GKDH Prop. Sulut, *Sulut Dalam Rangka Tahun 1979*.
- 7). Kepala Statistik Sulut, *Data Sementara Sensus Penduduk tahun 1980 bulan Nopember 1980*.
- 8). Taulu H.M. dan Sepang A.U., *Sejarah Bolaang Mongondow*, hal. 18–10.
- 9). Wawancara dengan A. Ondah, tgl. 26–9–1980 di Kotamobagu, dan dengan G.I. Makalunsenge, tgl. 27–9–1980 di Kotamobagu.
- 10). Taulu H.M. dan Sepang A.U., *op.cit.*, hal. 26.
- 11). Taulu H.M. dan Sepang A.U., *op.cit.*, hal. 28–29.
- 12). Taulu H.M. dan Sepang A.U., *op.cit.*, hal. 29–34.
- 13). Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 18–19.

- 14). BKDH Tingkat II Bolaang Mongondow, *Selayang Pandang tentang perkembangan tata pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara*, hal. 8–12.
- 15). Manus dan kawan-kawan, *Sejarah kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, hal. 29.
- 16). Manus dan kawan-kawan, *ibid.*, hal. 64.
- 17). Manus dan kawan-kawan, *ibid.*, hal. 71–76.
- 18). Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 31.
- 19). Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 33–34.
- 20). Manus dan kawan-kawan, *op.cit.*, hal. 35–38.
- 21). Manus dan kawan-kawan, *Sejarah kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, hal. 2.
- 22). Wawancara dengan A. Ondah, S.S. Amin dan Makalunsenge tgl. 26–27 September 1980, di Kotamobagu.
- 23). Mekalunsenge G.L., *Naskah Perang Pontodon Bolaang Mongondow*. Wawancara dengan A. Ondah, S.S. Amin, dan Makalusenge tgl. 26–27 September 1980, di Kotamobagu. Mahasiswa jurusan Civics Hukum FKIS IKIP Manado, laporan hasil survai tentang Perang Pontodon melawan Belanda.
- 24). Wawancara dengan S.S. Amin, S. Raupu dan H. Manoppo, tg. 27 September 1980 di Kotamobagu, wawancara dengan A.H. Gobel, tgl. 28 Oktober 1980 di Kotabagon.
- 25). Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. P&K, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)*, Daerah Sulawesi Utara, hal. 25, 37, 38, 63, 74, 86, 88, 89, 91, 96, 102, 105, 106, 109, 113, 121–124, 126, 127, 136–138, 141, 142, 177, 178. Mahasiswa jurusan Civics Hukum FKIS IKIP Manado, *Sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow 1908–1950*. Wawancara dengan Isban Samin tgl. 29 September 1980, dengan A. Hatam tgl. 27 September 1980, dengan Bakri van Gobel tgl. 1 Oktober 1980 (Manado), dengan Korowan tgl. 25 September 1980, dengan B.M. Manoppo tgl. 25 September 1980, dengan J.M. Manoppo tgl. 1 Oktober 1980, Jacobus Manoppo tg. 25 September 1980, dengan H. Raupu tgl. 26 September 1980, di Kotamobagu, di desa masing-masing.

DAFTAR BACAAN

- Abukari H.S. 1938. *Ringkasan Peristiwa di Gorontalo*, (Naskah, 1960).
- Brillman D, *Onze Zending Velden*,
- Bawole.G. dan kawan-kawan, 1973. *Struktur Bahasa Talaud*, Hasil penelitian, Manado.
- Bastiaans, J. *Het Verbond Tussen Limbotto en Gorontalo*, T.I.T.L.V, 1938/LX.
- , 1939. *Batatos in het Oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen Staatsbouw*, T.I.T.L. V/LXXIX.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang-Mongondow, *Esensi Laporan BKDH kepada Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara pada Perkunjungan pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow 1-8-1978*, Kotamobagu, 1978.
- Dunnebier, W, *Mengenai Raja-raja dari Bolaang-Mongondow*, (naskah tulisan tangan).
- Elias H.B. 1973. *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Ulu-Siau, Manado*.
- Godee Molsbergen. L.C. Dr. 1928. *Geschiedenis van de Minahasa tot 1829. Weltevreden*.
- Graff de H.J. Prof.Dr. 1949. *Geschiedenis van Indonesia*. s'Gravenhage/Bandung.
- Girof W. 1963. *Perang Tondano*. Jakarta.
- Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow. 1967. *Pandangan beberapa waktu secara chronologis dari Sejarah Gereja Bolaang Mongondow*, Kotamobagu.
- Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara. 1979. *SULUT dalam angka Tahun 1979*, Kantor Statistik dan Sensus Sulut, Manado.
- , 1973. *Informasi Umum Sulawesi Utara*. Bappeda: Manado.
- , 1972. *Monografi Daerah Sulawesi Utara*. Bappeda: Manado.

- Haga. B.J. Dr. 1931. *De Lima-pohalaa [Gorontalo]: Volks-Orde-ning, adatrecht en Bestuurs politik*. T.I.T.L.V. LXXI.
- Kaeng. H.S. 1971. *Selayang Pandang Sejarah Regional Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Sulawesi Utara*. Jakarta.
- Liputo. M. 1949. *Sejarah Gorontalo Limo Lopohalaa*. Gorontalo.
- Legoh. H.M.L. 1973. *Empat belas Pebruari 1946 Mengisi Lembaran Sejarah Indonesia*. Manado.
- Lalamentik. A.J. 1979. *Sekelumit Sejarah Peristiwa Merah Putih 14 Pebruari 1946 di Minahasa*. Manado.
- Lapian. A.B. Drs. 1980. *Bentuk-Bentuk Perlawanan Terhadap Kolonialisme* (Paper Lokakarya). Proyek IDS: Dep. P dan K, Cibogo.
- Manus. L.Th. dan kawan-kawan. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Sulawesi Utara*. Hasil Penelitian. Manado.
- 1979. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Sulawesi Utara*. Hasil Penelitian. Manado.
- 1979. *Laporan Penelitian Sejarah Perkembangan Kotamobagu sebagai Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow*. Manado.
- Mahasiswa Jurusan Civics Hukum FKSS-IKIP Negeri Manado. 1980. *Laporan Hasil survai tentang Perang Pontodon melawan Belanda*. Manado.
- 1980. *Sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow 1908 - 1950*. Manado.
- Mooduto. N. 1968. *Kerajaan-Kerajaan Holontalo, Limuto, Bone, Boalemo dan Katinggola atau Andiagile*. (Naskah Saduran).
- Maluega. A. 1972. *Ikhtisar Perkembangan Kekuasaan Belanda di Daerah Nusa Utara*. Pidato ilmiah Dies UNSRAT. manado.
- Manoppo. H.C. *Toetoerang Bangsa Raja Kerajaan Bolaang Mongondow*. Lolan.
- Makalunsenge G.L. *Perang Pontodon Bolaang-Mongondow*. (Naskah diketik. Kotamobagu).
- Maramis Max dan Perry Turangan. 1980. *Sulutteng Menyongsong Sidang Raya IX D.G.I. di Manado-Tomohon*. Manado.

- Nur S.R. 1976. *Masyarakat Polahi di Sulawesi Utara*. Bulletin Yaperma no.: 14 Tahun III Juni.
- Palit R.F.J. 1978. *Tomohon dalam lintasan Sejarah Perang Pasifik*. Manado.
- Pelealu W.M. *Sekelumit tentang Organisasi Pasukan Banteng Maesa*. (Naskah ketikan).
- Rhijn M.van. 1947. *Memorie van Overgave het Bestuur van den Aftredenen Resident van Manado*. Manado.
- Riedel J.G.F. Dr. 1970. *De Landschappen Holontalo, Limboto, Bone, boalemo en Katinggolo of Andagile*. geographische, statistische, historische en ethnographische aantekeningen. T.I.T.L.V. XIX.
- Sigarlaki A. dan kawan-kawan. 1977. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*. Manado.
- Sartono Kartodirdjo cs. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid III. Jakarta.
- Tatimu E. 1979. *Monografi Kabupaten Sangir-Talaud*. Tahuna.
- Tucunan N.M. 1927. *Hikayat Perang Arangkaa*. Lirung.
- Thayeb Abd. 1960. *Pemberontakan Rakyat Gorontalo Januari 1942*. (Naskah).
- Taulu H.M. 1937. *Perang Tondano*. Manado.
- , 1978. *Sejarah Indonesia*. Manado.
- , 1961. *Sejarah Ringkas Masuknya Agama Islam di Sulawesi Utara*. Manado.
- , 1980. *Langkah-Langkah penginjilan ke Sulawesi Utara-Tengah*. Manado.
- Taulu Ch.Ch. 1956. *Peringatan Perayaan Peristiwa Perebutan Kekuasaan di Sulawesi Utara 1946*. Jakarta.
- Taulu H.M. dan A.U. Sepang. 1961. *Sejarah Bolaang Mongondow*. Manado.
- Watuseke F.S. 1968. *Sejarah Minahasa*. Manado.
- Yasin Talue. 1936. *Sejarah Gorontalo*. (Naskah).

DAFTAR INFORMAN

1. Gobel, A.H., 65 tahun, Kotobangon, wawancara tgl. 28 Oktober 1980. dan 10 November 1980. Bekas Raja Kerajaan Bolaang Uki.
2. Imban Samin, 60 tahun, Mogolaing, wawancara 29 September 1980. Bekas Ketua DPRD Bolaang Mongondow.
3. Hatam. A., 54 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 27 September 1980. Aktivis PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow.
4. Hamim. S.S., 54 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 27 September 1980. Kepala Tata Usaha Kandep P & K Kotamobagu, bekas guru di Molibagu.
5. Bakri Van Gobel, 58 tahun, Manado, wawancara tgl. 1 Oktober 1980. Bekas Pimpinan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow.
6. Karouwan. F., 93 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 25 September 1980. Pensiunan Polisi Belanda.
7. Manoppo Bua Mas, 67 tahun, Kotabangon, wawancara tgl. 25 September 1980. Anak Raja Datu Cornelis Manoppo.
8. Manoppo, Manuel Johanes, 99 tahun, Manado, wawancara Tgl. 1 Oktober 1980. Anak Raja Riedel Manuel Manoppo.
9. Manoppo, M. Jacobus, 71 tahun, Kotobangon, wawancara tgl. 25 September 1980. Bekas Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.
10. Mokodompit. Semuel, 67 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 27 September 1980. Pensiunan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
11. Raupu. H., 81 tahun, Molinow, wawancara tanggal 26 September 1980. aktivis PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow.
12. Makalunsenge. G.L., 48 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 27 September 1980. Pembantu Bidang Operasi Kantor Dinas P dan K Bolaang Mongondow

dan bekas anggota DPRD Bolaang Mongondow.

13. Ondah. A. 55 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 26 September 1980. Kepala Dinas P dan K Bolaang Mongondow.
14. Manoppo. H. 48 tahun, Kotamogagu wawancara tgl. 25 September 1980. Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Dep. P dan K Bolaang Mongondow.
15. Raupu. S. 52 tahun, Kotamobagu, wawancara tgl. 27 September 1980. Kepala Kantor Dep. P dan K Bolaang Mongondow.
16. Moleh. A.N., wawancara tanggal 3 Oktober, Tahuna, 1980.
17. Malensang M.L., wawancara tanggal 29 September, 1980.
18. Manatar. D., wawancara tanggal 30 September, 1980.
19. Makahanap. Th., wawancara tanggal 2 Oktober, Tahuna, 1980.
20. Sarapil G.M.T, wawancara tanggal 29 September, Tahuna, 1980.
21. Sabaru E.J., wawancara tanggal 2 Oktober, Tahuna, 1980.
22. Rahasia. John, wawancara tanggal 24 Oktober, Manado, 1980.
23. Timbul. R., wawancara tanggal 3 Oktober, Tahuna, 1980.
24. Tatipang. D., wawancara tanggal 3 Oktober, Tahuna, 1980.

